

**STRATEGI KOMUNIKASI PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM MENGELOLA INFORMASI  
BERSAMA ORMAS ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Arrafflian Rachmansyah Nachranie**

**NIM : 204103010011**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM MENGELOLA INFORMASI  
BERSAMA ORMAS ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

**Arraflian Rachmansyah Nachranie**  
NIM : 204103010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM MENGELOLA INFORMASI  
BERSAMA ORMAS ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh :

**Arraflian Rachmansyah Nachranie**

**NIM : 204103010011**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R .

Disetujui Pembimbing



**Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.**

**NIP. 197410032007101002**

**STRATEGI KOMUNIKASI PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM MENGELOLA INFORMASI  
BERSAMA ORMAS ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Rabu

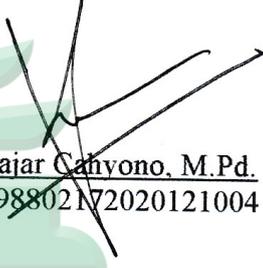
Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Muhibbin, S.Ag. M.Si.  
NIP.197111102000031018

  
Arik Fajar Cahyono, M.Pd.  
NIP. 198802172020121004

Anggota :

1. Dr. Abdul Choliq, M.I.Kom. 

2. Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



  
Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.  
NIP.19730227000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(QS. Al-Hujurat [49]:6)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama, Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemah”, 2019.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Teriring rasa syukur dan penuh kerendahan hati atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Penulis mengucapkan terimakasih atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu, serta memperkenalkan makna cinta sejati. Berkat karunia dan kemurahan-Nya, akhirnya skripsi yang penuh dengan kesederhanaan ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Teladan umat Islam, yang menjadi panutan dalam kehidupan. Semoga karya ini membawa manfaat dan keberkahan Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Yang istimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua. *Superhero* dan panutan Ayahanda **Choironi Zainul Arifin, S.E, S.H, M.M.**, beliau memang seorang pekerja wiraswasta yang penulis kagumi mengenai semangat juang nya sebagai kepala keluarga yang baik dan ilmunya selama ini yang telah membimbing penulis menjalani kedewasaan penuh dengan kekerasan realita yang membuat saya tertampar akan nasehatnya. Beliau yang selalu mendidik, mendoakan, memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai Sarjana.
2. Pintu syurga penulis Ibunda **Aria Yusi Miroscia Rochim, S.H.**, terimakasih sebesar-besarnya atas doa yang diberikan kepada penulis yang tiada hentinya. Penulis sampaikan atas segala bentuk dukungan, semangat, nasihat dan do'a yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Adik perempuan dan laki-laki penulis tersayang, **Brilliant Ramadhanisa Nachranie** dan **Cakra Bayu Ainur Rahman Nachranie**. Terimakasih kalian telah menjadi alasan satu-satunya penulis untuk terus semangat menggapai mimpi. Baginya siapa lagi ayah kedua jika bukan penulis, yang menurutinya kelak lantas siapa lagi. Apapun yang terjadi penulis akan selalu menjadi dibalik layar kalian untuk mendukung kalian.

4. Kepada keluarga besar penulis, Bani Mansur Kediri, Keluarga Nachranie serta Keluarga Adiwiyata yang sudah mendukung penuh atas perjuangan penulis selama ini khususnya kepada teteh **drg. Navella Restina, MMRS.** terimakasih banyak yang sudah mendukung dengan berbagai material maupun usahanya serta *reward* nya sampai penulis bisa bertahan sampai di titik ini.
5. Teman serta sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, bantuan penuh serta energi yang sangat positif kepada penulis yakni : **Lailatul Kamiliyah, Muhammad Fahrurrozi, Muhammad Dhiya'ul Haqqi, Farhan Walid Syah, dan Riva Regina Kurniawan.** Terimakasih telah menemani penulis berjuang, berusaha dan berikhtiar bersama dalam menimba ilmu, sehingga penulis mengerti akan arti sebuah pertemanan sejati dan mengerti arti bahwa hidup penulis itu tidak sendirian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan masa SMA '**OM SULTAN**', tak lengkap rasanya apabila penulis tak menyertakan kalian kedalam halaman persembahan, suka duka dirasa bersama, saling bertukar cerita, lika liku pertemanan terukir bersama. Terimakasih atas semua tragedi kecil yang pernah dilalui bersama yang senantiasa mengundang gelak tawa. Sederhana namun orang lain tak akan bisa.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Kelas **KPI 1**, terimakasih sudah bertahan sampai pada saat ini, terimakasih sudah selalu bersama-sama berjuang dari awal hingga tuntasnya studi ini. Kita banyak berhasil melewati masa-masa prihatin serta susah seperti pandemi Covid-19 bersama-sama, perkuliahan *online*, perkenalan *online* hingga fase perkuliahan ini hampir menduduki puncaknya.
8. Kepada teman-teman komunitas sekaligus organisasi tercinta **KOPER (Komunitas Perfilman Jember)**, komunitas sebagai wadah menuangkan imajinasi, kreatifitas serta menimba ilmu dalam dunia perfilman yang sangat luar biasa, yang memiliki ideologi kekeluargaan yang sangat kental Terimakasih teman-teman KOPER Khususnya Angkatan VII yang sudah kebersamai dan memberikan *Support* penuh penulis.

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan penuh dedikasi dan kerja keras. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan dan pembimbing umat dalam menapaki jalan keimanan dan kebenaran.

Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember”, merupakan hasil dari proses panjang yang memerlukan ketekunan, usaha maksimal, serta dukungan berbagai pihak. Dalam penyusunannya, tidak sedikit tantangan yang dihadapi, termasuk berbagai keterbatasan yang menjadikan skripsi ini mungkin belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi, antara lain:

1. **Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas upaya beliau dalam meningkatkan mutu penelitian dan karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. **Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Dakwah, atas dukungan dan persetujuan yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.

3. **Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I.**, selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. **Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat luar biasa berharga selama penulisan skripsi ini.
5. Para **Dosen Fakultas Dakwah**, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. **Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**, atas segala bentuk dukungan yang turut melancarkan proses penyusunan skripsi ini
7. **Seluruh Lembaga Tempat Penelitian di Kabupaten Jember**, yang telah memberikan akses dan informasi sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas besarnya jasa yang diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berharap dengan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta memberikan khazanah keilmuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R Jember, 18 Desember 2024

**Arraflian Rachmansyah Nachranie**  
**NIM. 204103010011**

## ABSTRAK

**Arraflian Rachmansyah Nachranie, 2024:** *Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** Strategi Komunikasi, BAKESBANGPOL, PPID, Ormas Islam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bakesbangpol Kabupaten Jember berperan strategis dalam memastikan transparansi informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008. Namun, keterbatasan komunikasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas), khususnya Ormas Islam, menghambat optimalisasi peran tersebut. Interaksi keduanya masih bersifat administratif tanpa pembinaan strategis, dan akses informasi melalui situs PPID Belum maksimal.

Fokus masalah yang diteliti pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana strategi komunikasi PPID Bakesbangpol dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana strategi komunikasi PPID Bakesbangpol menghadapi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui strategi komunikasi PPID Bakesbangpol dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember. (2) untuk mengetahui strategi komunikasi PPID Bakesbangpol menghadapi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten jember.

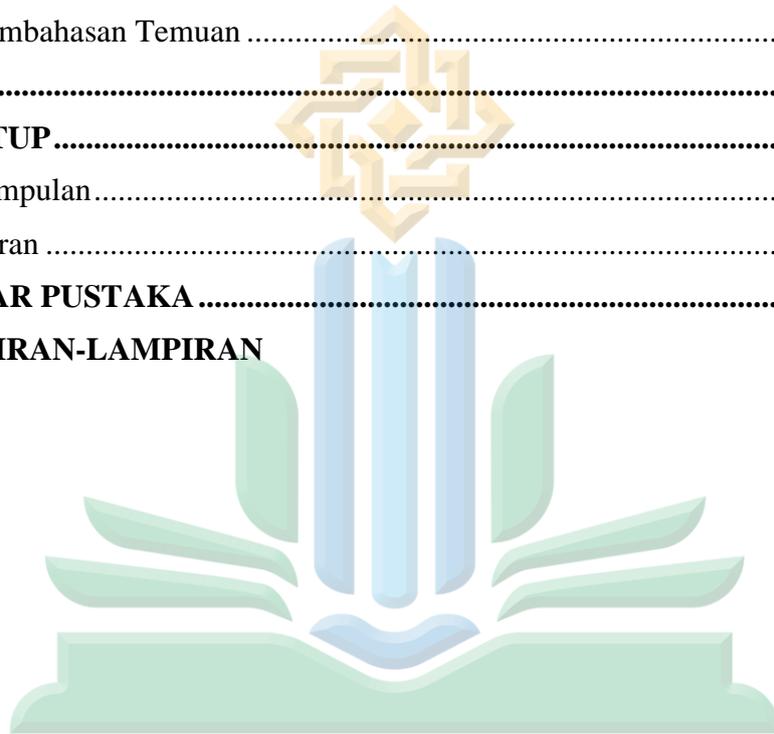
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dengan melalui model Miles and Huberman. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mendukung keterbukaan informasi publik kepada Ormas Islam telah mencakup lima tahapan komunikasi menurut Hafied Cangara yakni penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Meskipun strategi ini menunjukkan potensi besar, pelaksanaannya masih memiliki Faktor pendukung berupa faktor internal yaitu tingginya kesadaran dan motivasi PPID Bakesbangpol dalam menyediakan informasi terkait pendaftaran Ormas dan faktor eksternal berupa dukungan masyarakat termasuk Ormas yang berperan aktif menyebarluaskan informasi terkait pendaftaran Ormas kepada pihak lainnya. Faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, logistik, rendahnya pelaporan dari Ormas dan efektivitas penyampaian informasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Definisi Istilah.....	22
F. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II</b> .....	<b>29</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kajian Teori .....	42
<b>BAB III</b> .....	<b>67</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Subjek Penelitian .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	73
E. Analisis Data.....	77

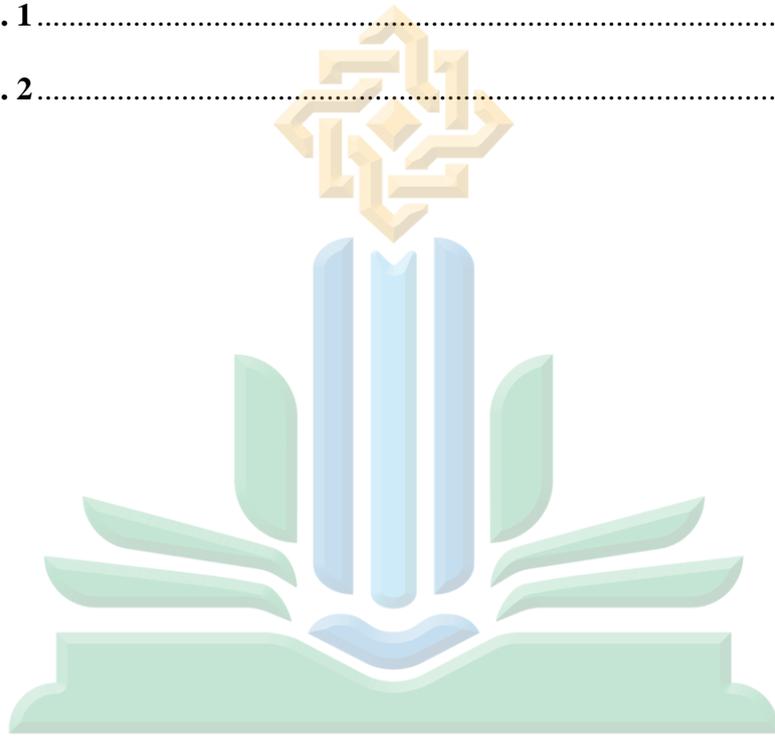
F. Keabsahan Data.....	80
G. Tahapan Penelitian .....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>86</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	86
B. Penyajian Data dan Analisis .....	95
C. Pembahasan Temuan .....	134
<b>BAB V.....</b>	<b>147</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>147</b>
A. Simpulan.....	147
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

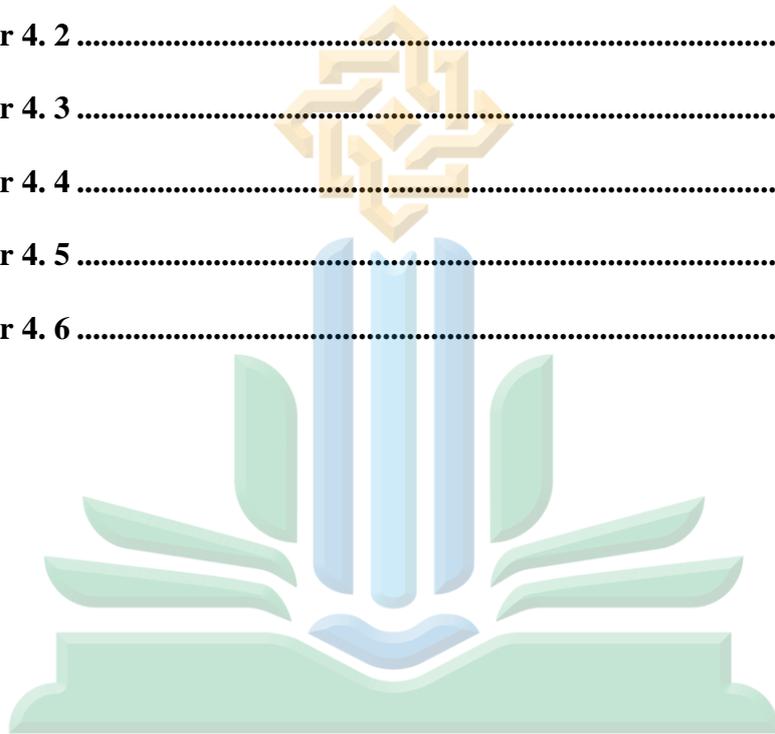
<b>Tabel 2. 1</b> .....	29
<b>Tabel 3. 1</b> .....	72
<b>Tabel 4. 1</b> .....	94
<b>Tabel 4. 2</b> .....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 .....	9
Gambar 1. 2 .....	18
Gambar 4. 1 .....	88
Gambar 4. 2 .....	126
Gambar 4. 3 .....	127
Gambar 4. 4 .....	128
Gambar 4. 5 .....	143
Gambar 4. 6 .....	145



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu elemen utama dalam pelayanan publik adalah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan yang efektif. Pemimpin untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi merupakan elemen dasar dalam memberikan layanan. Menentukan bahwa hanya ada dua masalah utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi bukanlah hal yang mudah yaitu proses pengolahan informasi dan gaya komunikasi organisasi.<sup>2</sup>

Hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Lembaga publik berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi. Untuk melaksanakan tugas ini, lembaga tersebut perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).<sup>3</sup>

Undang-undang keterbukaan informasi publik mengharuskan seluruh badan publik yang didanai oleh anggaran negara atau anggaran daerah guna menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan utama pengangkatan PPID adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap layanan informasi. Tugas utama PPID mencakup penyediaan layanan

---

<sup>2</sup> Asriadi, "Komunikasi Efektif Dalam Organisasi," (2024), 37.

<sup>3</sup> Mohammad Ali Marzuki, "Strategi komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dprri," 2023, 3.

informasi yang kompherensif bagi publik, menjaga agar informasi tersampaikan dengan benar dan efisien, serta memberikan layanan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini sangatlah krusial bagi pencapaian indikator kinerja PPID dalam mewujudkan akses informasi yang terbuka dan transparan bagi masyarakat luas.

PPID adalah entitas mandiri yang berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, dengan memastikan alur informasi tetap terjaga dan tersedia bagi yang membutuhkan. Peran PPID menjadi semakin signifikan Ketika dapat berfungsi secara terintegrasi dalam menyediakan dokumentasi dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik. Dengan demikian, PPID memiliki tanggung jawab strategis untuk menyiapkan arsip, menyusun dokumentasi, serta mengelola informasi yang dibutuhkan, sehingga setiap permintaan dari masyarakat dapat diakses dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi yang bersifat publik dan layak dari badan publik. Kebijakan keterbukaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam

---

<sup>4</sup> Nurul Fahmi and Baihaqi, "Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Aceh Barat," *At-Tanzir*, n.d., 22.

mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah dan badan publik lainnya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Lahir sebagai hasil dari proses refOrmasi bersama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang mencerminkan semangat perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. UU KIP membawa perubahan signifikan dengan memperluas hak publik untuk mengakses data dan informasi yang dikelola oleh badan publik. Akses ini mencakup berbagai jenis informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh badan publik.<sup>6</sup> dalam

Sebagaimana dijelaskan di ayat Al-Qur'an Q.S Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (Berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar”.<sup>7</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah jilid 2, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Ali Imran Ayat 104 mengandung perintah dari Allah SWT kepada umat yang beriman untuk tetap mengikuti jalan yang benar serta mengajak

<sup>5</sup> Ali Marzuki, “Strategi komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dpri.”, 2.

<sup>6</sup> Diskominfo Jember, “Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Jember Tahun 2022,” 2022, 3.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemah”*,.

orang lain menuju kebaikan. Shihab menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan seseorang bisa memudar atau bahkan hilang apabila tidak diingatkan atau jarang dipraktikkan.<sup>8</sup>

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mendorong agar ada sekelompok orang dalam umat yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, meskipun kewajiban ini berlaku juga bagi setiap individu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hal ini selaras dengan Hadist shahih riwayat Muslim Abu Hurairah, dimana Rasulullah SAW Bersabda : “Siapapun yang melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu, maka cukup dengan hatinya dan itu merupakan iman yang paling lemah .<sup>9</sup>

Tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa seharusnya terdapat sekelompok orang di antara umat yang bertugas mengajak kepada kebaikan, mendorong pelaksanaan perbuatan baik, serta mencegah perbuatan yang tidak benar. Mereka yang menjalankan tugas ini adalah orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Pengguna kata lain ‘sebagian’ dalam konteks ini menandakan bahwa tugas ini bersifat fardu kifayah, yakni merupakan kewajiban yang sifatnya kolektif yang tidak harus dilakukan oleh setiap individu. Tanggung jawab ini juga tidak sesuai

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*, Volume 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 175.

<sup>9</sup> Tafsir Ibnu Katsir, (*Tafsir Surat Ali Imran, Ayat 104-109*), n.d., 30 April 2015 <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-104-109.html>.

untuk semua orang, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki perhatian terhadap hal ini.<sup>10</sup>

Adapun berbagai macam Regulasi tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dipertanyakan eksistensinya seiring dengan adanya keterbukaan sebagai bagian dari upaya menerapkan tanggung jawab sosial dan komunitas yang baik dari pada pelaku Ormas. Diwaktu yang sama, terdapat keinginan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas (*Good Governance*). Kedekatan antara pemerintah sebagai regulator yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan dalam kapasitasnya memberikan pembinaan, menjadikan undang-undang ke-Ormasan masih relevan untuk dijadikan acuan.<sup>11</sup>

Dalam sebuah wawancara mengenai bagaimana Ormas Islam di Kabupaten Jember mendapatkan informasi untuk berbagai keperluannya, baik dengan komunitas maupun pemerintahan, dijelaskan bahwa salah satu Ormas Islam di Kabupaten Jember yakni Al-Irsyad umumnya memperoleh informasi dari MUI yang digunakan untuk keperluan dakwah dan masjid, sementara informasi terkait pemerintahan didapatkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) yang memiliki PPID di Kabupaten Jember.

---

<sup>10</sup> Quran Hadits, "Tafsir Al-Jalalain Ali Imran Ayat 104," n.d., <https://quranhadits.com/quran/3-ali-imran/ali-imran-ayat-104/>.

<sup>11</sup> Novriyanto Wartabone Mandak, Ronny Gosal, and Donald K. Monintja, "Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. Mi (2022), 2.

Mereka menjelaskan bahwa ada kesulitan yang dialami terkait informasi bantuan pemerintah untuk organisasi masyarakat yang saat ini tidak dipublikasikan, sehingga akses dan prosesnya masih sulit dan penuh tantangan karena Al-Irsyad belum pernah mengakses situs PPID Kabupaten Jember. Dijelaskan bahwa hubungan antara Ormas Islam, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat. Dimana Ormas Islam berada di bawah naungan MUI. Program-program dari MUI sering kali diadopsi oleh FKUB dan diperkirakan akan memperoleh legalitas serta anggaran pemerintah pada tahun depan dimana dana untuk FKUB dikelola melalui MUI. Untuk informasi lebih rinci mengenai Ormas, MUI memegang peran utama dan yang menyebarkan informasi tersebut melalui FKUB.<sup>12</sup>

Situs PPID Kabupaten Jember tampaknya hanya memuat informasi untuk kepentingan internal saja bukan untuk publik atau Ormas Islam. Meskipun PPID adalah program pemerintah yang bermanfaat, cakupannya masih kurang dikenal oleh masyarakat umum termasuk oleh Ormas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris Ormas Islam

Al-Irsyad, Vesel Amin, S.Kom.

“Situs PPID Kabupaten Jember tampaknya hanya berfokus pada penyediaan informasi untuk kepentingan internal dan belum sepenuhnya menasar publik atau Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Meskipun program PPID merupakan inisiatif pemerintah yang memiliki manfaat, cakupan dan informasinya masih kurang dikenal oleh masyarakat luas termasuk Ormas”<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Vesel Amin, *Sekretaris Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 2 Mei 2024, n.d.).

<sup>13</sup> Vesel Amin, *Sekretaris Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 2 Mei 2024, n.d.).

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Arief Rachman, S.IP. sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas urusan ke-Ormasan di Kabupaten Jember melalui PPID pelaksana BAKESBANGPOL menjelaskan, hubungan dan alur informasi antara PPID pelaksana dan Ormas Islam di Kabupaten Jember. Menurut PPID pelaksana, Ormas yang telah mendaftarkan keberadaannya akan selalu diundang untuk mengikuti kegiatan, dan informasi tentang kegiatan tersebut akan disampaikan langsung kepada organisasi yang bersangkutan tanpa perlu melalui MUI. Contohnya, Fatayat Jember yang telah mendaftarkan diri ke PPID pelaksana, akan menerima undangan setiap kali ada kegiatan yang relevan. Umumnya, Ormas diundang untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam berbagai kegiatan.<sup>14</sup>

Sampai saat ini, dari 120 Ormas/Lembaga/LSM dengan 20 termasuk bidang keagamaan, khususnya Islam yang terlampir dan 100 lainnya berada pada bidang sosial kemasyarakatan yang terdaftar di BAKESBANGPOL Kabupaten Jember sejak tahun 2022 belum ada yang meminta informasi apapun dari PPID Pelaksana. Padahal, PPID pelaksana siap menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Ormas asalkan sesuai dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana. Meski tidak semua data dapat diakses karena beberapa data bersifat terbatas, informasi yang terbuka akan disampaikan oleh PPID pelaksana untuk memenuhi kebutuhan Ormas. PPID Pusat di bawah naungan Dinas Komunikasi & Informatika

---

<sup>14</sup> Arief Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 6 Mei 2024).

Kabupaten Jember, sedangkan PPID Pelaksana yang menangani di bidang Ke-Ormas berada di BAKESBANGPOL Kabupaten Jember. Hubungan antara PPID pelaksana dan Ormas sejauh ini memiliki kesenjangan keterbatasan pada undangan kegiatan yang dimana Ormas dapat berpartisipasi sebagai peserta. Tidak adanya komunikasi yang mendalam antara PPID pelaksana dan Ormas kecuali pemberitahuan keberadaan. Misalnya, jika ada perubahan dalam kepengurusan Ormas. Hubungan ini mirip dengan pola pembinaan atau pemberdayaan, dimana PPID pelaksana akan merangkul dan mengajak Ormas untuk terlibat dalam kegiatan yang relevan. Selama kegiatan tersebut, Ormas dapat berpartisipasi dalam sesi forum interaktif, menyampaikan ide, gagasan atau pertanyaan.

Sebagai PPID Pelaksana, mereka hanya menginformasikan kepada Ormas tentang pelaksanaan kegiatan melalui rilis singkat yang mencantumkan tanggal, topik dan nama narasumber, biasanya ada presentasi dari narasumber dan sesi interaktif dimana peserta dari Ormas dapat mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi yang mereka butuhkan. Sebenarnya, PPID pelaksana tidak membatasi informasi yang diberikan dan setiap permintaan informasi akan dilayani sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Namun, PPID pelaksana juga tidak secara proaktif memberikan informasi, mereka dipersilahkan untuk datang dan berdiskusi dengan PPID pelaksana yang bertugas pada hari tersebut.

Selama informasi yang diminta tersedia, PPID pelaksana akan memberikan jawaban yang sesuai.<sup>15</sup>

Wawancara selanjutnya masih bersama dengan Arief Rachman, S.Kom. pada bulan Juni 2024, menjelaskan bahwa keberadaan Ormas Islam dicatat tanpa diklasifikasikan berdasarkan sikap atau karakteristiknya, seperti ramah atau keras. Saat ada kegiatan pemberdayaan, semua Ormas dilibatkan baik sebagai peserta maupun untuk berbagi dalam diskusi jika mereka aktif. Namun, sejauh ini tidak ada Ormas Islam yang terlibat aktif dalam kegiatan bersama BAKESBANGPOL karena adanya FKUB yang menangani urusan kerukunan dan perbedaan keyakinan, sehingga aspek-aspek tersebut dikelola secara bersama melalui FKUB.<sup>16</sup>



Gambar 1. 1  
Kategori Peta Ormas Islam Tercatat di Bakesbangpol & Strategi Komunikasi  
PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember

Organisasi yang belum tercatat di BAKESBANGPOL tetapi diketahui keberadaannya atau dikenali secara pribadi dianjurkan untuk

<sup>15</sup> Arief Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 6 Mei 2024).

<sup>16</sup> Arief Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 7 Juni 2024).

mendaftar agar dapat dipantau langsung jika ada masalah. PPID pelaksana hanya berperan dalam pemberdayaan dan pembinaan Ormas, tanpa campur tangan dalam kegiatan internal mereka. Sehingga dalam mewujudkannya secara bertahap melalui sosialisasi dengan harapan dari sosialisasi menciptakan situasi yang kondusif dan mengurangi masalah.

Berdasarkan undang-undang, Ormas terbagi menjadi dua jenis: yang berbadan hukum diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM kemudian yang kedua tidak berbadan hukum mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi BAKESBANGPOL tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan surat legalitas bagi Ormas. Selanjutnya Ormas yang sudah memiliki status hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau terdaftar melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri hanya mencatatkan kepengurusan mereka di BAKESBANGPOL karena Ormas ada yang berskala lokal dan berjenjang. Saat dulu masih bisa menerbitkan SKT, BAKESBANGPOL memberikan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Untuk Ormas Lokal di Kabupaten Jember.<sup>17</sup>

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki cakupan nasional yang membuat banyak organisasi membuka cabang di berbagai wilayah. Sebagai contoh, sebuah Yayasan yang terpusat di Jakarta dapat memiliki cabang di berbagai

---

<sup>17</sup> Arief Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 6 Mei 2024)..

Provinsi. Selanjutnya, membahas mengenai Ormas Plat merah merujuk pada organisasi yang didirikan oleh Pemerintah, dimana dasarnya Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam pembentukannya.

Sejauh ini strategi komunikasi PPID Pelaksana BAKESBANGPOL Kabupaten Jember dengan Ormas dilakukan secara Informal melalui percakapan langsung dan secara Formal melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Jika ada masalah dengan salah satu Ormas, biasanya diselesaikan melalui dialog, karena tidak memiliki wewenang untuk menghakimi atau mencabut izin Ormas jika terjadi kesalahan.

Laporan yang BAKESBANGPOL kirimkan ke tingkat Provinsi dan Pusat berperan dalam keputusan mengenai Ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila yang izin hukumnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham). PPID Pelaksana hanya berperan dalam melaporkan kasus tersebut, seperti pada kasus pencabutan izin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui penerbitan peraturan pemerintah. Pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan, keputusan tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat Jakarta. Izin Menkumham dicabut oleh pusat melalui peraturan pemerintah yang menyatakan Ormas tersebut bermasalah.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam pernyataannya yang dikutip dari [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), menyampaikan bahwa pemerintah melalui

Kementerian Hukum dan HAM, telah mencabut status badan hukum HTI. Langkah tersebut secara hukum berarti pembubaran Organisasi, namun tidak ada pernyataan resmi yang menetapkan HTI sebagai organisasi terlarang. Ia juga menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam kasus ini hanya mengkaji aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan pencabutan status badan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Ismail Yusanto, juru bicara HTI, menjelaskan bahwa pencabutan status badan hukum membuat HTI beroperasi sebagai organisasi tanpa badan hukum. Tidak secara otomatis dikategorikan sebagai organisasi terlarang. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak lagi menyebut HTI sebagai organisasi terlarang karena pernyataan semacam itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.<sup>18</sup>

Dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Gedung DPRD Jember, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin, sebagaimana dilaporkan oleh [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), menyampaikan permohonannya kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menerbitkan kebijakan yang melarang aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menegaskan bahwa, tanpa memandang bentuk atau jenis surat edaran yang diterbitkan, penting bagi pemerintah untuk mengambil

---

<sup>18</sup> Syaiful Hakim, "Yusril Tegaskan HTI Bukan Organisasi Terlarang," 2 November 2018, Diakses pada 20 November 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/764381/yusril-tegaskan-hti-bukan-organisasi-terlarang>.

langkah tegas dalam melarang kegiatan HTI yang dianggap telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut ahli hukum perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono, seperti yang dikutip oleh [www.detik.com](http://www.detik.com), pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dari aspek formil maupun materiil. Kampanye dan aktivitas yang dilakukan oleh HTI dinilai bertentangan dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, karena organisasi tersebut diketahui memperjuangkan ideologi Khilafah sebagai alternatif sistem politik. Dari sisi formil, pencabutan status badan hukum HTI didasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Keputusan tersebut juga mengacu pada Pasal 61 ayat 1 Perppu Ormas, sehingga aspek formil dalam pembubaran ini telah terpenuhi.

Secara materiil, pencabutan status badan hukum HTI yang menyebabkan pembubarannya dianggap sebagai langkah yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas, yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, sejak tanggal 19 Juli 2017, HTI secara hukum dinyatakan bubar dan tidak

---

<sup>19</sup> Zulus Muhammad, "Ormas Di Kabupaten Jember Berharap HTI Dibubarkan," 18 Mei 2016, Diakses pada 20 November 2024, <https://nu.or.id/daerah/Ormas-di-Jember-berharap-hti-dibubarkan-OHULO>.

diperbolehkan lagi melakukan aktivitas dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Masyarakat.<sup>20</sup>

Jika terjadi gejolak di Jember melibatkan Ormas, PPID Pelaksana melaporkan dan keputusan pembubaran izin dikeluarkan oleh pusat untuk seluruh Ormas di berbagai daerah. Setelah izin dicabut, Ormas tidak diizinkan melakukan kegiatan apapun dengan nama tersebut. Salah satu alasan pembubaran izin Ormas adalah karena bertentangan dengan Undang-undang dan Pancasila atau karena keberadannya menyebabkan gejolak di masyarakat hal ini juga menjadi bahan pertimbangan.

Mayoritas Organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Jember yang menjadi responden dalam wawancara mengungkapkan bahwa mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), kecuali pada saat proses pencatatan resmi keberadaan Ormas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung antara BAKESBANGPOL dan Ormas Islam masih terbatas pada aspek administratif, tanpa adanya komunikasi lanjutan yang lebih mendalam terkait pembinaan atau dialogis strategis.

Salah satu pengurus Ormas Islam yang pernah mengikuti Sosialisasi yang diadakan BAKESBANGPOL yakni Ahmad Nur Mahfuda, M.Pd.I. yang merupakan Sekretaris Ormas Islam Pengurus Cabang Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten Jember mengatakan kegiatan

---

<sup>20</sup> Andi Saputra, "Ahli: Pembubaran HTI Tidak Langgar HAM Dan UUD 1945," 19 Juli 2017, Diakses pada 20 November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-3566240/ahli-pembubaran-hti-tidak-langgar-ham-dan-uud-1945>.

terakhir BAKESBANGPOL bersama Ormas terkait sosialisasi pemilu pilpres pada Tahun 2022. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi dengan pihak BAKESBANGPOL, padahal sebagai pengurus Ormas Islam berharap kedepannya komunikasi antara BAKESBANGPOL dengan Ormas khususnya Ormas Islam dapat lebih berkembang dan mendapat perhatian bukan hanya sekedar kegiatan keorganisasian yang diadakan oleh internal Ormas Islam sendiri.<sup>21</sup>

Namun bagaimana BAKESBANGPOL mengundang Ormas Islam dalam bentuk kepedulian. Selama ini kelemahan BAKESBAGPOL tidak bisa memberikan suatu ruang untuk Ormas Islam dalam memberi pernyataan apa keinginan kedepannya untuk masyarakat Kabupaten Jember. Yang dilakukan Ormas selama ini ialah kegiatan misi di Internal Ormas itu sendiri terkait dengan BAKESBANGPOL tidak ada. Oleh karena itu Ormas Islam di Kabupaten Jember bergerak masing-masing, yang mana seharusnya BAKESBANGPOL mewadahi masyarakat Jember dalam memenuhi kebutuhannya melalui pembinaan dan pemberdayaan Ormas.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022, khususnya di Ayat 2 bagian keempat pasal 7, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember bertanggung jawab dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi

---

<sup>21</sup> Ahmad Nur Mahfuda, *Sekretaris Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KB PII Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 20 Juli 2024, n.d.).

<sup>22</sup> Ahmad Nur Mahfuda, *Sekretaris Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KB PII Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 20 Juli 2024, n.d.).

kemasyarakatan. Tugas-tugas badan ini meliputi perancangan program kerja, penyusunan materi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas implementasinya. Selain itu, badan ini juga memiliki kewajiban melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.<sup>23</sup>

Berikut beberapa prinsip komunikasi dalam Islam yang berhubungan dengan strategi komunikasi organisasi. Prinsip dasar dalam komunikasi Islam adalah ikhlas, yang berarti melakukan pekerjaan dengan hati yang tulus. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa setiap kata yang diucapkan saat menyampaikan pesan dapat mengandung pahala atau dosa. Kejujuran, seperti halnya kebersihan, merupakan nilai yang sangat penting karena mengharuskan penyampaian informasi yang benar tanpa disertai kebohongan. Islam juga menekankan pentingnya kebersihan dalam segala aspek, termasuk dalam komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan secara jujur dan positif akan memberikan dampak psikologis yang baik. Penyampaian pesan yang penuh keyakinan dan berergi positif dapat memotivasi serta menumbuhkan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>24</sup>

Komunikasi Islam adalah bentuk komunikasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang memiliki inti berupa kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Konsep ini menekankan pentingnya

---

<sup>23</sup> “Peraturan Bupati Jember (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember)” (Jember, 2022), 7.

<sup>24</sup> Esli Zuraidah Siregar Sumper Mulia Harahap, Juni Wati Sri Rizki, *Strategi komunikasi Organisasi, Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, vol. Volume 2, 2022, 44

membangun hubungan yang harmonis, baik dengan diri sendiri, dengan Allah SWT sebagai sang pencipta, maupun dengan sesama manusia. Tujuan utama komunikasi ini adalah menciptakan kedamaian, membawa rasa aman, serta mempererat hubungan yang penuh keramahan, baik dari individu maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini diwujudkan melalui ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagai pedoman utama dalam menjalankan interaksi yang bermakna dan penuh hikmah.<sup>25</sup>

Instansi dan perusahaan memerlukan strategi untuk mendapatkan kualitas suatu organisasi tergantung pada informasi yang disampaikan, sehingga sangat penting untuk mengelola dan menyebarkan informasi yang benar kepada publik.<sup>26</sup>

Menetapkan strategi komunikasi yang tepat merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Menurut Middleton (1980), strategi komunikasi diartikan sebagai kombinasi optimal dari berbagai elemen dalam komunikasi, seperti komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, dan efektivitas atau pengaruh yang ditimbulkan. Strategi ini dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan komunikasi dengan hasil yang maksimal.<sup>27</sup>

Pelaksanaan strategi secara langsung melalui beberapa tahap merupakan langkah penting dalam upaya mencapai tujuan secara optimal.

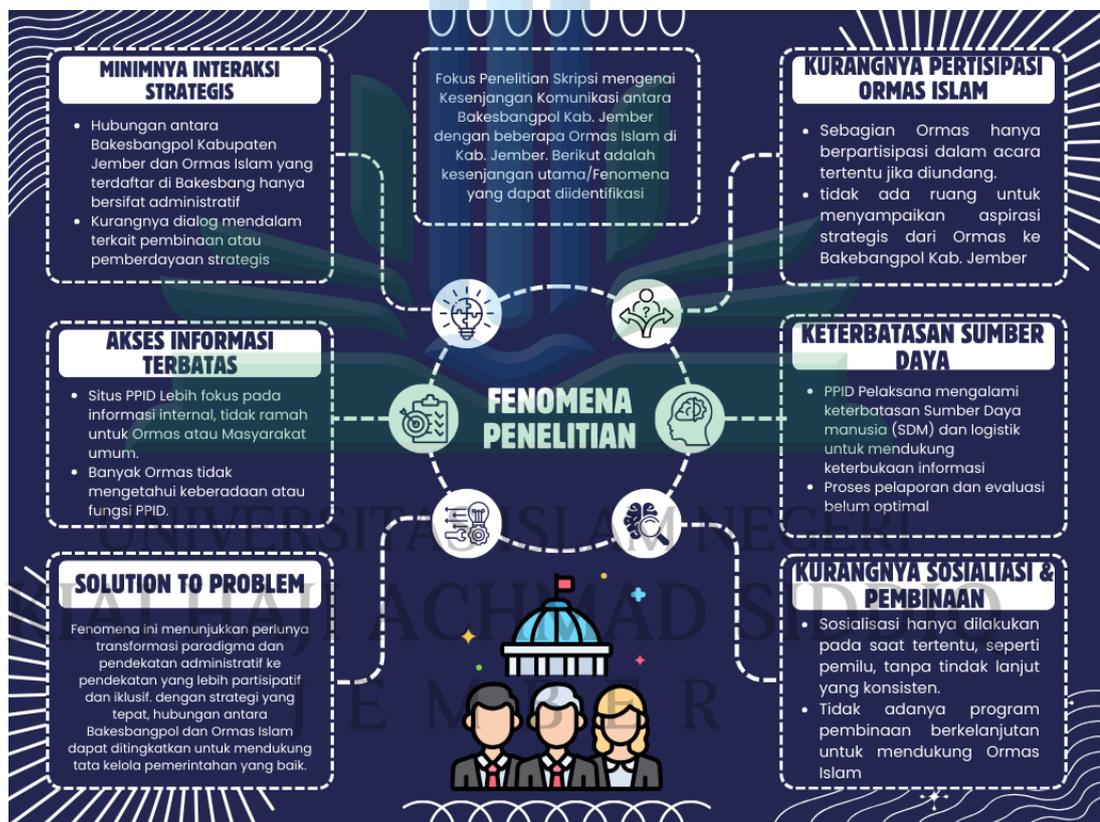
---

<sup>25</sup> Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 14.

<sup>26</sup> Ali Marzuki, "Strategi komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dprri, 1."

<sup>27</sup> Hafied Cangara, *Buku Perencanaan & Strategi komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 64

Fred R. David menguraikan tiga tahap utama dalam pengembangan strategi ini, yaitu Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi. Pemilihan Strategi yang tetap sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, strategi yang kurang tepat dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima dan mengakses informasi dengan mudah, penting untuk memahami cara penerapan strategi yang efektif.<sup>28</sup>



Gambar 1. 2

Kategori Fenomena/Gap Penelitian Mengenai Kesenjangan Komunikasi antara Bakesbangpol Kab. Jember dan Ormas Islam di Kab. Jember

<sup>28</sup> Fred R. David, *Strategic Management Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 6.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menemukan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan PPID pelaksana BAKESBANGPOL dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember perlu dikaji untuk membantu masyarakat memahami informasi publik tersebut dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>29</sup>

Ormas terbentuk berdasarkan kesamaan pandangan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai penghubung antara Ormas dan Pemerintah. Ormas berada di bawah pembinaan bidang ketahanan sosial dan ekonomi, khususnya sub-bidang organisasi sosial, yang bertanggung jawab dalam menangani proses persyaratan, perizinan, pendaftaran, hingga pembinaan. Dengan banyaknya Ormas yang ada di Kabupaten Jember, sub-bidang organisasi sosial perlu memiliki strategi komunikasi yang tepat dalam mengelola informasi guna mendukung pembinaan dan pemberdayaan Ormas di wilayah ini.<sup>30</sup> Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember”**.

---

<sup>29</sup> Ali Marzuki, “Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dpri, 7.”

<sup>30</sup> Husnul Khotimah, “Strategi Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan,” 2023, 2.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menghadapi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi menghadapi faktor pendukung dan penghambat PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di

Kabupaten Jember

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian bisa mencakup manfaat teoritis praktis, seperti manfaat bagi peneliti, lembaga dan masyarakat secara

keseluruhan. Manfaat penelitian harus bersifat realistis.<sup>31</sup> Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang komunikasi publik, khususnya dalam konteks antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat berbasis agama.
- b. Memberikan kontribusi terhadap studi komunikasi pemerintahan dengan memberikan wawasan mengenai bagaimana pemerintah, melalui PPID BAKESBANGPOL, dapat merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif terhadap Ormas Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi komunikasi pemerintah, khususnya dalam konteks interaksi dengan Ormas Islam, yang dapat menjadi bekal pengetahuan berharga untuk karir akademik di bidang komunikasi dan pemerintahan, lalu untuk memperluas relasi dalam pemerintahan.

##### b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi,

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 2023, 30.

manajemen informasi dan studi pemerintahan. Ini akan memperkaya kurikulum dengan studi kasus nyata dan relevan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu PPID BAKESBANGPOL dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, sehingga informasi publik yang disampaikan lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

## E. Definisi Istilah

### 1. Strategi Komunikasi

Didalam penelitian ini kata “strategi” memiliki pengertian yakni bagaimana cara strategi didalam instansi atau lembaga demi tercapainya suatu tujuan. Kata ‘Strategi’ berasal dari bahasa Yunani ‘stratagos’ yang mengacu pada kata ‘stratos’ yang berarti militer, dan ‘ago’ yang berarti pemimpin, sehingga dapat diartikan sebagai kepemimpinan militer atau peran jenderal dalam merancang dan menyusun rencana untuk memenangkan pertempuran. Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai metode atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks organisasi, strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dalam menjalankan misinya. Strategi menyediakan arahan yang terstruktur dan jelas, didasarkan pada pedoman

tertentu, serta mengalokasikan sumber daya organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan jenis perencanaan yang dirancang untuk menentukan berbagai langkah di masa depan. Strategi berperan dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai, dengan harapan agar tujuan tersebut lebih terarah dan tepat sasaran. Penggunaan strategi yang efektif diharapkan dapat menghasilkan pencapaian yang optimal dalam waktu yang relatif singkat dan memudahkan proses menuju tujuan yang diinginkan.

Istilah 'Komunikasi' atau dalam bahasa Inggris 'Communication' berasal dari kata Latin 'Communicatio' yang berakar dari 'Communis', yang berarti kesamaan makna. Dalam komunikasi, penting adanya pemahaman yang sama antara kedua pihak yang terlibat. Komunikasi tidak hanya bersifat informatif, yakni bertujuan untuk membuat pihak lain memahami atau mengetahui suatu informasi, tetapi juga bersifat persuasif, yang bertujuan agar pihak lain bersedia menerima pandangan atau keyakinan tertentu serta terdorong untuk melakukan suatu tindakan.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Shannon dan Weaver (1949), Komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi antar manusia di mana individu saling mempengaruhi, baik secara sengaja maupun tidak.

Komunikasi tidak terbatas pada penggunaan bahasa verbal, tetapi juga

---

<sup>32</sup> Hafied Cangara, *Buku Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 64

<sup>33</sup> Onong Uchajana Effendy, *Buku Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 9

meliputi ekspresi wajah, seni, lukisan, dan teknologi. Ketika berada di dalam situasi komunikasi, individu biasanya memiliki beberapa kesamaan dengan lawan bicara, seperti kesamaan pemahaman atau bahasa, serta penggunaan simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam proses komunikasi.<sup>34</sup>

Proses Komunikasi yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang dilakukan antar individu sebagai sarana untuk menyatakan serta memperkuat identitas atau eksistensi diri, sekaligus menjalin kontak sosial dengan pihak lain atau masyarakat luas. Komunikasi ini juga bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam hal pemikiran maupun perilaku, agar sesuai dengan harapan atau tujuan yang diinginkan.

Strategi komunikasi adalah rencana yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens tertentu dengan tujuan mencapai hasil atau respon yang diinginkan. Strategi ini mencakup pemilihan pesan, media, saluran, dan teknik komunikasi yang sesuai, serta mempertimbangkan karakteristik audiens dan konteks situasional untuk memastikan penyampaian pesan yang jelas, relevan, dan persuasif.

## 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, serta layanan informasi dan dokumentasi di bidang pemerintahan. Tugas

---

<sup>34</sup>, Kun Wazis *Komunikasi Massa Kajian Teoritis Dan Empiris*, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember Press (Anggota IKAPI), vol. 7, 2022, 2

PPID adalah memberikan akses kepada pemohon informasi atau data terhadap informasi publik yang tersedia untuk umum. Hal ini terkait dengan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang harus tersedia setiap saat.<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni pejabat yang bertanggung jawab penuh atas alur informasi yang telah dibangun oleh pemerintah melalui PPID pelaksana yaitu BAKESBANGPOL sebagai jembatan penyampaian informasi terhadap masyarakat.

### 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pelaksana urusan pemerintahan di dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Badan ini berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain itu, badan ini juga bertugas menyiapkan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perkembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Diah Lastri Febriani and Reni Juliani, "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2022, 22.

<sup>36</sup> Suci Hermiken, "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan," *Lppmstianusa.Com* 4, no. 1 (2022), 5.

Berbagai kelompok, mulai dari remaja hingga dewasa menggunakan layanan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal ini tentu mempengaruhi peran BAKESBANGPOL dalam menyesuaikan sarana yang tepat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya.<sup>37</sup>

Dari penjelasan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAKESBANGPOL sebagai sarana informasi masyarakat yang telah disediakan pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dengan masyarakat mengenai perumusan, dan melaksanakan standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa & Politik tentunya dengan menciptakan pelayanan publik yang baik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

#### 4. Pengelolaan Informasi

Proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien agar dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, dengan tetap mematuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi berupa pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Putri Anggria Ningsih Rangkuti and Rubino Rubino, "Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menjalani Kerukunan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Binjai," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023), 3.

<sup>38</sup> PPID Kominfo, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008" Diakses pada 28 Desember 2024, [https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1\\_9\\_2-Undang\\_Undang\\_Nomor\\_14\\_Tahun\\_2008.pdf](https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf).

## 5. Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam

Dalam konsep Islam, organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan risalah kepada umat atau masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam Al-Qur'an, terdapat dua kata yang berkaitan dengan konsep organisasi, yaitu (*Shaff*) dan (*Ummat*). Kata "*Shaff*" dalam konteks organisasi dapat diartikan sebagai barisan yang dipimpin oleh seorang imam dalam sholat.<sup>39</sup> Dengan demikian, kata "*Shaff*" dapat diartikan sebagai kumpulan atau jamaah yang dipimpin. Organisasi menurut penjelasan ini adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang atau jamaah yang memiliki sistem yang diatur secara tertib untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi, Organisasi Masyarakat Islam yang tentunya berperan sebagai control sosial dapat ikut serta dalam proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan menciptakan perumusan dan evaluasi terhadap pemerintah, khususnya terhadap lembaga PPID BAKESBANGPOL yang ada di Kabupaten Jember yang sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an,

Ormas sebagai acuan umat dalam konteks organisasi.

### F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

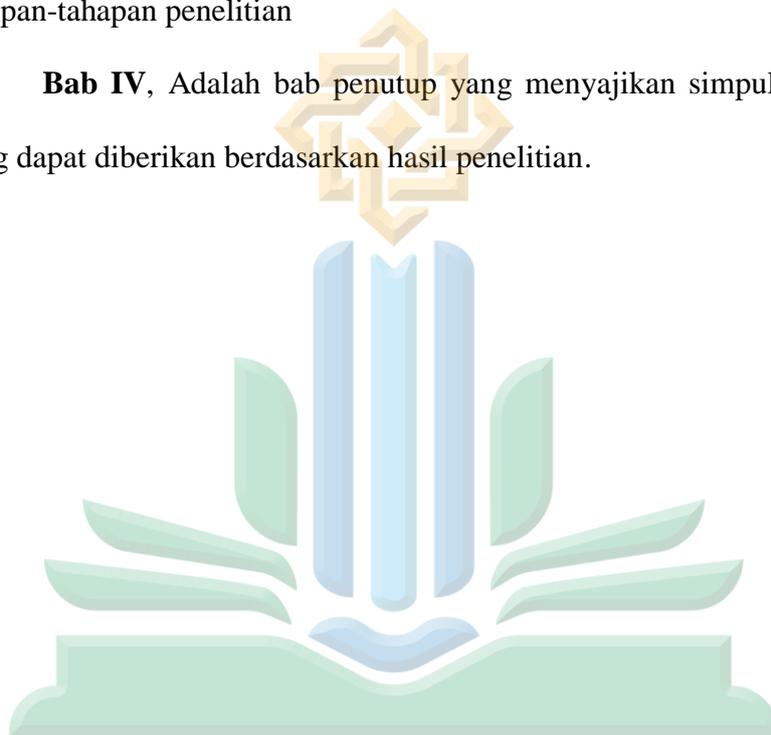
**Bab I**, Merupakan bab pendahuluan yang mencakup Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta sistematika pembahasan.

<sup>39</sup> Supriyanto Mawi Khusni Albar, Agus Sunaryo, *Visi Keislaman Dan Kebangsaan (Ormas Keagamaan Di Indonesia)*, ed. Kang Emha (Jawa Tengah, Rizquna, 2022), 30.

**Bab II**, Membahas Tinjauan Pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan dengan penelitian ini.

**Bab III**, Berisi tentang Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Validasi Data, serta tahapan-tahapan penelitian

**Bab IV**, Adalah bab penutup yang menyajikan simpulan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan uraian mengenai temuan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang mendukung kajian ini dijabarkan sebagai berikut:

*Tabel 2. 1*  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Husnul Khotimah (2023)	Strategi komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten)	Kualitatif Deskriptif	Strategi komunikasi merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembinaan, karena memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan melalui metode serta pendekatan yang tepat. Keberhasilan proses pembinaan sangat bergantung pada keahlian yang relevan dan sesuan dengan kebutuhan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banten adalah lembaga pemerintah daerah yang berperan mendukung kelancaran jalannya pemerintahan, termasuk dalam pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, dapat

				<p>disimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bakesbangpol Banten cenderung menggunakan strategi komunikasi yang bersifat edukatif dan informatif.</li> <li>2) Faktor pendukung utama adalah keberadaan narasumber yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi.</li> <li>3) Faktor penghambat yang dihadapi adalah konflik internal dalam organisasi masyarakat itu sendiri.</li> </ol>
2	Mohammad Ali Marzuki (2023)	Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.dprri	Kualitatif Dekripif	<p>PPID Sekretariat Jenderal DPR RI telah memperkenalkan tagline “Zero Permohonan Informasi Publik” melalui akun Instagram resminya. Tagline ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat dan tanpa biaya. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat tidak lagi perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan informasi, karena data yang mereka butuhkan telah tersedia secara transparan di saluran informasi resmi DPR RI. Penelitian ini mengacu pada teori strategi Fred R. David, yang membagi proses strategis ke dalam</p>

				<p>tiga tahapan utama: <b>Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.</b> Yang dimana dapat menunjukkan bahwa PPID Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan riset dan menyusun rencana konten untuk akun instagramnya dalam tahap perumusannya. Melalui pendekatan ini, PPID berupaya menciptakan keterbukaan informasi yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung tujuan peningkatan akses informasi secara luas.</p>
3	Dida Rizki Rhamadan, Gun Gun Gumilar (2022)	Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang	Kualitatif Deskriptif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Bakesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap Ormas di Kabupaten Karawang. Fokus kajian ini adalah untuk mengeksplorasi pendekatan komunikasi yang digunakan, dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antar Ormas, serta upaya dalam menciptakan harmoni sosial melalui pembinaan yang</p>

				berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan.
4	Diah Lestari Febriani (2022)	Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Barat	Kualitatif Deskriptif Model Komunikasi Lasswell	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya PPID menjalankan tugas, fungsi dan prosedur operasional sesuai standar yang ditetapkan oleh UU tersebut. Proses pelayanan informasi oleh PPID berjalan dengan lancar, efisien, dan memberikan akses mudah bagi masyarakat. Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang efektif, PPID juga membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG), yang terbukti meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik dan memperluas jangkauan penyebaran informasi secara terorganisir.

5	Putri Anggria Ningsih Rangkuti (2023)	Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjalin Kerukunan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Binjai	Kualitatif Pendekatan Fenomenologis	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memberikan rekomendasi terkait penerapan standar komunikasi Islam dalam membangun Solidaritas Publik dan tata kelola organisasi pemerintahan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam peraturan daerah kota Binjai. Bakesbangpol mengimplementasikan enam prinsip komunikasi Islam, yaitu <i>Qoulan Sadida</i> (Mengutamakan Kebenaran), <i>Qaulan Baligha</i> (Komunikasi yang jelas dan efektif), <i>Qaulan Karima</i> (menghargai dan menghormati), <i>Qaulan Maysura</i> (Komunikasi yang memudahkan), <i>Qaulan Layyina</i> (Lemah lembut), serta <i>Qaulan Ma'rufa</i> (ungkapan yang baik dan santun). Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan komunikasi yang dilakukan tidak merendahkan pihak lain, baik dalam pesan maupun interaksi yang dibangun.</p>
6	Aslam Hosen (2023)	Strategi Komunikasi Kelompok Minoritas Terhadap Kelompok	Kualitatif jenis Penelitian Deskriptif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Strategi komunikasi yang disusun oleh Komunitas minoritas Syi'ah Al-Hujjah di Kelurahan</p>

		<p>Mayoritas: Studi Kasus Pada Komunitas Syi'ah di Yayasan Al-Hujjah Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember</p>	<p>Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam upaya mempertahankan keberadaan mereka. Strategi tersebut melibatkan serangkaian kegiatan dan pola penyampaian pesan yang dirancang untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat, sehingga tercipta keharmonisan antar kelompok keyakinan.</p>
--	--	---	---

Terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Husnul Khotimah. 2023. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Judul Skripsi "*Strategi Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten)*."<sup>40</sup> Penelitian yang dilakukan Husnul Khotimah ini bersifat kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah menunjukkan bahwa strategi komunikasi adalah elemen penting dalam mencapai tujuan pembinaan. Untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat

<sup>40</sup> Khotimah, "Strategi Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan."

diterima dan diterapkan, diperlukan metode dan pendekatan tertentu. Kompetensi yang memadai juga berperan penting dalam keberhasilan proses pembinaan. Di Banten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai lembaga daerah yang mendukung kelancaran pemerintahan serta memainkan peran dalam membina organisasi masyarakat di wilayah tersebut. Dari temuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banten sering kali menggunakan Strategi komunikasi yang bersifat edukatif dan informatif, 2) Faktor pendukungnya adalah narasumber yang memiliki kredibilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang luas, 3) Faktor penghambatnya adalah konflik yang timbul didalam organisasi masyarakat.

Perbedaan penelitian Husnul Khotimah dengan penelitian penulis adalah wilayah dan objek dalam penelitian. Penelitian Husnul berada di Banten dengan objeknya Organisasi Masyarakat sosial, sedangkan penelitian penulis berada di PPID Pelaksana BAKESBANGPOL Kabupaten Jember dengan objek pada Organisasi Masyarakat Islam.

Persamaan penelitian dalam membahas strategi komunikasi selanjutnya menjadikan BAKESBANGPOL sebagai titik fokus penelitian pada kajian mengenai Organisasi Masyarakat sebagai topik utama pembahasan.

- 2) Mohammad Ali Marzuki. 2023. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Judul Skripsi “*Strategi*

*Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jendral DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.dprri*".<sup>41</sup> Penelitian ini yang telah dilakukan oleh Mohammad Ali Marzuki ini bersifat kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Marzuki dari PPID Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan inisiatif berupa tagline "*Zero Permohonan Informasi Publik*" yang diperkenalkan melalui akun Instagram resmi. Tagline ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi secara efisien dan ekonomis, sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mengajukan permintaan informasi karena data yang dibutuhkan telah disediakan melalui saluran informasi resmi DPR RI.

Penelitian ini menggunakan teori tahapan strategi menurut Fred R. David yang menguraikan tiga tahap dalam sebuah strategi antara lain sebagai berikut : Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan riset dan menyusun rencana konten untuk akun Instagram dalam tahap perumusannya. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, mereka memproduksi konten sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Terakhir, mereka

---

<sup>41</sup> Ali Marzuki, "Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dprri."

melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap keberhasilan strategi yang telah direncanakan.

Perbedaan pada lokasi dan objeknya, dimana penelitian Ali Marzuki berada di Jakarta dengan objek PPID Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan penulis meneliti di PPID BAKESBANGPOL Kabupaten Jember. Selain itu fokus penelitiannya dimana Ali Marzuki pada media Instagram dan penulis pada Organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Jember.

Persamaan pada membahas strategi komunikasi PPID dan menggunakan teori manajemen strategi oleh Fred R. David dalam tahapan strategi komunikasi.

- 3) Dida Rizki Ramadhan, Gun Gun Gumilar. 2022. Universitas Singaperbangsa Karawang. Judul Jurnal *“Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang”*<sup>42</sup> Penelitian yang dilakukan Dida dan Gun ini bersifat kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam kerangka kehidupan berbangsa. Konflik antar Ormas dapat dikategorikan sebagai konflik sosial yang mencakup perselisihan antara Ormas, antar Individu, serta antar kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

---

<sup>42</sup> Dida Rizki Ramadhan and Gun Gun Gumilar, “Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Karawang” 6, no. 2 (2022): 361.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis strategi yang dijalankan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Karawang. Kajian ini berlandaskan pada kerangka teoritis pemberdayaan dari Edi Suharto (2017), yang mencakup aspek pemukiman, penguatan, perlindungan, dukungan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Karawang melakukan langkah preventif terhadap potensi konflik antar-Ormas dengan menyediakan program pembinaan dan pemberdayaan, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan Ormas secara berkelanjutan.

Langkah ini diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, yang secara khusus menekankan pemahaman wawasan kebangsaan bagi setiap organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Karawang.

Perbedaan antara penelitian Dida dan Gun Gumilar dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi studi. Dida dan Gun Gumilar meneliti Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) di Karawang dalam upaya pencegahan konflik antar Organisasi Masyarakat (Ormas) melalui program pembinaan. Sementara itu, penelitian ini menganalisis Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAKESBANGPOL dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.

Persamaan pada pembahasan Strategi di BAKESBANGPOL dengan fokus pada Organisasi Masyarakat.

- 4) Diah Lastri Febriani, Reni Juliani. 2022. Universitas Teuku Umar Aceh Barat. Judul Jurnal “*Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Barat*”. Penelitian yang dilakukan Dian dan Reni ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan model komunikasi Lasswell.

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian di Kabupaten Aceh Barat, sebagai PPID Utama, telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. PPID tersebut telah melaksanakan tugas, fungsi, dan prosedurnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP).<sup>43</sup>

Selain itu, pelaksanaan operasional dan mekanisme pelayanan informasi yang dikelola PPID telah berlangsung dengan baik, memadai, dan memuaskan masyarakat dalam mengakses informasi. PPID juga telah menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat salah satunya melalui pembentukan Kelompok Informasi Gampong (KIG). Inisiatif ini terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.

Perbedaan penelitian pada fokus penelitiannya dan lokasi penelitian, penelitian Diah dan Reni membahas mengenai strategi

---

<sup>43</sup> Febriani and Juliani, “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat.”

komunikasi. Penelitian tersebut memfokuskan pada upaya sosialisasi informasi publik oleh PPID di Kabupaten Aceh, sementara dalam studi ini penulis meneliti Strategi komunikasi yang digunakan oleh PPID BAKESBANGPOL dalam mengelola dan menyebarkan informasi kepada Ormas Islam di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendekatan komunikasi yang diterapkan BAKESBANGPOL, Khususnya dalam konteks pemberdayaan Organisasi Masyarakat Islam, serta bagaimana strategi tersebut memfasilitasi akses informasi yang efektif dan relevan bagi masyarakat setempat.

- 5) Putri Anggria Ningsih Rangkuti, Rubino. 2023. UIN Sumatera Utara Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Judul Jurnal *“Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjalin Kerukunan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Binjai”*. Penelitian yang dilakukan Putri dan Rubino ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan standar komunikasi Islam dalam ranah Solidaritas Publik dan Organisasi Pemerintahan sebagai bagian dari regulasi daerah di Kota Binjai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengimplementasikan enam prinsip utama komunikasi Islami. Prinsip-prinsip ini mencakup Qaulan Sadida, yang mengedepankan Kejujuran. Qaulan Baligha, yang mengutamakan keberkesanan pesan. Qaulan Karima, Qaulan Maysura, Qaulan layyina, serta Qaulan Ma'rufa, yang

masing-masing mengacu pada penggunaan bahasa yang bijaksana dan tidak merendahkan dalam setiap interaksi komunikasi, sehingga menghormati integritas komunikasi maupun individu yang terlibat.<sup>44</sup>

Perbedaanya pada penelitian Putri dan Rubino membahas mengenai penerapan prinsip komunikasi Islam pada BAKESBANGPOL Binjai, sedangkan penulis membahas strategi komunikasi di BAKESBANGPOL Kabupaten Jember. Persamaan pada meneliti BAKESBANGPOL dengan fokus pada Organisasi Masyarakat.

- 6) Aslam Hosen. 2023. UIN K.H Achmad Siddiq Kabupaten Jember. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Judul Skripsi *“Strategi Komunikasi Kelompok Minoritas Terhadap Kelompok Mayoritas: Studi Kasus Pada Komunitas Syiah di Yayasan Al-Hujjah Kelurahan Kranjingan kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember”* Penelitian yang dilakukan oleh Aslam Hosen ini bersifat Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang diterapkan oleh Yayasan Al-Hujjah (Syiah) melalui berbagai media yang digunakan dalam komunitas Syiah di yayasan tersebut. Selain itu, terdapat fenomena menarik di Yayasan Al-Hujjah, dimana komunitas Syiah mampu hidup berdampingan dengan damai di tengah lingkungan mayoritas yang berbeda pandangan. Meski ada konflik berkepanjangan antara kelompok Syiah dan mayoritas, Yayasan Al-Hujjah mampu

<sup>44</sup> Putri Anggria Ningsih Rangkuti and Rubino Rubino, “Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menjalani Kerukunan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Binjai,”

mempertahankan hubungan harmonis dan menunjukkan kemampuan untuk hidup berdampingan tanpa memicu konflik dengan komunitas yang lebih dominan.<sup>45</sup>

Perbedaannya apa yang dilakukan Aslam Hosen pada penelitiannya yang membahas mengenai Perbedaan dari kaum minoritas dan mayoritas dalam hal kegiatan agama yang berlokasi di yayasan Al-Hujjah. Tentu pada umumnya dapat terjadi konflik yang berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat karena adanya perbedaan pemahaman yang terjadi di masyarakat. Tentunya berbeda dari penulis yang dimana meneliti mengenai Strategi komunikasi pengelolaan informasi organisasi masyarakat Islam yang tercatat di Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Persamaan dari penelitian tersebut yakni dalam hal Ke-Ormasan Islam yang ada di Kabupaten Jember yang dimana penulis mencantumkan Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang dinaungi oleh Yayasan Al-Hujjah di Jember, Organisasi Masyarakat Islam yang tercatat di Bakesbangpol Kabupaten Jember.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Strategi**

Kata 'Strategi' berasal dari bahasa Yunani Klasik, yang terdiri dari kata 'Stratos', bermakna tentara, dan 'Agein', yang berarti memimpin. Dalam konteks awalnya, istilah ini mengacu pada kemampuan memimpin pasukan. Selanjutnya, istilah tersebut berkembang menjadi 'Strategos'

---

<sup>45</sup> Aslam Hosen, "Strategi Komunikasi Kelompok Minoritas Terhadap Kelompok Mayoritas: Studi Kasus Pada Komunitas Syi'ah di Yayasan Al-Hujjah Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" 2023, 31-32

yang merujuk pada pemimpin militer tingkat tinggi. Oleh karena itu, secara mendasar, strategi memiliki akar sebagai konsep dalam militer yang mengacu pada seni perang yang dilakukan oleh para jenderal atau sebagai perencanaan efektif untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran.<sup>46</sup>

Dalam buku karya Hafied Cangara, disebutkan bahwa Karl von Clausewitz, seorang pensiunan jenderal asal Prusia (1780-1831), dalam bukunya *On War*, mendefinisikan strategi sebagai seni memanfaatkan berbagai instrument militer untuk mencapai sasaran dalam perang. Martin Anderson (1968) juga menyatakan bahwa strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan intelektual untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan secara paling efektif.<sup>47</sup>

## 2. Komunikasi

### a. Definisi Komunikasi

Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat saling berbagi informasi untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang mereka anggap penting. Proses ini melibatkan keterkaitan serta interaksi antar peserta, yang menjadi inti dari konsep komunikasi itu sendiri.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, komunikasi memiliki efek positif yang meliputi hiburan, pemberian informasi dan pembelajaran yang mempengaruhi pengetahuan, kesadaran dan perilaku seseorang atau masyarakat.

<sup>46</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 64

<sup>47</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 64.

<sup>48</sup> Sutaryo, "Ruang Lingkup Komunikasi," no. 1957 (2021), 38.

Selain itu, ada proses komunikasi yang penting yaitu penggunaan bersama pesan oleh pembicara dan pendengar yang memastikan keberhasilan komunikasi karena adanya pemahaman yang sama terhadap makna simbol-simbol komunikasi.<sup>49</sup>

Secara umum, Anwar Arifin (1994) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dan perilaku yang berisi informasi dalam konteks sosial dengan berbagai aspeknya. Selain itu, komunikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi antar manusia yang melibatkan penyampaian informasi, baik berupa pesan maupun tindakan, yang mencakup seluruh aspek sosial yang terkait.<sup>50</sup>

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Komunikasi menjadi fondasi utama dalam segala bentuk interaksi dan hubungan sosial, terutama dalam konteks tatap muka.

Proses komunikasi tidak hanya melibatkan penggunaan bahasa verbal, tetapi juga mencakup ekspresi nonverbal seperti gerak tubuh yang memerlukan pemahaman terhadap apa yang diungkapkan dan dilakukan oleh pihak lain (Liliweri, 2003; Karlfried Knapp, 1998).<sup>51</sup>

Beberapa ahli memberikan pandangan terkait konsep komunikasi : Carl I. Hovland misalnya, mendefinisikan Ilmu

---

<sup>49</sup> Riinawati, *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019), 14.

<sup>50</sup> Anwar Arifin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 35.

<sup>51</sup> Alo Liliweri, *Strategi Komunikasi Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS Group, 2011), 112

komunikasi sebagai sistem yang secara ketat merumuskan penyampaian informasi dan pembentukan opini serta sikap. Menurut Hovland, tujuan utama dalam studi ilmu komunikasi malampaui sekadar penyebaran informasi, melainkan juga melibatkan opini publik dan sikap yang berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan politik. Hovland menekankan bahwa komunikasi adalah proses yang bertujuan mengubah perilaku individu lain (*Communication is the process of changing the behavior of other individuals*).

Sementara itu, Harold Lasswell dalam karyanya "*The Structure and Function of Communication in Society*" menyatakan bahwa komunikasi dapat dijelaskan secara efektif melalui pertanyaan berikut: *Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect?*<sup>52</sup>

Everett M. Roger (1985), seorang sosiolog pedesaan Amerika yang kemudian mendalami penelitian di bidang komunikasi, terutama difusi informasi, mengemukakan definisi tentang komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari pihak pengirim kepada satu atau lebih penerima, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima.<sup>53</sup>

Menurut Bernard Barelson dan Gary A. Steiner, komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan berbagai elemen lainnya melalui berbagai simbol,

---

<sup>52</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 10

<sup>53</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 35.

seperti kata-kata, gambar, bentuk dan grafik. Penyampaian melalui simbol ini menciptakan proses komunikasi yang bertujuan untuk menghubungkan pemahaman antar individu dalam menyampaikan makna.<sup>54</sup>

b. Unsur-unsur Komunikasi

Pada proses komunikasi, terdapat sejumlah elemen penting yang umumnya diperlukan, antara lain:

1) Komunikator

Komunikator merupakan sumber informasi yang dapat berupa satu orang, dua orang atau bahkan lebih dari tiga orang termasuk institusi terkait. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian utama bagi seorang komunikator mencakup beberapa aspek berikut:

a) Latar Belakang Sosial-Budaya, Sosial-Politik, dan Sosial-Ekonomi.

Seorang Komunikator harus memahami konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari audiensnya untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan relevan.

b) Kemampuan untuk Mempengaruhi,

Terdapat tiga elemen penting yang harus dimiliki, yaitu:

(1) *Good Sense* (Pemahaman yang Baik);

<sup>54</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 68

(2) *Good Moral Character* (Karakter Moral yang Baik) dan;

(3) *Good Will* (Niat yang tulus)

Ketiganya membantu komunikator dalam membangun kepercayaan dan otoritas di hadapan audiens.

c) Etos (*Ethos*)

Etos mencakup kecerdasan, karakter, dan niat yang ditampilkan oleh komunikator. Reputasi yang baik, kejujuran, serta pengalaman menjadi faktor yang memberikan kesan positif bahwa komunikator adalah sosok yang kompeten, terlatih, dan terpercaya.

d) Pathos

Pathos mengacu pada kemampuan komunikator untuk mengelola dan mempengaruhi emosi audiens, seperti rasa marah, cinta, benci, takut, percaya diri, rasa malu, atau kekaguman. Komunikator harus mampu menampilkan daya tarik emosional yang membangkitkan respons perasaan dari audiens.

e) Logos

Logos berkaitan dengan kemampuan intelektual komunikator dalam menyampaikan pesan secara logis dan argumentative. Hal ini mencakup kemampuan untuk menciptakan ide (*invention*), menyusun pesan (*arragemen*),

memilih gaya bahasa (*style*), mengingat informasi (*memory*), dan menyampaikan pesan secara efektif (*delivery*).

Dengan menguasai kelima aspek ini, seorang komunikator dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan audiens dan memastikan pesan tersampaikan dengan optimal.<sup>55</sup>

## 2) Pesan

Pesan sebagai entitas abstrak, memerlukan representasi konkret untuk dikomunikasikan secara efektif. Manusia, dalam upaya menjembatani kesenjangan antara abstraksi pesan dengan persepsi penerima, menciptakan berbagai simbol komunikasi. Berbagai simbol ini berfungsi sebagai media untuk menerjemahkan pesan abstrak ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Simbol pesan komunikasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal meliputi penggunaan bahasa lisan dan tulisan, sementara komunikasi nonverbal mencakup penggunaan Gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara, dan isyarat lainnya. Penggunaan kedua jenis komunikasi ini baik verbal maupun nonverbal secara sinergis memungkinkan pesan abstrak untuk dikomunikasikan dengan lebih efektif dan efisien.

## 3) Media

Media berperan sebagai fasilitator dalam proses komunikasi, memfasilitasi transfer pesan dari sumber pesan

<sup>55</sup> Alo Liliweri, *Strategi Komunikasi Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS Group, 2011), 61.

(Komunikator) kepada penerima pesan (Komunikan). Media berfungsi sebagai jembatan, menghubungkan komunikator dengan komunikan dan memungkinkan pesan disampaikan secara efektif. Penggunaan media dalam komunikasi memungkinkan pesan untuk mencapai penerima pesan dengan lebih efisien, baik dalam hal jangkauan maupun waktu, serta membuka peluang untuk berinteraksi dan bertukar pesan secara lebih luas.

#### 4) Komunikan

Orang yang menjadi target dari pesan yang disampaikan merupakan komunikan, ciri yang hampir sama dengan pelaku komunikasi, pada kesempatan ini komunikan sangat fokus pada kegiatan melihat dan mendengarkan.<sup>56</sup>

#### 5) Pengaruh

Pengaruh dapat terjadi apabila adanya perubahan atau peningkatan pengetahuan sesudah dan sebelum pesan diterima dan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

#### 6) Umpan Balik

Kegiatan ini merujuk pada tanggapan yang bisa diberikan kepada pesan yang dapat diterima, kemudian pesan tersebut dikirim Kembali kepada pengirim pesan.

---

<sup>56</sup> Nurudin, *Ilmu Komunikasi Ilmiah Dan Populer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 41

### c. Media Komunikasi

Media dapat merujuk pada prasarana atau alat yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepada komunikator lalu ke audiens. Jumlah ahli psikologi melihat bahwa dalam komunikasi antar manusia, media komunikasi yang paling sering digunakan. Seperti pancaindra manusia, pada penglihatan dan pendengaran. Media yang dimaksud meliputi empat jenis, sebagai mana berikut::

#### 1) Media Antar Pribadi

Dalam konteks hubungan antar pribadi media yang sesuai adalah seperti kurir, surat, dan telepon. Dari zaman dahulu, sejumlah kurir dimanfaatkan untuk penyampaian pesan. Bahkan di banyaknya daerah pedalaman, penggunaan kurir untuk saluran komunikasi masih dapat ditemui.

#### 2) Media Kelompok

dalam keadaan komunikasi dapat melibatkan lebih dari 15 orang, media yang banyak digunakan adalah media kelompok, seperti contoh seminar, rapat, dan konferensi. Rapat pada umumnya dilaksanakan guna membahas masalah-masalah penting dihadapkan oleh suatu organisasi.<sup>57</sup>

#### 3) Media Publik

Jika jumlah audiens mencapai 200 orang, maka media komunikasi digunakan sering dikatakan sebagai media publik.

---

<sup>57</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 123

Seperti Rapat Besar, pertemuan besar dan sejenisnya. Dalam rapat besar, audiens berasal dari berbagai latar belakang tetapi masih memiliki kesamaan tertentu.

#### 4) Media Massa

Dalam situasi dimana audiens tersebar luas dan lokasinya tidak dapat ditentukan secara spesifik, media massa menjadi pilihan yang efektif. Media massa, sebagai platform komunikasi yang dirancang untuk menjangkau audiens yang luas, memanfaatkan teknologi mekanis seperti surat kabar, radio, film dan televisi untuk mentransmisikan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Kemampuan media massa untuk menjangkau audiens yang tersebar luas dan heterogeny menjadikannya alat yang ideal untuk menyampaikan pesan secara masif dan efektif.

### 3. Strategi Komunikasi

#### a. Pengertian Strategi Komunikasi

Effendy Uchjana mendefinisikan strategi komunikasi sebagai sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi yang efektif itu harus memiliki fleksibilitas operasional. Hal ini berarti strategi tersebut harus dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis dan berubah-ubah. Fleksibilitas operasional memungkinkan strategi komunikasi untuk tetap

relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang mungkin muncul dalam proses komunikasi.<sup>58</sup>

Dalam buku “Strategi Komunikasi”, Karya Hafied Cangara, dijelaskan bahwa Middleton (1980), seorang pakar dalam perencanaan komunikasi, menjelaskan bahwa strategi komunikasi sebagai upaya untuk menyatukan dan mengoptimalkan sejumlah elemen komunikasi. elemen-elemen tersebut meliputi Komunikator, Saluran atau media yang digunakan, penerima pesan, dan efek yang diinginkan dari pesan yang disampaikan. Dengan menggabungkan dan mengoptimalkan beberapa elemen ini, strategi komunikasi dapat dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi secara maksimal.<sup>59</sup>

Penerapan strategi komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam membangun dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat. Strategi komunikasi yang tepat dapat memfasilitasi terciptanya kerukunan yang berkelanjutan dimana proses komunikasi menjadi alat utama dalam membangun keselarasan dan saling pengertian antar individu dalam komunitas. Sebagai contoh pesan dakwah, dapat diterima oleh komunikator. Hal ini memungkinkan pesan-pesan penting untuk disampaikan secara efektif dan diterima dengan baik, sehingga memperkuat pondasi kerukunan sosial. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga

---

<sup>58</sup> Onong Effendy Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 32

<sup>59</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 64

sebagai alat untuk mempererat hubungan antar individu, membangun rasa saling pengertian dan menjembatani perbedaan di masyarakat.<sup>60</sup>

Pelaksanaan strategi komunikasi dilakukan oleh individual tau kelompok yang berperan sebagai komunikator. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola dan menyampaikan pesan kepada audiens target. Dalam menjalankan peran ini, komunikator harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti karakteristik audiens, konteks situasional serta tujuan komunikasi itu sendiri. Mereka menggunakan berbagai pendekatan dan Teknik yang dirancang untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan efektif oleh penerima. Proses ini sering melibatkan adaptasi pesan agar sesuai dengan jelas dan efektif oleh penerima. Proses ini sering melibatkan adaptasi pesan agar sesuai kondisi dan kebutuhan audiens, serta emnggunakan berbagai saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai dampak maksimal. Oleh karena itu, peran komunikator dalam strategi komunikasi sangat penting karena merekalah yang menerjemahkan visi dan misi menjadi pesan yang konkret dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.<sup>61</sup>

#### b. Tahapan Strategi Komunikasi

Menurut Hafied Cangara, terdapat lima langkah dalam tahapan strategi komunikasi, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>60</sup> Nasir M. Ali Kun Wazis, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember," n.d, 194.

<sup>61</sup> Kun Wazis, "Strategi Komunikasi Dalam Persaingan Media Massa Lokal: Studi Kasus Anjloknya Konsumen Koran Jawa Pos Radar Jember," *Tren Pola Konsumsi Media Di Indonesia Tahun 2017*, 2017, 40.

pengukuran atau evaluasi, dan pelaporan. Berikut adalah penjelasan mendetail dari masing-masing tahapan tersebut

- 1) Penelitian merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi. Permasalahan tersebut dapat berupa faktor-faktor seperti penyebaran wabah penyakit di masyarakat, kerugian yang dialami oleh perusahaan, atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Melalui penelitian ini, informasi yang akurat akan diperoleh untuk memahami situasi yang ada.
- 2) Setelah hasil penelitian diperoleh, langkah selanjutnya ialah perencanaan. Tahap ini mencakup penentuan strategi yang tepat dalam konteks komunikasi. dalam perencanaan, sangat penting untuk memilih sumber informasi atau komunikator yang efektif, media yang sesuai, target audiens yang tepat, serta merumuskan pesan yang jelas. Selain itu, perencanaan juga harus mencakup penetapan efek atau dampak yang diharapkan dari komunikasi yang akan dilakukan.
- 3) Pelaksanaan merupakan tahap dimana rencana komunikasi yang telah disusun diimplementasikan. Pelaksanaan dapat berupa berbagai bentuk kegiatan komunikasi, seperti tayangan di televisi, wawancara di radio, pemasangan iklan di media cetak, distribusi materi promosi seperti stiker kepada audiens yang ditargetkan, pemasangan spanduk

di lokasi strategis, atau melalui pengiriman tim penyuluhan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

- 4) Pengukuran adalah tahap evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan komunikasi. pada tahap ini, perlu dilakukan penilaian terhadap apakah implementasi yang dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, perlu dianalisis apakah media yang digunakan mampu menjangkau audiens yang dimaksud, serta apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Selain itu, penting untuk mengetahui tindakan apa yang diambil oleh audiens setelah mereka menerima informasi tersebut.
- 5) Pelaporan merupakan langkah terakhir dalam proses perencanaan komunikasi. pada tahap ini, laporan yang disusun sebaiknya dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan proyek sebagai bahan pertimbangan. Jika hasil dari evaluasi menunjukkan kinerja yang positif, laporan ini bisa digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program-program mendatang. Namun, jika laporan mengindikasikan adanya kekurangan, maka hal ini bisa menjadi acuan untuk melakukan revisi atau modifikasi terhadap program yang akan dilaksanakan berikutnya.<sup>62</sup>

Untuk mencapai tujuan, strategi yang direncanakan dan diterapkan melibatkan beberapa langkah. Fred R. David

---

<sup>62</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 76

mengembangkan tahapan strategis yang terdiri dari tiga langkah, yang dihubungkan dengan tahapan strategi komunikasi publik. Teori sangat relevan dalam penelitian ini karena berfokus pada institusi kelembagaan dan cocok digunakan dalam strategi kelembagaan. Komunikasi mengambil elemen-elemen dari teori ini dan mencangkup langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini:

#### 1) Merumuskan Strategi

Proses perumusan strategi melibatkan tahapan penting. Pertama, artikulasi visi dan misi yang jelas memberikan arahan dan tujuan organisasi. Kedua, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diantisipasi. Ketiga, audit internal dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan yang dapat diandalkan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan analisis internal dan eksternal tersebut, tujuan jangka Panjang ditetapkan, merepresetasikan target yang ingin dicapai organisasi di masa mendatang. Tahap selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai alternatif strategi yang layak dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap masing-masing alternatif. Akhirnya, strategi spesifik dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan visi, misi, kondisi internal, dan lingkungan eksternal, serta kemampuannya dalam mencapai tujuan jangka Panjang yang ditetapkan.

## 2) Melaksanakan Strategi

Pasca penetapan dan pemilihan strategi, tahap implementasi menjadi krusial, implementasi strategi memerlukan penerjemahan strategi yang abstrak menjadi tindakan kongkret. Proses ini mencakup beberapa aktivitas esensial. Pertama, tujuan jangka Panjang dijabarkan menjadi tujuan tahunan yang lebih spesifik dan terukur, disertai dengan perumusan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kedua, upaya memotivasi karyawan dilakukan agar mereka terlibat dan berkomitmen dalam melaksanakan strategi. Ketiga, pengalokasian sumber daya yang efisien dan efektif, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, menjadi kunci keberhasilan implementasi. Selanjutnya pengembangan budaya organisasi yang koheren dengan strategi yang dipilih harus dibina untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. Struktur organisasi yang efektif juga perlu dirancang untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar unit. Di samping itu penyusunan anggaran yang detail dan realistis diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang handal juga penting untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja. Terakhir, sistem kompensasi karyawan dikaitkan dengan kinerja organisasi untuk mendorong produktivitas dan pencapaian tujuan strategis.

### 3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap final, namun esensial, dalam proses manajemen strategis. Tahapan ini berperan penting dalam menentukan efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Manajemen perlu memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi secara dini indikasi kegagalan strategi. Evaluasi strategi menyediakan informasi kritis yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan strategi. Dinamika lingkungan eksternal, seperti perubahan kondisi pasar, persaingan, dan regulasi, maupun perubahan internal, seperti ketersediaan sumber daya dan kapabilitas organisasi, menuntut fleksibilitas strategi. Oleh karena itu, strategi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan adaptif, yang dapat dimodifikasi atau bahkan diganti berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi internal maupun eksternal organisasi.<sup>63</sup>

#### c. Langkah-langkah Strategi Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang rumit dan berlapis. Dalam merancang strategi komunikasi, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Strategi akan lebih efektif apabila memperhatikan elemen-elemen komunikasi serta faktor-faktor yang

---

<sup>63</sup> Fred R. David, *Strategic Management Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 7.

mempengaruhi setiap elemen tersebut. Proses ini dapat dimulai dengan fokus pada komunikan sebagai sasaran komunikasi, media yang digunakan, pesan yang disampaikan, dan komunikator yang terlibat. Berikut uraian lebih lanjut terkait aspek-aspek tersebut:

#### 1) Mengenali Tujuan Komunikasi

Sebelum melakukan komunikasi, penting untuk dahulu memahami siapa yang akan menjadi sasaran utama dari komunikasi tersebut. Pemahaman ini harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi, apakah sekedar untuk menyampaikan informasi kepada penerima atau untuk memotivasi mereka agar mengambil tindakan tertentu. Baik tujuan komunikasi, metode yang akan digunakan, maupun jumlah penerima pesan harus diperhatikan dengan cermat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

##### a) Kerangka Refrensi

Pesan yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan kerangka acuan dari penerima, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kerangka acuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, gaya hidup, status sosial, norma yang berlaku, tingkat pendidikan, serta aspirasi individu yang bersangkutan.

Setiap individu memiliki kerangka referensi yang berbeda dan unik tentunya, yang dapat sangat berbeda dari satu sama lain. Perbedaan ini dapat sangat ekstrem, contohnya seperti antara

seseorang anak duduk di bangku SD dan seseorang mahasiswa di suatu universitas, atau antara seseorang petani yang selalu di sawah/kebun dan seorang diplomat. Namun, ada juga perbedaan yang lebih halus, misalnya antara dua perwira yang keduanya dari lulusan militer.

b) Faktor Lingkungan dan Kondisi

Situasi yang dimaksud adalah keadaan dimana penerima pesan berada dalam posisi siap untuk menerima informasi yang akan disampaikan. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan situasi ini dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin muncul secara tiba-tiba selama proses komunikasi berlangsung.

Contohnya, mengadakan pertemuan dengan karyawan pada hari pembayaran gaji, atau memberikan pidato dalam acara seni

Ketika para hadirin sedang menunggu dimulainya pertunjukan.

Situasi yang bersifat prediktif ini dapat dikelola dengan mengatur waktu penyelenggaraan, baik dengan penundaan maupun

penyesuaian jadwal pelaksanaan.

Kondisi lain, merujuk pada keadaan fisik dan mental penerima saat menerima pesan komunikasi. komunikasi tidak berjalan efektif jika penerima pesan sedang dalam kondisi emosi, sedih, bingung, sakit, atau lapar. Terkadang kita dapat menunda komunikasi sampai situasinya lebih baik. Namun kita harus

berkomunikasi dalam keadaan tersebut. Pada titik ini, aspek kemanusiaan itu sangat penting.

## 2) Pemilihan Media Komunikasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai jenis media komunikasi, baik yang bersifat tradisional maupun yang modern dan kini banyak dimanfaatkan. Media-media ini meliputi kentongan, bedug, pertunjukkan seni, surat, papan pengumuman, Handphone, pamflet, poster, spanduk, surat kabar, majalah, film, radio, dan televisi. Secara garis besar, media komunikasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yakni media cetak atau tulisan, media visual, serta media audio-visual

## 3) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Setiap pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu yang menjadi acuan dalam menentukan strategi yang sesuai, baik itu strategi informatif, persuasive, atau instruksional. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan, tanpa memandang strategi yang dipilih, adalah memahami esensi pesan komunikasi itu sendiri.

## 4) Peran Komunikator Dalam Komunikasi

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator saat berkomunikasi adalah daya tarik sumber (source attractiveness) dan kredibilitas sumber (source credibility). Kedua aspek ini berperan penting dalam membangun hubungan yang

efektif antara komunikator dan penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan memberikan dampak yang diharapkan.

a) Daya tarik sumber

Keberhasilan seorang komunikator dalam mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku penerima pesan seringkali tercapai melalui mekanisme daya tarik, hal ini terjadi terutama Ketika penerima pesan merasa adanya keterikatan atau keterhubungan dengan komunikator.

b) Kredibilitas Sumber

Keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang dimiliki penerima pesan terhadap komunikator. Tingkat kepercayaan ini umumnya berkaitan erat dengan profesi atau keahlian yang dimiliki oleh komunikator, yang dapat memperkuat kredibilitasnya dalam menyampaikan pesan.<sup>64</sup>

d. Fungsi Strategi Komunikasi

Keberhasilan suatu kegiatan komunikasi sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang diterapkan. Hal ini terutama berlaku dalam konteks komunikasi massa, di mana tanpa adanya strategi yang tepat, dapat timbul dampak negative. Fenomena ini semakin relevan di negara berkembang, yang mengalami lonjakan penggunaan media massa

<sup>64</sup> Uchajana Effendy, *Buku Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 36

modern, berkat kemudahan akses dan pengoperasian yang ada. Oleh karena itu, strategi komunikasi, baik dalam skala besar (strategi multimedia terencana) maupun dalam skala kecil (strategi medium komunikasi tunggal), memiliki peran ganda yang krusial:

- 1) Mengkomunikasikan pesan yang bersifat informatif, persuasive, dan intruktif kepada audiens sasaran secara sistematis bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Proses penyampaian ini harus terencana dengan baik agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif sesuai dengan karakteristik audiens.
- 2) Mengatasi perbedaan budaya yang timbul akibat kemudahan akses dan pengaruh besar media massa menjadi penting, karena tanpa penanganan yang tepat, perbedaan tersebut berpotensi mengganggu nilai-nilai budaya. Pemanfaatan media yang tidak terkontrol dapat mempercepat terjadinya perubahan budaya yang menggeser nilai tradisional, sehingga strategi yang terukur diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya

lokal.<sup>65</sup>

#### **4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah individu yang bertanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasikan, serta menyediakan informasi atau layanan informasi kepada publik di suatu lembaga. Fungsi utama PPID mencakup

---

<sup>65</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 28

pengelolaan data dan informasi secara sistematis agar dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan, serta memastikan transparansi informasi publik berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, menyediakan, mendistribusikan, dan melayani informasi serta dokumen di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.<sup>66</sup>

##### **5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) berperan sebagai komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan ini beroperasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab langsung kepada Gubernur, dengan laporan yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab utama dalam merancang serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam rangka

---

<sup>66</sup> Hilman Hilman, "Peran Komunikasi Ppid Propinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik," *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* (2020), 122.

menjalankan tanggung jawab ini, BAKESBANGPOL melaksanakan sejumlah fungsi, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan teknis terkait Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan serta layanan umum di sektor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan menjalankan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, memperkuat ketahanan bangsa, serta mendukung politik dalam negeri di tingkat provinsi dan kabupaten.<sup>67</sup>

## 6. Pengelolaan Informasi

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada pasal 1 dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

---

<sup>67</sup> Mursyid, "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," 2021, 47.

## 7. Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam

Organisasi Islam adalah suatu komunitas atau kelompok yang berlandaskan anggaran dasar organisasi serta memiliki pandangan khusus terhadap Al-Qur'an dan Hadits. Organisasi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan pnerapan ajaran Islam, sekaligus berupaya memperbaiki moralitas masyarakat. Selain itu, tujuan organisasi ini selaras dengan misi Islam yang mengedepankan nilai-nilai rahmat, kebahagiaan, dan kedamaian bagi umat manusia.

Organisasi Islam juga memiliki tujuan untuk menyelenggarakan dakwah, memperdalam penelitian, dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Dengan kesadaran bahwa setiap anggota berperan penting dalam pencapaian tujuan ini, organisasi Islam berkontribusi besar dalam pengajaran ajaran Islam, menanamkan semangat nasionalisme, mendirikan institusi pendidikan, serta berupaya mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme.<sup>68</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>68</sup> D Rosiyana, M Setyaningrum, and Ismail, "Analisis Peran Komunikasi Dalam Membentuk Citra Organisasi Islam Dalam Era Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI) Vol.1, No.41*, no. 4 (2023), 56.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Sugiyono, penelitian deksriptif bertujuan untuk mengeksplorasi nilai dari variabel independen secara mendalam, baik satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain.<sup>69</sup>

Penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan objek secara akurat sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memaparkan secara sistematis fakta serta karateristik objek yang diteliti dengan menyeluruh. Penelitian ini mengumpulkan data deksriptif, baik berupa data lisan maupun tertulis dari informan, serta hasil pengamatan terhadap perilaku, untuk mengidentifikasi sebagai permasalahan yang terkait dengan bidang pendidikan dan perilaku manusia.<sup>70</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor dalam moloeong, pendekatan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghaikkan data deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu. Metodologi ini berfokus pada pemahaman konteks serta menggali keseluruhan aspek individu untuk memberukan gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini berusaha menangkap makna dan

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 14

<sup>70</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 14th ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 157

interaksi yang terjadi secara mendalam, sehingga memberikan pemahaman komprehensif atas situasi atau peristiwa yang diteliti.<sup>71</sup>

Metode ini berfokus pada pengembangan teori. Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah keterlibatan langsung peneliti di lapangan sebagai pengamat aktif. Selama proses penelitian, peneliti mengidentifikasi kategori, mengamati fenomena yang terjadi, mencatat dalam jurnal observasi, serta menghindari manipulasi terhadap variabel. Penekanan utamanya adalah pada pengamatan secara alami, di mana peneliti berupaya memahami situasi sebagaimana adanya tanpa intervensi, sehingga dapat memperoleh gambaran yang autentik dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.<sup>72</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Salah satu faktor penting yang mendukung proses penelitian adalah lokasi, karena lokasi penelitian menyediakan tempat yang akan menjadi pusat kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagai lokasi utama. Kantor ini terletak di Jl. Letjen S. Parman No. 89, Tegal Boto Kidul, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain itu, terdapat pula lokasi tambahan yang melibatkan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Jember, Sebagaimana telah disebutkan dalam lampiran penelitian ini.

---

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 4

<sup>72</sup> Sukardi Wekke Ismail Dkk, *Metode Penelitian Sosial, Bandung* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019). 158.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup berbagai penjelasan mengenai pelaporan sumber data serta jenis data yang dikumpulkan. Penjelasan ini meliputi jenis data yang dihimpun beserta karakteristiknya, siapa saja yang menjadi informan atau subjek penelitian, ciri-ciri yang dimiliki oleh para informan atau subjek tersebut, serta metode pengumpulan data yang diterapkan untuk menjamin validitas data.<sup>73</sup>

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, sedangkan objek yang diteliti adalah strategi komunikasi yang diterapkan oleh PPID Pelaksana badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengelolaan informasi bersama Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Jember. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data yang dirinci sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data di lapangan. Data ini bersifat original karena dihasilkan dari upaya langsung yang dilakukan peneliti. Seperti wawancara, survei, atau observasi. Oleh karena itu, data primer sering kali disebut sebagai data awal atau data mentah yang belum diolah.<sup>74</sup> Proses wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait penerapan strategi komunikasi oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengelola informasi bersama organisasi masyarakat Islam di

<sup>73</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.*, 2023, 78.

<sup>74</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

Kabupaten Jember. Data primer yang dikumpulkan ini bersumber dari percakapan dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria dan fakta yang ada di lapangan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai data penunjang. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan publikasi relevan lainnya. Sumber-sumber ini memberikan konteks dan perspektif tambahan untuk memperkaya analisis data primer. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

## 3. Subjek Riset

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian,<sup>75</sup> Daftar informan awal bersifat tentative dan dapat berkembang selama proses pengumpulan data di lapangan. Kriteria pemilihan informan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi seperti ketua lembaga, beserta berbagai staff yang ada di bawahnya di dalam kantor lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 27th ed. (Bandung: Alfabeta, 2022), 292-293.

- b. Kelompok Pengurus/anggota dari lembaga, Ormas, LSM Islam yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember.
- c. Berusia 30 – 60 Tahun yang memiliki daya komunikasi baik dan memiliki wawasan atau pengalaman mengenai Ke-Ormasan Islam. Artinya, informan yang dicari dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam rentang generasi tertentu, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1964 hingga 1994.
- d. Kriteria selanjutnya adalah informan harus beragama Islam.
- e. Pernah berkecimpung di dalam Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Jember. Yang artinya informan harus berada di dalam suatu kepengurusan/keanggotaan yang memiliki KTA Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Jember.
- f. Salah satu kriteria penting dalam pemilihan informan adalah kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara secara sukarela. Partisipasi sukarela ini krusial untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan data dan validitas informasi yang diberikan. Dengan kesediaan yang tulus, diharapkan informan dapat memberikan informasi yang akurat dan terperinci, sehingga mendukung tujuan penelitian.

Subjek penelitian ini berasal dari pengurus dan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Jember yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL). Dari 21 Ormas Islam yang tercatat, sepuluh informan terpilih untuk berpartisipasi dalam

penelitian. Kendala seperti kesulitan menghubungi beberapa Ormas menjadi faktor terbatasnya jumlah Informan. Kriteria pemilihan informan difokuskan pada individu yang memiliki peran dan potensi signifikan dalam organisasi masing-masing. Berikut daftar informan yang berpartisipasi dalam penelitian.

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Subjek Penelitian**

No.	Nama	L/P	Pengurus/Anggota Ormas
1.	Drs. Sigit Akbari, M.Si	L	Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember
2.	Arief Rachman F, S.IP	L	Staff Bidang Hub. Antar Lembaga & Politik Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember
3.	Prof. Dr. Faisol Nasar Bin Madi, M.A. (Ketua Umum)	L	Ketua Umum Pengurus Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah
4.	Vessel Amin, S.Kom. (Sekretaris)	L	Sekretaris Pengurus Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Jember
5.	Khairul (Sekretaris)	L	Pengurus Daerah Hidayatullah Jember/ Pengurus Daerah Pemuda Hidayatullah Jember
6.	Mujito (Ketua)	L	Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan PP Kedunglo Kabupaten Jember
7.	Ahmad Nur Mahfuda, M.Pd.I (Ketua)	L	Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten Jember
8.	Abdus Salam (Ketua) dan Lamidi (Sekretaris)	L	DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jember
9.	Nikmatul Basroh, S.Pd. (Ketua)	P	Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kabupaten Jember
10.	Ust. Kholil (Pengasuh)	L	Yayasan Pendidikan Islam Ummul Kitab Utsmany As Salafy Kabupaten Jember
11.	Drs. H. Hawari Hamim, M.Pd. (Ketua)	L	PD Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember
12.	Nurul Hidayah, S.Pd.I (Ketua)	P	Fatayat NU Kabupaten Jember
13.	Drs. Imam Sutrisno (Ketua)	L	DPD Organisasi Siddiqiyah Kabupaten Jember
14.	Ustadz Neman (Ketua)	L	PD Ikatan Da'I Indonesia Kabupaten Jember

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Metode Observasi Partisipan diimplementasikan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung dinamika kehidupan individual tau kelompok dalam setting yang natural. Berbeda dengan pendekatan eksperimental yang mengontrol variabel dalam lingkungan yang direkayasa, observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk mempelajari perilaku dan interaksi sosial dalam konteks aslinya, tnpa intervensi atau manipulasi. Dengan demikian, metode ini ,memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian, Bahkan tinggal bersama mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam metode ini, peneliti memiliki dua peran: sebagai partisipan dan sebagai peneliti (pengamat). Berikut penjelasannya:

- a. Partisipan sebagai peneliti, artinya peneliti (pengamat) adalah anggota dari kelompok yang diamati dan melakukan pengamatan terhadap kelompok tersebut.
- b. Pengamat sebagai partisipan, artinya pihak luar yang netral memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kelompok tersebut sambil melakukan pengamatan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 112.

Penelitian ini menerapkan teknik observasi partisipasi pasif. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang menyaksikan dan mencatat aktivitas dan interaksi yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang tercantum pada lampiran. Peneliti tidak langsung dalam aktivitas Ormas, melainkan berfokus pada pengamatan untuk mengumpulkan data.<sup>77</sup>

Jadi, untuk observasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pengamat sebagai partisipan, maka saat melakukan pengamatan akan ikut serta membaur terjun langsung ke lapangan dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke kanal penyebaran informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

## 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*In-dept interview*) sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi tatap muka langsung dengan informan untuk menggali informasi secara komprehensif terkait topik penelitian. Proses wawancara dilakukan secara interaksi dan terkadang berulang untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Metode ini dikombinasikan dengan observasi partisipasi pasif, sebagaimana telah dijelaskan

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 227.

sebelumnya, untuk memperoleh pemahaman yang holistik terhadap fenomena yang diteliti.<sup>78</sup>

Wawancara mendalam difasilitasi melalui dialog interaktif antara peneliti dan informan. Interaksi dua arah ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan informasi yang mendalam, sehingga memfasilitasi eksplorasi makna dan pemahaman terkait topik penelitian secara komprehensif.<sup>79</sup> Wawancara menjadi metode yang sangat bermanfaat Ketika peneliti hendak menggali pendapat atau pengalaman informan secara mendalam. Metode ini juga digunakan untuk mengonfirmasi dan memperkuat realitas dari informasi atau keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Wawancara dapat dilakukan untuk mengklarifikasi fenomena yang sedang diteliti serta untuk mengumpulkan data pada waktu yang tepat. Dalam pelaksanaannya, wawancara ini menggunakan pedoman umum berupa daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Apabila jawaban yang diperoleh dianggap belum jelas atau detail, wawancara dapat diulang dengan narasumber tambahan hingga masalah yang diteliti menjadi terlihat kejelasannya.

Dalam hal ini, penulis melaksanakan wawancara mendalam dengan Staff bagian hubungan antar lembaga & politik di BAKESBANGPOL Kabupaten Jember.

---

<sup>78</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 157.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 231.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih sebagai salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung proses analisis dalam penelitian ini. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang dimiliki relevansi dengan fokus penelitian. Sumber data yang akan dijadikan acuan mencakup berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. Dokumen-Dokumen tersebut meliputi pelaporan tahunan, rencana program kerja, serta laporan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Islam di wilayah Kabupaten Jember. Melalui teknik ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang mendalam dan mendukung validitas hasil penelitian

Dokumentasi memiliki peran penting dalam analisis penelitian, karena dokumen berfungsi sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi, yang berguna bagi peneliti. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang dihasilkan oleh individu atau organisasi tertentu. Dokumen tertulis mencakup catatan harian, regulasi, biografi. Sementara dokumentasi visual dapat berupa foto, video, sketsa, dan sejenisnya. Selain itu, dokumentasi berupa karya yang dapat mencakup karya seni, sastra, dan berbagai bentuk lainnya yang berhubungan dengan aspek penelitian yang sedang ditelaah.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 240 – 241.

Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam setiap analisis penelitian dan sangat mendukung penggunaan metode observasi serta wawancara. Keabsahan dan keandaan hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut akan semakin kuat jika didukung oleh bukti-bukti documenter. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, yang tidak hanya memperkuat validitas temuan, tetapi juga memberikan wawasan tambahan yang lebih mendalam untuk mendukung hasil analisis. Dengan demikian, penggunaan dokumen dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian secara keseluruhan.

#### **E. Analisis Data**

Dalam konteks analisis data kualitatif, Bogdan menjelaskan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of the and to enable you to present what you have discovered to others”*. Analisis data ini melibatkan langkah-langkah terstruktur dalam mengidentifikasi pola, menyusun data dengan rapi, dan menyajikan hasil yang dapat diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti

Analisis data bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan. Proses ini meliputi beberapa tahapan, antara lain: pengorganisasian data, penjabaran data menjadi unit-unit yang lebih kecil, sistesis informasi, identifikasi pola,

pemilihan informasi kunci yang relevan dengan tujuan penelitian, dan penarikan kesimpulan yang dapat disebarluaskan.<sup>81</sup>

Menurut Miles and Hubberman (1984), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga datanya mencapai kejenuhan. Kegiatan dalam analisis data ini terdiri dari:

### 1. Pengumpulan Data

Studi ini dilakukan di lokasi yang spesifik seperti satu kelas, beberapa kelas, satu sekolah, sejumlah sekolah, sekolah dalam satu kecamatan atau di beberapa kecamatan. Dengan penelitian kualitatif peneliti mulai dengan eksplorasi secara umum saat memulai objek penelitian, menggunakan observasi dan pertanyaan umum untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang dilihat, dirasakan dan yang menarik perhatian. Data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya sangat banyak, sehingga penting untuk mencatatnya secara cermat dan mendetail. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data yang terkumpul akan semakin bertambah, menjadi lebih kompleks dan rumit.<sup>82</sup>

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan seringkali cukup besar jumlahnya, sehingga penting untuk mencatatnya secara cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data cenderung bertambah, menjadi lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 367.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 332.

data dimulai dengan melakukan reduksi data. Reduksi data berarti mengurangi jumlahnya dengan merangkum informasi, memilih elemen-elemen kunci dan memfokuskan pada hal-hal yang signifikan, serta mencari tema dan pola yang muncul.

### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Hubberman (1984), "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative teks*". Contoh bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui narasi teks.

### 4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat provisional dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat dan mendukung selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten Ketika peneliti Kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2021), 369.

## F. Keabsahan Data

Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber yang dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Selanjutnya melakukan *member check* yang merupakan proses dimana peneliti mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan orang yang menyediakan data. Tujuan dari *member check* yakni guna memastikan kesamaan antara data yang di dapatkan dan data yang diberikan oleh penyedia data. Jika penyedia data menyetujui data yang dibagikan, ini menunjukkan validitas dan meningkatkan kebenaran data tersebut.<sup>84</sup>

Pada bagian ini, peneliti berusaha untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan. Ada berbagai metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, di antaranya adalah dengan melakukan perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam pengumpulan data, serta menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa konsistensi informasi dari berbagai sumber. Semua metode ini bertujuan untuk menguatkan keabsahan hasil penelitian dan meminimalkan bias yang mungkin terjadi.<sup>85</sup> Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dalam bentuk deksripsi mendalam dan kategorisasi untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan serta aspek spesifik dari informasi yang diperoleh. Proses analisis ini tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, untuk memastikan keakuratan dan validitas

---

<sup>84</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 555.

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2021), 270

data, peneliti akan melakukan pengecekan dengan subjek penelitian melalui prosedur yang dikenal sebagai “*member check*”, yaitu meminta konfirmasi dari sumber data terkait interpretasi dan kesimpulan yang telah diambil. Dengan demikian, proses ini dapat meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian

## **G. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian mengacu pada serangkaian langkah yang sistematis diikuti oleh peneliti untuk pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikan data, dengan tujuan terjawabnya pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Langkah ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara terstruktur dan terencana sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap ini, menurut moleong penelitian kualitatif dengan studi deksriptif ini terdiri dari tiga tahapan bagian utama meliputi:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Pada tahap ini dapat kegiatan yang merancang penelitian dengan mengajukan judul penelitian kepada Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam, setelah mendapatkan persetujuan dan mengurus perijinan, peneliti memilih BAKESBANGPOL sebagai lokasi penelitian dan melakukan studi pendahuluan guna memantau perkembangan yang ada, mengevaluasi lapangan, memilih dan memanfaatkan informan,

menyiapkan perlengkapan penelitian dan mematuhi etika.<sup>86</sup> Adapun penjelasan lebih lengkapnya:

- a. Langkah awal pengamatan, yaitu mengamati berbagai kegiatan yang ada di BAKESBANGPOL Kabupaten Jember. Kemudian, memilih Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Selanjutnya peneliti akan melakukan identifikasi terhadap subjek penelitian dan berusaha untuk memahami perasaan serta perspektif yang dimiliki subjek tersebut. Proses ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara untuk mendapatkan informasi, sejauh mana peran PPID BAKESBANGPOL terhadap pengelolaan Informasi Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Jember.
- b. Peneliti menyusun pedoman observasi dengan menetapkan prosedur wawancara dan pengamatan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan melalui kedua metode tersebut dapat memberikan wawasan yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.
- c. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria substansial yang relevan dengan fokus penelitian serta minat peneliti. Dalam hal ini, peneliti memilih lembaga PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian, mengingat lembaga ini memiliki wewenang dan tanggung

---

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 127.

jawab dalam pengelolaan serta pembinaan Organisasi Masyarakat Islam di wilayah tersebut. Pemilihan ini juga dipicu oleh adanya tantangan komunikasi dan kurangnya perhatian yang terjadi antara pemerintah dan Organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Jember, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

- d. Pemilihan model pengamatan terbuka dilakukan dengan tujuan agar proses pengamatan dapat berlangsung secara transparan, tanpa mengganggu aktivitas atau merugikan pihak yang terlibat, serta tanpa mengganggu profesi atau peran yang dimiliki oleh subjek penelitian. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap subjek yang sedang diteliti.

## **2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Tahap pelaksanaan penelitian di lapangan terbagi menjadi tiga langkah utama. Pertama, peneliti mempersiapkan diri dengan memahami latar belakang penelitian secara mendalam. Kedua, peneliti menetapkan tujuan untuk terjun ke lapangan, yaitu untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan sebanyak mungkin. Dalam proses ini, peneliti juga berusaha untuk menjalin hubungan yang akrab dengan responden agar diterima dengan baik. Terakhir, peneliti mulai melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan, guna memperoleh data yang

diperlukan untuk analisis lebih lanjut.<sup>87</sup> Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

- a. **Menjalin Hubungan Interpesonal**, Peneliti aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan berusaha untuk menjalin kedekatan dengan responden agar dapat diterima dengan baik dan merasa nyaman, sehingga memudahkan proses pengumpulan data yang lebih efektif.
- b. **Menyesuaikan Komunikasi Dengan Subjek**, peneliti menyesuaikan gaya dan bahasa komunikasi dengan cara berkomunikasi yang digunakan oleh subjek penelitian, agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan relevan dengan konteks yang ada.
- c. **Mencatat Hasil Pengamatan**, peneliti secara sistematis mencatat segala informasi yang diperoleh selama pengamatan di lapangan, baik berupa fakta, perilaku, maupun situasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
- d. **Melaksanakan Wawancara**, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk menggali informasi lebih dalam dan memperoleh data yang lebih lengkap serta mendalam terkait topik yang diteliti.
- e. **Pengumpulan Dokumen Pribadi**, Peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan yang dimiliki oleh subjek, seperti catatan pribadi, arsip atau dokumen lain yang dapat mendukung temuan dan analisis dalam penelitian

---

<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 127.

### 3. Tahap Pengolahan Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menerapkan teknik yang telah dijelaskan sebelumnya, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Seluruh hasil penelitian ini akan disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kyai haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023..<sup>88</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data:

- a. Menyusun Transkrip Wawancara, semua hasil wawancara yang telah dilakukan akan ditranskrip secara menyeluruh untuk memudahkan analisis dan pencarian pola-pola informasi
- b. Melakukan Analisis Data, Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mengkaji keterkaitannya dengan realitas yang ada, serta relevansinya dengan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Merumuskan Tema dan Menemukan Pola Temuan Penelitian, Peneliti akan membaca Kembali seluruh catatan yang terkumpul, menandai topik-topik penting dari percakapan, mendengarkan ulang rekaman wawancara, menyusun tipologi berdasarkan tema yang ditemukan, serta melakukan kajian literatur untuk memperdalam pemahaman.

---

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 127.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember**

Berdasarkan peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember, Bakesbangpol bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol menjalankan tugas yang sebelumnya diberikan kepada Gubernur dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, serta berfungsi sebagai unit pelaksana yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, Bakesbangpol juga merujuk pada Peraturan Bupati Jember Nomor 06 Tahun 2012 yang menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008. Bakesbangpol Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini, berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022, Bakesbangpol terdiri dari empat bidang, antara lain:

- a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.<sup>89</sup>

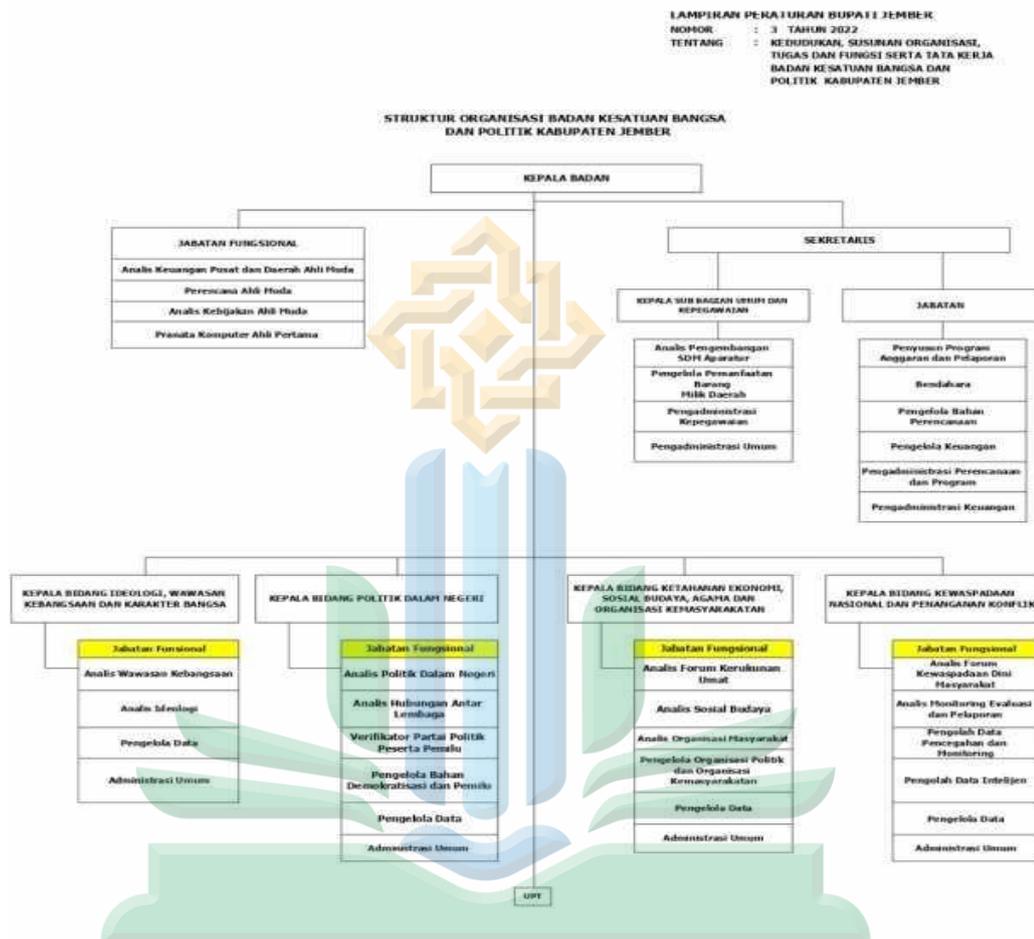
## 2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember,

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, peraturan ini menetapkan beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dengan bagian:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

<sup>89</sup> Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember, "Perubahan Rencana dan Strategis (RENSTRA) Tahun 2022", 19.

## h. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>90</sup>



Gambar 4. 1

Perda No. 3 Tahun 2022 Tentang Kedudukan susunan organisasi, Tupoksi serta tata kerja Bakesbangpol Kabupaten Jember

### 3. Sekretariat

Fungsi utama dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jember mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian berbagai kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta keuangan. Selain itu, Badan ini juga

<sup>90</sup> Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember, "Perubahan Rencana dan Strategis (RENSTRA) Tahun 2022", 28.

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Adapun rincian fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan operasional yang berkaitan dengan tugas serta memberikan dukungan dalam aspek administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta mendukung pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di seluruh bagian Badan.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan dukungan yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di dalam Badan
4. Mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Badan.
5. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan seluruh tugas yang diaman oleh Badan.
6. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh unit organisasi yang berada di bawah Badan Kesatuan bangsa dan Politik.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian ini bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas yang terkait dengan ketatusahaan, kehumasan, pengelolaan perlengkapan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Berikut adalah fungsi utama dari bagian ini:

1. Mengelola administrasi surat, termasuk proses penerimaan, pengiriman, dan distribusi surat-surat resmi.
2. Menyusun bahan yang diperlukan untuk pengadaan naskah dinas dan pengelolaan arsip di lingkungan Badan.
3. Menyusun dan mengatur berbagai persiapan untuk rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, serta memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan Badan, serta pelayanan rumah tangga lainnya.
4. Menyusun bahan untuk pelayanan informasi yang diperlukan.
5. Menyusun dan mengkoordinasikan proses penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan.
6. Merencanakan kebutuhan barang dan melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang yang ada.
7. Melaksanakan pelayanan administrasi yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, serta distribusi perlengkapan kantor.
8. Menyusun dan melaksanakan kegiatan penatausahaan serta perlindungan asset/barang milik daerah.
9. Mengusulkan rencana kebutuhan kepegawaian dan mengelola administrasi kepegawaian lainnya.
10. Menyusun laporan pertanggung jawaban yang mencakup pelaksanaan semua tugas yang telah dilakukan.

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. sesuai dengan kebutuhan instansi.<sup>91</sup>

#### **4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat**

Bagian ini bertanggung jawab atas pelaksanaan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Tugas ini mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, menjaga kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta mengelola pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa yang melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas). selain itu, juga melakukan pengawasan terhadap Ormas lokal maupun Ormas asing yang beroperasi di Kabupaten Jember. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memfasilitasi upaya menjaga kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan. Selain itu, juga mencakup kegiatan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa Organisasi Masyarakat (Ormas), serta pengawasan terhadap Ormas lokal dan Ormas asing di wilayah kabupaten.
- b. Menyusun bahan kajian untuk merumuskan kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memfasilitasi kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan. Proses ini juga

---

<sup>91</sup> Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember, "Perubahan Rencana dan Strategis (RENSTRA) Tahun 2022", 21.

meliputi pengelolaan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa Ormas, serta pengawasan terhadap Ormas baik lokal maupun asing yang ada di Kabupaten.

- c. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memfasilitasi pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Hal ini termasuk pengelolaan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa Ormas, serta pengawasan terhadap Ormas lokal dan Ormas asing di wilayah kabupaten
- d. Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Termasuk juga pengelolaan pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa Ormas, dan pengawasan terhadap Ormas lokal maupun Ormas asing yang berada di kabupaten.
- e. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Selain itu, meliputi pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa, dan pengawasan terhadap Ormas lokal dan Ormas asing di wilayah kabupaten.

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>92</sup>

## 5. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

### Visi:

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang berjalan dengan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas tinggi.

### Misi:

- a. Mengumpulkan berbagai informasi publik yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
- b. Menata dan menyimpan informasi publik dengan sistematis dan terorganisir di Bakesbangpol
- c. Melaksanakan konsultasi terkait informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang dapat diakses oleh publik
- d. Menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akses informasi yang terjadi di dalam lembaga Bakesbangpol

## 6. Keadaan Ormas Islam Yang Berada di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti dalam melakukan penelitian di PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember,

<sup>92</sup> Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember, "Perubahan Rencana dan Strategis (RENSTRA) Tahun 2022", 21.

jumlah Kelompok / Lembaga / Ormas / LSM Tercatat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Daftar Kelompok / Lembaga / Ormas / LSM Tercatat di Bakesbangpol Jember**

No.	Tahun	Umum	Islam
1	2022	78 (tujuh puluh delapan)	19 (sembilan belas)
2	2023	7 (tujuh)	2 (dua)
3	2024	3 (Tiga)	-

Sumber : Data Base Bakesbangpol Kabupaten Jember

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Daftar Ormas Islam Tercatat di Bakesbangpol Jember**

No.	Nama Organisasi	Tahun Tercatat
1	Dewan Pengurus Hidayatullah Kabupaten Jember	2022
2	Pengurus Daerah Jember Pemuda Hidayatullah	2022
3	Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember	2022
4	Fatayat NU Cabang Kabupaten Jember	2022
5	Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten Jember	2022
6	DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI) Kabupaten Jember	2022
7	Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kabupaten Jember	2022
8	Pengurus Daerah Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember	2023
9	Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Siddiqiyah Kabupaten Jember	2023

Sumber : Data Base Bakesbangpol Kabupaten Jember

Dari jumlah Kelompok / Lembaga / Ormas / LSM yang tercatat dari tahun 2022 hingga tahun 2024, peneliti mengambil 9 yang masuk dalam kategori Organisasi masyarakat bidang kegiatan keagamaan Islam. Maksudnya, mereka yang mendirikan dan menjalankannya berdasarkan dengan prinsip, nilai, ajaran Islam. Memiliki fungsi untuk memajukan

kepentingan umat Islam baik dalam aspek keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai data dan temuan yang diperoleh melalui penerapan metode serta prosedur yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penjelasan ini mencakup deksripsi data yang diorganisasi berdasarkan topik-topik yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis data ini merupakan temuan-temuan yang disajikan dalam berbagai bentuk, seperti pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data tersebut. Selain itu, temuan juga dapat dipresentasikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi, atau tipologi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur terkait hasil penelitian.<sup>93</sup>

### **1. Perkembangan Ormas Islam Tercatat di Bakesbangpol Jember**

Berdirinya Ormas Islam di Kabupaten Jember merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan lokal, kondisi sosial historis dan pengaruh keagamaan. Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Jember tidak hanya berperan sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting sebagai pilar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Hal ini tercermin dalam pendapat yang disampaikan oleh empat perwakilan Ormas Islam di Kabupaten Jember, yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>93</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Unoversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 2023, 80.

Berdirinya Ormas Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) adalah sebagai wadah alumni. KBPII sebagai Ormas yang independen, artinya seluruh anggaran berasal dari anggota tidak adanya ikut campur pemerintah maupun pihak politik lainnya. Ormas ini tidak memihak pada salah satu Ormas Islam besar di Indonesia, maksudnya KBPII ini terdiri atas berbagai macam latar belakang organisasi seperti Muhammadiyah, NU dan Ormas Islam lainnya di Indonesia terhimpun didalamnya serta bergerak pada dakwah dan ekonomi umat.<sup>94</sup>

Berdirinya Ormas dan Lembaga Wahidiyah diawali dengan K.H Abdul Mazid Ma'ruf menaklif sholat Wahidiyah dengan tujuan untuk menyadarkan umat masyarakat jama'ah Al-Alamin kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selanjutnya dibentuklah lembaga yayasan perjuangan Wahidiyah dengan departemen bapak, ibu, anak-anak, keuangan, koperasi dan pendidikan.<sup>95</sup>

Berdirinya Ormas DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI) bertujuan untuk perjuangan umat agar lebih teratur. Apabila jaman dahulu masyarakat tersebar dan apabila ada masalah tidak mengetahui harus kemana, maka munculah ide untuk mendirikan Ormas Ahlul Bait yang bertujuan Gerakan kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Ahmad Nur Mahfuda, *Sekretaris Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KB PII Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 20 Juli 2024, n.d.).

<sup>95</sup> Mujito, *Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 22 Juli 2024, n.d.).

<sup>96</sup> Mujito, *Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 22 Juli 2024, n.d.).

Berdirinya Ormas Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) pada 8 Maret 2008 sebagai respon terhadap keprihatinan terhadap masalah perempuan dan anak yang masih memerlukan perhatian serius di Indonesia. Salimah berfokus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menangani berbagai masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Salimah di Jember sendiri lahir dari perkumpulan pengajian yang kemudian berkembang menjadi organisasi formal dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.<sup>97</sup>

Dalam menjalankan misinya, Salimah mengembangkan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas perempuan dan anak melalui pendidikan, pelatihan dan program pendampingan. Program – program ini seperti pendampingan anak – anak stunting dan dukungan terhadap PAUD, dirancang untuk memberikan dampak positif langsung kepada komunitas. Semangat keprihatinan dan kepedulian sosial ini telah menjadikan Salimah sebagai wadah penting dalam menguatkan peran perempuan di Jember, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Organisasi Siddiqiyah (ORSHID) didirikan pada 17 Oktober 2001 di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pendirian ORSHID dilakukan oleh Kyai Mochtarrulloh, selaku Mursyid

---

<sup>97</sup> Nikmatul Basroh, *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)* (Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.).

Thoriqoh Shiddiqiyah. Tarekat Shiddiqiyah sendiri merupakan aliran tasawuf yang pertama kali muncul di Desa Losari, Kabupaten Jombang, sekitar tahun 1958. Kata Shiddiqiyah berasal dari kata “Shiddiq” yang berarti ‘benar’, sehingga Thoriqoh Shiddiqiyah artinya ‘jalan yang benar’. Silsilah Tarekat Shiddiqiyah dimulai dari Muhammad Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar As-Shiddiq, Salman Al-Farisi, Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Shiddiq, Imam Ja’far al-Shadiq, Syeikh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Barwasyam al-Basthami, hingga kepada Syeikh Amin al-Kurdi.<sup>98</sup>

Adapun penjelasan mengenai Ormas keagamaan dari Fatayat Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi pemuda Islam yang menjadi salah satu badan otonom NU, organisasi ini secara resmi didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 Hijriah atau 24 April 1950 di Surabaya. Masa awal pembentukan Fatayat NU bermula saat pelaksanaan Mukhtamar Ke-15 NU di Surabaya pada tahun 1940. Beridirinya organisasi ini merupakan hasil perjuangan perempuan-perempuan tangguh seperti Chuzaimah Mansur dari Gresik, Aminah Mansur dari Sidoarjo, dan Murthosiyah dari Surabaya. Ketiganya dikenal sebagai ‘Tiga Serangkai’ yang menjadi tokoh utama dalam mendirikan Fatayat NU.<sup>99</sup>

Lahirnya Dewan Masjid Indonesia (DMI) berawal dari pertemuan yang melibatkan H.Rus’an dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

<sup>98</sup> Imam Sutrisno, *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.)

<sup>99</sup> Nurul Hidayah, *Fatayat NU Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

(Bimas) Islam serta H. Edi Djajang Djaatmadja, Wakil ketua Jakarta Pusat, menjadi tonggak awal terbentuknya DMI. Ormas Keagamaan ini berperan sebagai embrio yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya DMI. Pada 16 Juni 1970, dibentuk sebuah formatur yang dipimpin oleh K.H. MS. Rahardjo Dikromo sebagai ketua, dengan dukungan anggota lainnya yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti H. Sudirman, K.H. Hasan Basri, K.H. Muchtar Sanusi, K.H. Hasyim Adnan, dan K.H. Ichsan.<sup>100</sup>

Adapun lahirnya Ormas Keagamaan Ikatan Da'i Indonesia (IKADI), merupakan sebuah organisasi yang didirikan sebagai wadah bagi para da'i di seluruh Indonesia. Salah satu tokoh pendirinya adalah Prof. Dr. Ahmad Satori, MA. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan ruang netral bagi para da'i, bebas dari afiliasi dengan Ormas radikal maupun kelompok lainnya. IKADI secara resmi berdiri pada tahun 2003 berdasarkan akta notaris Ny. Trie Sulistiowarni nomor satu, tertanggal 8 Januari 2003. Diharapkan, dengan adanya wadah ini, para da'i di berbagai wilayah Indonesia dapat lebih terorganisir, potensi mereka dapat dimaksimalkan, dan organisasi ini mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang seiring waktu.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Hawari Hamim, *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

<sup>101</sup> Neman Agustono, *Ketua Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024.)

## **2. Dinamika Komunikasi dan Interaksi Ormas Islam dengan Bakesbangpol Kabupaten Jember**

Sub bab ini mengulas tentang strategi komunikasi antara Ormas Islam di Jember dengan Bakesbangpol. Berdasarkan hasil wawancara, interaksi yang terjadi lebih banyak bersifat satu arah, dimana Ormas Islam kerap merasa tidak diikutsertakan secara penuh dalam diskusi strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, KBPII merasa bahwa peran Bakesbangpol lebih terlihat saat menjelang Pilpres, ketika mereka mengundang Ormas untuk sosialisasi pemilu. Namun, dalam keseharian, komunikasi yang lebih intens dan program pembinaan masih dirasa kurang. Bakesbangpol sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertugas memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan Ormas, diharapkan oleh pihak Ormas untuk lebih aktif dalam memberikan dukungan baik dalam bentuk pembinaan, pemberdayaan maupun alokasi anggaran. Harapan ini muncul dari kurangnya program berkelanjutan yang melibatkan Ormas secara intensif dalam proses pembangunan daerah.

Dinamika komunikasi antara Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Bakesbangpol di Kabupaten Jember sampai saat ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, pengurus ABI menyatakan bahwa BAKESBANGPOL belum pernah secara aktif mengajak Ormas ini untuk berdialog atau membangun komunikasi strategis, baik terkait pengembangan Ormas maupun pengelolaan

informasi publik. Hubungan yang terjalin selama ini hanya terbatas pada penyerahan dokumen legalitas. Ketika ABI didaftarkan sebagai Ormas resmi. Setelah itu, tidak ada tindak lanjut dalam bentuk pembinaan, pemberdayaan, atau evaluasi dari BAKESBANGPOL.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan Ormas Islam di Kabupaten Jember. Sebagai Ormas Islam, merasa kurang mendapat perhatian dari BAKESBANGPOL dalam hal pembinaan atau dukungan program yang relevan. Bahkan, evaluasi yang dilakukan oleh ABI dilakukan secara internal setiap tiga bulan sekali dengan pengurusnya, tanpa melibatkan pemerintah daerah. Hal ini membuat ABI harus mengandalkan inisiatif sendiri untuk menjalankan program-program yang telah digariskan oleh pusat tanpa dukungan lokal yang memadai.

Selanjutnya interaksi Salimah dengan Bakesbangpol di Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Berdasarkan wawancara, Salimah belum memiliki riwayat komunikasi yang intensif dengan Bakesbangpol. Dalam kepengurusan yang dimulai dari tahun 2022, Salimah belum pernah berkoordinasi dengan Bakesbangpol atau menerima informasi langsung dari lembaga tersebut. Kondisi ini mencerminkan kurangnya inisiatif baik dari Bakesbangpol maupun Salimah untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dalam mendukung program-program Ormas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salimah berharap agar Bakesbangpol dapat lebih aktif dalam memberikan dukungan dan membuka akses informasi, khususnya terkait peluang kolaborasi yang relevan dengan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi fokus utama Salimah. Meski tidak pernah mengajukan permintaan informasi secara formal, Salimah merasa perlu mendapat bimbingan untuk memahami alur atau prosedur yang diperlukan dalam mengakses bantuan atau dukungan dari Bakesbangpol.<sup>102</sup>

Mengenai kategori Ormas Islam dan Interaksi dengan Ormas Islam di Kabupaten Jember menjelaskan proses pengelompokan dan interaksi yang dilakukan oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Jember dalam mengelola informasi dan menjalin hubungan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Berdasarkan wawancara, BAKESBANGPOL tidak secara khusus mengategorikan Ormas berdasarkan afiliasi politik, tetapi lebih fokus pada pencatatan administrative dan keberadaan kepengurusan Ormas di tingkat Kabupaten. Data Ormas dipisahkan dari data partai politik, dengan masing-masing data dikelola oleh bidang yang berbeda.

Menurut Ormas keagamaan Shiddiqiyah mereka ijin ke Bakesbangpol sifatnya legalitas, dari Kemenkumham kita juga ada legalitas. Dimulai dari kepengurusan, lambang Ormas, AD/ART, susunan pengurus selanjutnya dari pihak Shiddiqiyah juga mendapat SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Shiddiqiyah pada tahun 2001 yang mengajukan ijin

---

<sup>102</sup> Nikmatul Basroh, *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)* (Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.).

pendaftaran Ormas, kemudian baru tahun 2023 adanya perpanjangan pergantian pengurus. Hanya itu interaksi yang terjadi antara Ormas Shiddiqiyah dengan Bakesbangpol Kabupaten Jember.<sup>103</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jember menunjukkan bahwa komunikasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Jember terakhir dilakukan pada tahun 2022, saat proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Setelah itu, tidak ada interaksi atau koordinasi lanjutan antara kedua belah pihak. Fatayat NU menyampaikan bahwa selama ini mereka melaksanakan berbagai program secara mandiri tanpa adanya pendampingan atau pembinaan dari Bakesbangpol. Mereka berharap komunikasi dapat diperkuat untuk mendukung sinergi dan peningkatan pembinaan terhadap Ormas Islam di Jember. Minimnya interaksi ini dinilai menjadi kendala dalam menciptakan koordinasi yang optimal antara pemerintah dan Ormas untuk mendukung pembangunan sosial di masyarakat.<sup>104</sup>

Selanjutnya interaksi Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan Bakesbangpol Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa komunikasi dan interaksi dengan bakesbangpol sudah jarang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan wawancara, pihak DMI menjelaskan bahwa terakhir kali mereka berkomunikasi secara langsung dengan bakesbangpol pada tahun 2023, tepatnya dalam rangka acara kebhinekaan yang melibatkan

---

<sup>103</sup> Imam Sutrisno, *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.)

<sup>104</sup> Nurul Hidayah, *Fatayat NU Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

elemen masyarakat. Minimnya interaksi ini dinilai menjadi salah satu tantangan upaya pembinaan Ormas Islam di tingkat daerah. Padahal, komunikasi yang berkesinambungan dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan program pembinaan yang selaras dengan visi pemerintah daerah.

Hubungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan Bakesbangpol, persoalan keagamaan inikan krusial misalnya munculnya kelompok-kelompok radikal, liberalis, maka disini harus ada jalan tengah yang disebut dalam moderasi beragama sehingga terbangun toleransi, keseimbangan, terbangun jalan moderat untuk membangun keadilan itulah yang kemudian Bakesbang harus sering menyentuh DMI karena merupakan bagian integral diatas dari takmir-takmir masjid. Sementara takmir masjid disitu agendanya cukup banyak, jamaahnya ada. Saat memberikan pembinaan yang salah atau keliru pada masyarakat menimbulkan persoalan.<sup>105</sup>

Dinamika komunikasi dan interaksi kepada Ikatan Dai Indonesia

Kabupaten Jember selama ini hampir tidak ada komunikasi dan tidak ada kabar. Sejauh ini hampir tidak ada informasi sedikit sedikitpun dari Bakesbangpol, hanya intruksi dari pusat bahwa harus melapor kepada Bakesbangpol selebihnya tidak ada komunikasi melainkan IKADI menjalankan rutinitas dari dulu seperti pengajian, pelatihan dai dan masjid sementara itu tidak ada komunikasi sedikitpun dengan Bakesbangpol.

---

<sup>105</sup> Hawari Hamim, *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

Hanya laporan saja, hanya mencatatkan keberadaan dan perizinan Ormas IKADI. Hanya surat ijin perpanjangan saja yang kami dapatkan selain itu tidak ada.<sup>106</sup>

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari Ormas itu sendiri. BAKESBANGPOL hanya dapat memberikan himbauan kepada Ormas untuk melaporkan struktur kepengurusan dan aktivitas mereka. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efektivitas koordinasi dan komunikasi dalam menjalin hubungan yang lebih era antara pemerintah dan Ormas. Jadi kesimpulannya dari berbagai Ormas, maupun Ormas Islam yang ada di Kabupaten Jember telah ditelusuri oleh peneliti tidak ada yang berafiliasi dengan partai politik manapun.

### **3. Program Kegiatan dan Tantangan Internal Ormas Islam di Kabupaten Jember**

Bagian ini menjelaskan berbagai program yang dijalankan oleh Ormas Islam di Jember, seperti kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan.

KBPII misalnya, telah berhasil melakukan musyawarah daerah keempat dan pelantikan pengurus cabang serta terus mengembangkan program-program yang menysasar ekonomi keumatan yaitu mereka memiliki aset-aset penting termasuk kemitraan dengan pesantren-pesantren di Jember.

Wahidiyah disisi lain, fokus pada pengamalan sholat yang dilaksanakan rutin setiap hari,minggu hingga bulanan melalui kegiatan

---

<sup>106</sup> Neman Agustono, *Ketua Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024.)

Mujahadah Yaumiah, Usbuiyah dan Syahriah. Mereka memiliki struktur organisasi yang kuat terbagi dalam beberapa departemen bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan kanak-kanak.

Tantangan yang dihadapi Ormas Islam di Kabupaten Jember saat ini meliputi kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terutama dalam hal dana dan fasilitas. Sebagian besar pendanaan mereka berasal dari anggota secara mandiri dan mereka merasa bahwa perhatian dari Bakesbangpol masih minim. Ada juga masalah eksternal yang dialami Wahidiyah seperti adanya fitnah dari pihak-pihak tertentu terhadap ajaran Wahidiyah yang pernah menghentikan kegiatan mereka di beberapa wilayah.

Sebagai Organisasi Islam yang berkembang di Kabupaten Jember, Ahlul Bait Indonesia mulai menjalankan beberapa program pengabdian masyarakat. Salah satu fokus utama mereka adalah terjun langsung ke masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan, seperti yang dilakukan melalui kegiatan fogging saat terjadi wabah demam berdarah. Selain itu, KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ JEMBER juga rutin mengadakan donor darah, yang bertujuan untuk mendukung Kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan komunitas mereka dengan masyarakat sekitar.

Meskipun program-program ini telah dijalankan, perkembangan ABI di Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya BAKESBANGPOL, dalam memberikan dukungan atau arahan

terkait pengembangan Ormas. karena minimnya pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah, ABI harus mengandalkan sumber daya internal dan swadaya dari anggotanya untuk menjalankan program-program tersebut.

Selain itu, ABI juga menghadapi tantangan dalam hal peningkatan pengaruh sosial dan keagamaan mereka. Sebagai Ormas Minoritas, ABI belum memiliki jaringan yang luas atau dukungan yang cukup dari masyarakat Kabupaten Jember. Mereka Harus bekerja keras untuk memperkenalkan program-program mereka dan menunjukkan dampak positif dari keberadaan Ormas ini kepada Masyarakat.

Ormas Islam Salimah memiliki kegiatan utama pemberdayaan perempuan dan pendampingan anak. Fokus mereka terletak pada peningkatan kualitas hidup perempuan seperti pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Program pendampingan anak meliputi dukungan kesehatan bagi anak stunting dan pendidikan dini melalui PAUD yang bertujuan untuk membantu anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dilingkungan yang positif.

Salimah di Jember menghadapi tantangan internal terutama dalam hal koordinasi antara pengurus yang sebagian besar adalah tenaga profesional seperti dokter, perawat, guru, dan dosen yang memiliki kesibukan masing-masing. Hal ini menyebabkan rapat koordinasi dan evaluasi rutin sering dilakukan secara daring untuk menyasiasi keterbatasan waktu. Selain itu, minimnya dukungan dari Bakesbangpol

dan kurangnya panduan terkait akses ke sumber daya dan informasi dari pemerintah daerah membuat Salimah harus mengandalkan kemampuan internal dalam menjalankan program-program mereka.<sup>107</sup>

Program kerja utama dari Ormas keagamaan Shiddiqiyah yakni, Program kerja utama, pelaksanaan program 2000 Jami'atul Mudzakkirin. Salah satu program Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah yang disambut oleh para murid adalah program pembangunan 2000 Jami'atul Mudzakkirin. Untuk mewujudkan program tersebut, ORSHID telah memfasilitasi penggalangan dana dari murid-murid yang peduli, bekerjasama dengan Bank Mandiri cab. Jombang dan secara periodic melaporkan perkembangan dana tersebut melalui majalah Al-Kautsar sebagai media komunikasi di lingkungan Shiddiqiyah.<sup>108</sup>

Fatayat NU Kabupaten Jember sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) aktif melaksanakan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Program yang menjadi unggulan meliputi pelatihan keterampilan untuk perempuan, seminar keagamaan, dan kegiatan sosial seperti bakti sosial serta penyuluhan Kesehatan. Fatayat NU juga menjalankan pendidikan informal berupa taman pendidikan Al-Qur'an dan pelatihan kepemimpinan bagi kader muda perempuan. Dalam melaksanakan program, Fatayat NU menghadapi berbagai tantangan.

---

<sup>107</sup> Nikmatul Basroh, *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)* (Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.).

<sup>108</sup> Imam Sutrisno, *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.)

Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun jumlah kader yang terlibat aktif. Selain itu, minimnya komunikasi dan dukungan dari instansi pemerintah, seperti Bakesbangpol, juga menjadi tantangan yang signifikan.<sup>109</sup>

Dengan adanya Dewan Masjid Indonesia (DMI) keterkaitan dengan bakesbangpol bagian dari stake holder tugasnya mengawal proses memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Sebagai infrastruktur tatanan bernegara, maka DMI ini termasuk dalam Ormas Keagamaan. Hubungan antara bakesbangpol adalah tugas untuk pendekatan kepada stake holder, karena bagian dari masyarakat. Secara otomatis sebenarnya Ormas yang ada di kabupaten jember salah satunya DMI yang tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia tentu memiliki hubungan keterkaitan dalam konteks salah satunya adalah asas negara Pancasila, kedua menjaga keseimbangan bhinneka tunggal ika atau kebhinekaan, yang ketiga bagaimana NKRI ini bisa terwujud bisa kondusif dan berjalan secara stabil.<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember, terungkap bahwa komunikasi dengan Bakesbangpol telah lama terhenti. IKADI menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada informasi atau arahan yang diterima dari Bakesbangpol selain kewajiban untuk melaporkan keberadaan organisasi dan mengurus

<sup>109</sup> Nurul Hidayah, *Fatayat NU Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

<sup>110</sup> Hawari Hamim, *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

perpanjangan izin. Hubungan yang terbatas hanya pada aspek administratif ini membuat IKADI merasa kurang mendapatkan perhatian dalam pembinaan dari pemerintah daerah.

Meski demikian, IKADI tetap melaksanakan berbagai program rutin yang telah berjalan sejak lama, seperti kegiatan pengajian, pelatihan untuk dai, dan pembinaan masjid. Program-program ini dilakukan secara mandiri tanpa adanya dukungan atau komunikasi intensif dengan Bakesbangpol. IKADI juga menyoroti pentingnya keterlibatan lebih aktif dari Bakesbangpol dalam memberikan arahan atau dukungan terhadap aktivitas Ormas Islam di Jember.

Minimnya komunikasi ini menjadi tantangan internal bagi IKADI untuk terus berkembang dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas dai dan layanan keagamaan di masyarakat. IKADI berharap ke depan akan ada koordinasi yang lebih baik dengan Bakesbangpol, baik melalui forum diskusi, pelatihan bersama, maupun program kolaborasi yang mendukung keberlanjutan organisasi secara lebih sistematis.<sup>111</sup>

#### **4. Harapan dan Rekomendasi untuk Pengembangan Komunikasi Ormas Islam dengan Pemerintah Daerah**

Sub bab ini merangkum harapan dari pihak Ormas Islam terhadap Bakesbangpol. Berdasarkan hasil wawancara, terhadap keinginan agar Bakesbangpol lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan mengundang Ormas dalam forum-forum resmi yang bisa menjadi wadah diskusi dan

---

<sup>111</sup> Neman Agustono, *Ketua Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024.)

penyampaian aspirasi. Selama ini, Ormas belum ada ruang yang cukup untuk mereka dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.

KBPII mengharapkan adanya dialog yang lebih intensif dan partisipasi dalam program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sementara itu, Wahidiyah menekankan pentingnya fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan mereka, terutama yang berskala besar seperti Nisfu Sanah dan Rubu' Sanah yang melibatkan ribuan pengamal sholawat.

Harapan besar disampaikan oleh ABI kepada BAKESBANGPOL untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan dukungan terhadap Ormas-ormas yang terdaftar, termasuk ABI. Selama ini, ABI merasa belum ada keterbukaan informasi dari pihak BAKESBANGPOL mengenai program atau dukungan apa yang bisa diberikan kepada Ormas yang minoritas serta masih berkembang secara kemasyarakatan. Mereka berharap, adanya pembinaan yang rutin akan membantu ABI dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan memperluas pengaruhnya di masyarakat.

Selain itu, ABI juga menginginkan adanya ruang dialog yang lebih terbuka antara Ormas dan Pemerintah daerah. Selama ini komunikasi terjadi hanya bersifat satu arah, dengan Ormas yang harus aktif mencari informasi atau bantuan. Keberadaan forum dialog yang rutin, misalnya setiap tahun, akan membantu Ormas seperti ABI untuk menyampaikan

aspirasi dan kebutuhan mereka, serta menerima masukan dari pemerintah daerah terkait program pengembangan Ormas.

Ormas Islam Salimah berharap dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Bakesbangpol untuk mendukung keberlanjutan program-program pemberdayaan yang dijalankan. Ormas ini menilai bahwa dukungan Bakesbangpol sangat penting, terutama dalam penyediaan pelatihan, peningkatan kapasitas dan sinergi program ketahanan ekonomi. Dengan adanya pembinaan dari Bakesbangpol, Salimah berharap dapat lebih berdampak pada seluruh lapisan masyarakat dan memperluas jangkauan manfaat program-program mereka.

Sebagai rekomendasi, Salimah mengusulkan adanya sistem komunikasi yang lebih terbuka, baik melalui forum dialog reguler maupun sosialisasi langsung untuk menyampaikan prosedur dan peluang Kerjasama yang tersedia. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dan pendampingan anak sangat sesuai dengan program ketahanan ekonomi dan sosial yang dicanangkan oleh Bakesbangpol sehingga sinergi ini diharapkan bisa memberi manfaat yang signifikan bagi komunitas yang dilayani Salimah.<sup>112</sup>

Menurut Ormas keagamaan Shiddiqiyah Sebagian dari upaya mempererat hubungan antarkomunitas keagamaan, harapan besar ditujukan kepada Bakesbangpol Kab. Jember untuk mengadakan pembinaan yang bersifat inklusif dan berkesinambungan. Dalam hal ini,

---

<sup>112</sup> Nikmatul Basroh, *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)* (Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.).

Shiddiqiyah menyatakan kesediaannya untuk aktif mengikuti kegiatan dan bergabung dalam forum atau perkumpulan Ormas Islam yang berada di bawah naungan Bakesbangpol. Kesiadaan ini mencerminkan komitmen Shiddiqiyah untuk memperkuat persatuan dan kerja sama di antar sesama umat Islam.<sup>113</sup>

Adapun Ormas Keagamaan Fatayat NU yang memiliki harapan besar agar komunikasi antara Ormas Islam dengan daerah, khususnya melalui Bakesbangpol, dapat lebih intensif dan terarah. Pihak Fatayat NU menekankan pentingnya membangun hubungan yang bersifat dua arah sehingga tidak hanya proses administrasi yang berjalan, tetapi juga tercipta dialog yang mendalam terkait isu-isu strategis yang dihadapi Ormas Islam. Fatayat NU merekomendasikan agar Bakesbangpol Kabupaten Jember mengadakan forum rutin yang melibatkan Ormas Islam untuk membahas perencanaan dan evaluasi program bersama. Selain itu peningkatan kapasitas komunikasi melalui pelatihan-pelatihan juga dinilai perlu agar setiap Ormas mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat.<sup>114</sup>

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bakesbangpol itu jangan hanya menjalankan tupoksinya yang begitu saja, justru perlu satu pendekatan kepada stakeholder, kepada institusi yang lain seperti pendidikan mulai dari dasar sampai pendidikan tinggi. Hal tersebut perlu

---

<sup>113</sup> Imam Sutrisno, *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.)

<sup>114</sup> Nurul Hidayah, *Fatayat NU Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

dijalin, disentuh mulai membantu pendidikan, merumuskan bagaimana seharusnya konsep-konsep pendidikan kedepan agar anak-anak punya wawasan kebangsaan. Mungkin ini akan lebih dikaitkan dengan proses pengenalan sejarah.<sup>115</sup>

Ormas Islam di Kabupaten Jember, termasuk Ikatan Dai Indonesia (IKADI), berharap adanya perbaikan dan penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Minimnya komunikasi selama ini menjadi hambatan dalam menjalin koordinasi yang efektif, sehingga banyak potensi yang dimiliki oleh Ormas Islam tidak dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan proaktif dari pihak Bakesbangpol untuk menjembatani komunikasi dengan Ormas Islam. Beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi penyelenggaraan forum diskusi berkala yang melibatkan seluruh Ormas Islam untuk mendengarkan aspirasi, membahas tantangan yang dihadapi, serta merancang program kerja bersama. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan teknis dan fasilitas untuk pengembangan program keagamaan, pelatihan, dan pembinaan organisasi.

Adanya platform digital atau saluran komunikasi khusus juga dinilai penting untuk memperlancar distribusi informasi dan mempercepat proses koordinasi. IKADI menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih

---

<sup>115</sup> Hawari Hamim, *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

erat antara pemerintah dan Ormas Islam, bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga dalam penyelenggaraan kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, komunikasi yang baik antara Ormas Islam dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam membangun harmoni dan keberlanjutan di Kabupaten Jember.<sup>116</sup>

Selain itu, evaluasi tahunan yang melibatkan Ormas Islam secara aktif diharapkan bisa menjadi jembatan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan Ormas, sehingga hubungan tersebut dapat berjalan harmonis dan saling mendukung.

#### **5. Analisis Kebijakan dan Implementasi Bakesbangpol Dalam Pembinaan Ormas**

Pada sub bab ini, akan dianalisis kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh Bakesbangpol dalam membina Ormas, serta seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pelaksanaan program pembinaan.

Beberapa Ormas seperti KBPII menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima anggaran dari pemerintah daerah, meskipun Bakesbangpol seharusnya memiliki program pembinaan yang ditujukan untuk Ormas. Program pembinaan yang ada saat ini hanya sebatas pada

---

<sup>116</sup> Neman Agustono, *Ketua Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024.)

kegiatan-kegiatan tertentu seperti sosialisasi Pilpres yang tidak dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan Ormas dalam menjalankan program dakwah dan sosial mereka.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ABI, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BAKESBANGPOL dalam pembinaan Ormas Islam di Jember belum berjalan secara optimal. Hingga saat ini, ABI belum pernah menerima undangan untuk pembinaan atau dialog dari BAKESBANGPOL. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan Ormas Islam

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembinaan Ormas adalah kurangnya transparansi dan komunikasi dari BAKESBANGPOL. Ormas seperti ABI merasa bahwa informasi mengenai program-program pembinaan dan pemberdayaan sangat minim, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pemerintah daerah.

Di sisi lain, ABI juga belum secara formal mengajukan permintaan atau proposal kepada BAKESBANGPOL untuk mendapatkan dukungan. Ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya dari kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dalam program-program yang dapat membantu pengembangan Ormas di Kabupaten Jember.

Kebijakan Bakesbangpol dalam pembinaan Ormas Islam termasuk Salimah, belum dirasakan secara optimal. Hingga saat ini, Salimah di

Jember belum mendapatkan bimbingan formal dari Bakesbangpol dan tidak memiliki akses yang jelas terhadap informasi terkait bantuan atau program pembinaan yang tersedia. Meski Salimah memiliki banyak program yang relevan dengan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kurangnya panduan mengenai prosedur akses ke Bakesbangpol menjadi hambatan dalam pengembangan Ormas ini.

Diperlukan langkah-langkah proaktif dari Bakesbangpol untuk memberikan akses informasi yang lebih baik dan membangun program pembinaan yang melibatkan Ormas seperti Salimah. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan dukungan yang terarah diharapkan Ormas seperti Salimah dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>117</sup>

Menurut Ormas Keagamaan Shiddiqiyah belum pernah mendapatkan pembinaan. Sedangkan dari pihak Shiddiqiyah selalu memberitakan terkait kegiatan yang diadakan, baik itu donasi, santunan sosial. Terbaru ini bapak bupati hadir pada program rumah layak huni, dari pihak Bakesbangpol juga hadir.<sup>118</sup>

Bakesbangpol Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam membina ormas keagamaan seperti Fatayat NU, terutama melalui

---

<sup>117</sup> Nikmatul Basroh, *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)* (Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.).

<sup>118</sup> Imam Sutrisno, *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.)

pendampingan administratif dan pengelolaan legalitas. Namun, interaksi antara Bakesbangpol dan Fatayat NU dinilai terbatas, terutama sejak pencatatan terakhir pada tahun 2022. Fatayat NU berharap pembinaan tidak hanya fokus pada legalitas, tetapi juga meliputi dukungan strategis seperti pelatihan, penguatan kapasitas SDM, dan dialog rutin untuk membahas tantangan Ormas. Bakesbangpol telah menginisiasi program penguatan kerukunan umat beragama, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan sesuai dengan kebutuhan Ormas. Dengan evaluasi kebijakan, Bakesbangpol diharapkan dapat menjadi mitra strategis yang lebih optimal bagi Fatayat NU.<sup>119</sup>

Dari Dewan Masjid Indonesia menjelaskan mengenai Bakesbangpol relatif hanya fungsinya sebagai pelengkap, sebagai alat komunikasi, dalam konteks bantuan tidak menyentuh sama sekali tidak ada efeknya. Tetapi sifatnya disitu hanya pembinaan karena yang dibina tidak hanya DMI saja, melainkan ada ormas lain seperti Fatayat NU, Ikadi dan lainnya artinya ini harusnya Bakesbangpol harus menjadi payung besar Ormas jangan hanya LSM yang dekat, kelompok tertentu yang sering diundang dengan alasan faktor anggaran. Sedangkan pihak ormas DMI tidak perlu pemerintah memberikan porsi yang cukup karena yang dibina manusia.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Nurul Hidayah, *Fatayat NU Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

<sup>120</sup> Hawari Hamim, *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 30 Desember 2024.)

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Banyak Ormas Islam, seperti Ikatan Dai Indonesia (IKADI) melaporkan minimnya komunikasi dan interaksi langsung dengan Bakesbangpol. Aktivitas Bakesbangpol lebih berfokus pada aspek administratif, seperti pencatatan keberadaan Ormas dan penerbitan izin perpanjangan, tanpa adanya tindak lanjut berupa dialog konstruktif atau pendampingan program.<sup>121</sup>

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki hubungan antara Bakesbangpol dan Ormas sehingga program-program yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

#### **6. Regulasi dan Kerja Sama Antara Bakesbangpol dan Ormas Besar di Kabupaten Jember**

Regulasi dan Kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dengan organisasi kemasyarakatan (oemas) besar di Kabupaten Jember, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, merupakan salah satu bentuk interaksi yang relevan dalam upaya mendukung stabilitas sosial dan menjaga harmoni masyarakat. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, tidak terdapat bentuk peraturan khusus atau kerja sama formal yang secara langsung mengatur hubungan antara Bakesbangpol dan ormas-ormas besar tersebut.

---

<sup>121</sup> Neman Agustono, *Ketua Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember* (Jember : diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024.)

Walaupun demikian, bentuk kerja sama yang pernah terjalin antara Bakesbangpol dan ormas-ormas tersebut lebih banyak diwujudkan dalam format kolaborasi kegiatan. Kolaborasi ini didasarkan pada prinsip sinergi, di mana kegiatan yang dirancang oleh organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya hubungan saling mendukung dan memperkuat agenda bersama, terutama dalam bidang sosial, keagamaan, dan pengembangan masyarakat.

Sebagai contoh dalam kegiatan yang melibatkan nilai-nilai kebersamaan dan penguatan kerukunan antarumat beragama, tokoh-tokoh dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad turut berkomunikasi secara signifikan. Tidak hanya melalui keikutsertaan mereka dalam program-program tersebut, tetapi juga melalui keterlibatan mereka dalam struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember. FKUB merupakan wadah strategis yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga harmoni dan dialog lintas agama di tingkat kabupaten. Kehadiran para tokoh Ormas dalam FKUB memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi forum tersebut.

Lebih jauh, kolaborasi yang terjadi antara Bakesbangpol dan Ormas-ormas besar ini mencerminkan pentingnya pendekatan inklusif dalam menyikapi tantangan sosial di masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di tingkat akar rumput, Bakesbangpol mampu memperluas jangkauan

program-programnya dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Meskipun kerja sama ini tidak diatur secara formal dalam regulasi yang spesifik, namun pendekatan berbasis kolaborasi ini menjadi salah satu upaya nyata untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga stabilitas di Kabupaten Jember.

Sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan lokal. Bakesbangpol memiliki peluang besar untuk terus memperkuat hubungan dengan Ormas-ormas besar ini. Pendekatan partisipatif, penghormatan terhadap otonomi ormas, dan pengembangan agenda bersama yang berkelanjutan dapat menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih kokoh. Dengan demikian, sinergi antara Bakesbangpol dan Ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi masing-masing, tetapi juga kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial di Kabupaten Jember secara keseluruhan.

#### **7. Status dan Komunikasi Antara Bakesbangpol dan Ormas Islam Besar di Kabupaten Jember**

Keberadaan Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad di Kabupaten Jember merupakan salah satu elemen penting dalam struktur sosial dan keagamaan. Ketiga Ormas ini memiliki peran historis dan pengaruh yang signifikan dalam membangun tatanan masyarakat yang religious, toleran, dan dinamis. Namun, terdapat fenomena menarik terkait pencatatan resmi Ormas-ormas ini di Bakesbangpol Kabupaten Jember,

dimana hingga saat ini organisasi-organisasi tersebut tidak tercatat secara resmi dalam database Bakesbangpol.

Secara prinsip Bakesbangpol sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengelola interaksi sosial politik dan menjaga harmoni masyarakat memiliki kewenangan untuk mencatat dan memantau keadaan Ormas. pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Ormas beroperasi secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kenyataannya bahwa NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad tidak tercatat di Bakesbangpol menunjukkan adanya tantangan dalam mekanisme administratif yang berkaitan dengan pelaporan dan pencatatan Ormas.

Penting untuk dipahami bahwa ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ormas lainnya. Dengan sejarah panjang. Basis massa yang luas, dan struktur organisasi yang telah mapan, Ormas-ormas ini sering kali menjalankan kegiatannya tanpa merasa perlu melakukan pencatatan formal di Bakesbangpol. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa posisi mereka sebagai organisasi besar sudah diakui secara luas oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga kebutuhan untuk melaporkan kepengurusan dan aktivitas mereka dirasa kurang mendesak.

Meskipun demikian, Bakesbangpol tetap memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dengan ormas-ormas besar tersebut. Dalam konteks ini, Bakesbangpol hanya dapat memberikan imbauan kepada ormas-ormas tersebut untuk melaporkan kepengurusan dan aspek lain

yang terkait dengan organisasi mereka. Himbauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki data yang akurat dan terkini mengenai ormas-ormas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jember. Dengan data yang lengkap. Pemerintah dapat meningkatkan koordinasi, memitigasi potensi konflik, dan mendukung program-program yang melibatkan ormas.

Komunikasi antara Bakesbangpol dan ormas-ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad pada dasarnya sudah terjalin. Meskipun belum dalam bentuk pencatatan formal yang ideal. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui forum-forum diskusi. Kegiatan bersama, serta pelibatan tokoh-tokoh ormas dalam struktur seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pendekatan ini mencerminkan bahwa meskipun pencatatan formal belum optimal, interaksi substantif antara pemerintah dan ormas tetap berlangsung.

### **1. Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember**

**a. Penelitian,** dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh suatu organisasi atau lembaga. Masalah tersebut bisa meliputi berbagai hal. Selain itu penelitian ini juga membantu dalam pembangunan strategi komunikasi yang akan dibuat.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

Bakesbangpol, sebagai lembaga yang mendukung pemerintah dalam mensosialisasikan prinsip keterbukaan informasi publik, tidak melakukan penelitian khusus terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak bakesbangpol berpendapat bahwa sosialisasi langsung tanpa melalui proses penelitian sebelumnya sudah cukup efektif untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat memahami tujuan dan maksud dari program keterbukaan informasi publik yang diinisiasi oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember. Berdasarkan wawancara dengan Arief Rachman F, S.IP., selaku staff Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan di Bakesbangpol Kabupaten Jember, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penelitian secara khusus belum pernah dilakukan, yang sudah dilakukan adalah kegiatan-kegiatan baik itu sosialisasi/sarasehan dalam rangka Penguatan Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan dan pelatihan untuk meningkatkan peran dan sinergitas Ormas dengan pemerintah Kabupaten Jember dalam pembangunan. Saat ini Bakesbangpol tengah melaksanakan pemutakhiran data Ormas perbulan guna memverifikasi data Ormas yang tercatat”<sup>123</sup>

**b. Perencanaan,** langkah yang diambil setelah hasil penelitian (diagnosis) didapatkan. Dalam konteks ini, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan komunikasi. Oleh karena itu, perlu disusun strategi yang mencakup pemilihan sumber (komunikator),

---

<sup>123</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

perumusan pesan, pemilihan media, penentuan target (segmen), serta efek yang diinginkan.<sup>124</sup>

### 1) Komunikator

Komunikator adalah individual tau lembaga yang menyampaikan pesan berupa informasi. Komunikator yang dimaksud disini adalah PPID Bakesbangpol yang mengelola ijin keberadaan Ormas Islam di Kabupaten Jember.

### 2) Pesan

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. Pesan dapat berupa kata, lambang-lambang, isyarat, tanda-tanda atau gambar yang disampaikan. Pesan yang dimaksud disini adalah mengelola informasi. Pada saat sosialisasi dijalankan berlangsung pesan dapat berupa dorongan dan ajakan oleh komunikator kepada Ormas Islam agar mencatatkan dan mendaftarkan keberadaannya dan apabila ada informasi yang dibutuhkan dapat menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan pada website PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember.

### 3) Media

Media adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi agar hasil komunikasi dapat mencapai sasaran dan dapat dimengerti oleh penerima pesan (komunikasikan). Media yang digunakan PPID Bakesbangpol untuk mensosialisasikan

---

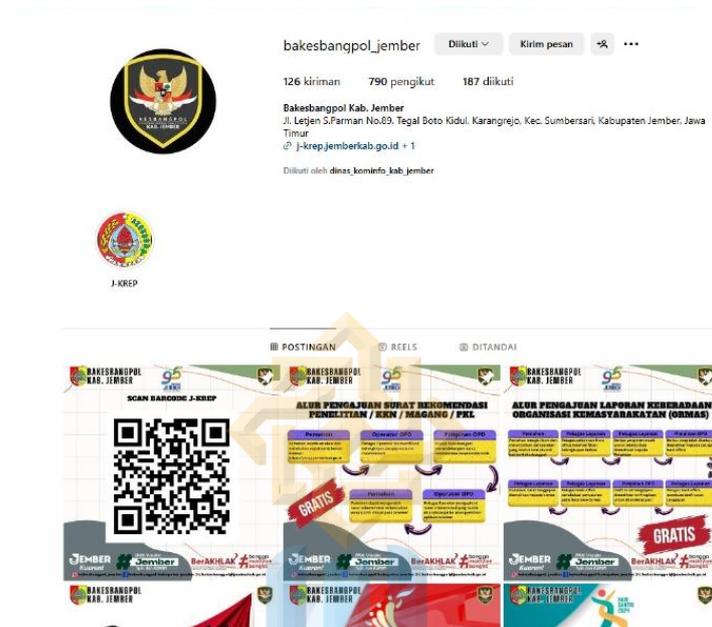
<sup>124</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78.

programnya adalah dengan media sosial yang dimiliki yaitu Instagram dan *website* PPID yang mengikuti PPID Pusat Kabupaten Jember, untuk *website* Bakesbangpol Kabupaten Jember sendiri masih dalam tahap perencanaan dan saat Bakesbangpol Kabupaten Jember tengah menggagas pemutakhiran data yang nantinya akan dituangkan dalam aplikasi data Ormas yang dibangun dengan bekerja sama dengan USAID Madani. Media sosial Instagramnya adalah *@bakesbangpol\_Jember* dan *website* PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah <https://ppid.jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/bakesbangpol>,



Gambar 4. 2

Hasil Tangkapan Layar Website PPID Pusat yang Berisi Informasi Publik Dari Bakesbangpol Kabupaten Jember



Gambar 4. 3

Hasil Tangkapan Layar Instagram @bakesbangpol\_Jember berisi tentang Informasi Publik dan juga Konten kegiatan

selain itu biasanya apabila ada suatu kegiatan juga membuat *press release* yang disebar ke berbagai media.

Adapun *website* yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Jember bernama *J-Kreb* saat ini hanya untuk pengantar Rekomendasi Surat

Penelitian saja. Untuk *website* Bakesbangpol Kabupaten Jember

sendiri bagian pengelolaan informasi untuk masyarakat Kabupaten

Jember masih direncanakan dan riset dalam membuat *website* bersama

USAID Madani. Sementara menjadi satu dengan PPID Pusat

Kabupaten Jember yang ada di Diskominfo Kabupaten Jember.

*Website* Bakesbangpol Kabupaten Jember yang dimana memiliki

beberapa pilihan pelayanan publik seperti Survei Kepuasan

Masyarakat, Buku manual, Syarat Pengajuan Surat Rekomendasi, serta

pengajuan rekomendasi penelitian ke instansi tertentu yang di tuju oleh peneliti. Website *J-Kreb* Bakesbangpol Kabupaten Jember untuk Surat Rekomendasi Penelitian untuk Instansi terkait bisa diakses di laman <https://j-krep.Jemberkab.go.id/>



Gambar 4. 4

Hasil Tangkapan Layar Website Bakesbangpol Kabupaten Jember yang berisi pengajuan rekomendasi penelitian

#### 4) Komunikasikan

Komunikasikan merujuk pada pihak yang menjadi sasaran utama dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasikan merupakan target yang diharapkan dapat dipengaruhi melalui penyampaian informasi atau pesan tertentu. Dalam konteks komunikasi, komunikasikan dapat berupa individu atau kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya sebagai audiens yang relevan.

Pada penelitian ini yang menjadi target sasaran PPID Bakesbangpol tentang mengelola informasi yaitu kepada Ormas

Islam yang telah mendaftarkan dan tercatat di PPID Bakesbangpol. Karena selama ini antara PPID Bakesbangpol dan Ormas Islam yang tercatat belum pernah mengadakan pembinaan, pemberdayaan dan pertemuan dalam satu forum untuk saling berbagi dan mengelola informasi antara satu sama lain Ormas Islam di Kabupaten Jember.

#### 5) Efek

Efek adalah perubahan yang terjadi dipihak komunikan sebagai akibat dari diterimanya pesan melalui komunikasi. efek bisa bersifat kognitif yang meliputi perasaan, emosi atau bisa juga bersifat konatif yang berupa tindakan.

Dalam kasus ini efek yang ingin dicapai PPID Bakesbangpol kepada Ormas Islam yang berada di Kabupaten Jember yaitu dapat mengelola informasi keterbukaan publik bersama baik dalam permintaan informasi maupun sebagai penunjang komunikasi dan informasi dengan masyarakat khususnya dalam konteks ini Ormas Islam yang berada di Kabupaten Jember sehingga lebih mudah mendapatkan akses informasi.

- c. **Pelaksanaan**, tahap implementasi dari perencanaan komunikasi yang sudah dirancang. Pelaksanaan ini bisa berupa penayangan program di televisi, wawancara di radio, pemasangan iklan di surat kabar, distribusi stiker kepada target audiens, pemasangan baliho atau

spanduk di tempat strategis, serta pengiriman tim penyuluh untuk berinteraksi langsung dengan komunitas dilokasi yang dituju.<sup>125</sup>

“Bakesbangpol melaksanakan himbauan yang disampaikan baik dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi, misalnya saja Ketika Bakesbangpol menjadi narasumber kegiatan akan disampaikan pula agar masyarakat yang memiliki organisasi masyarakat untuk melaporkan kepengurusannya. Ormas yang akan melakukan pencacaran di Bakesbangpol Kabupaten Jember membawa surat pengantar/permohonan yang ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol Kab. Jember dengan dilampiri beberapa persyaratan diantaranya :

- a. Fotocopy Akta Pendirian
- b. Fotocopy AD/ART
- c. Surat Keputusan tentang pengurus Kabupaten
- d. Fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
- e. Surat Keterangan domisili sekretariat dari Desa/Lurah atau sebutan lainnya
- f. Fotocopy SK Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pengesehan organisasi

Semua persyaratan dibawa ke kantor Bakesbangpol untuk mendapatkan tanda bukti melapor berupa surat korespondensi eksternal”<sup>126</sup>

**d. Pengukuran (Evaluasi)**, pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi hasil akhir dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Contohnya, untuk

mengetahui apakah media yang digunakan berhasil mencapai target audiens, apakah pesan yang disampaikan dimengerti oleh penerima, serta tindakan apa yang diambil oleh audiens setelah menerima dan memahami informasi tersebut.<sup>127</sup>

“Monitoring evaluasi yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Jember di bidang pendaftaran hingga pengawasan pada Ormas yaitu setiap permohonan yang masuk akan dipelajari sebelum diberikan surat korespondensi eksternal sedangkan untuk pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas

<sup>125</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78

<sup>126</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

<sup>127</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78

berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”<sup>128</sup>

- e. **Pelaporan**, tahap akhir dari proses perencanaan komunikasi sebaiknya, ditulis dan diberikan kepada pimpinan proyek untuk dievaluasi. Laporan dapat digunakan sebagai referensi untuk program multitalahun berikutnya jika menunjukkan hasil yang positif dan berhasil. Namun demikian, jika laporan mengandung kekurangan, temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau perubahan pada program yang akan dilaksanakan di masa mendatang.<sup>129</sup>

“Pelaporan yang dilakukan di Bakesbangpol Kabupaten Jember terhadap rencana strategis yang telah terbentuk, khususnya pada pembahasan pendaftaran, pembinaan hingga pengawasan Ormas setelah pelaksanaan kegiatan, baik itu pemberdayaan/sosialisasi/workshop/pembinaan, dll”<sup>130</sup>

## 2. Strategi Komunikasi PPID Bakesbangpol Dalam Menyikapi Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember

- a. **Faktor Pendukung** strategi komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember

<sup>128</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

<sup>129</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78

<sup>130</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

Dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember oleh PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya:

1) Faktor Internal

Dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember, ada faktor internal yang mendukung strategi komunikasi. Faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran proses mengelola informasi yang dilaksanakan. Salah satu faktor internal yang mendukung adalah melakukan penjangkaran dan pendataan Ormas secara berkelanjutan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Arief Rachman sebagai staff PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Jember.

“Emang betul, Faktor pendukung internal adalah kesadaran dari personil pada Bakesbangpol untuk turut andil dalam memberikan informasi terkait pendaftaran Ormas.”<sup>131</sup>

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung internal di lingkungan Bakesbangpol adalah tingginya kesadaran dan motivasi yang dimiliki oleh para personil. Faktor ini mendorong mereka untuk secara aktif menyediakan informasi yang berkaitan dengan proses pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Jember. Tingkat kesadaran dan semangat kerja ini menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan informasi di instansi tersebut.

<sup>131</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

## 2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merujuk pada elemen yang berasal dari luar Organisasi dan berperan penting dalam mendukung keberhasilan strategi komunikasi, khususnya dalam pengelolaan informasi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah hasil ringkasan wawancara peneliti dengan Arief Rachman, salah satu staf PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

“Faktor Eksternal yang mendukung strategi komunikasi di kantor Bakesbangpol ini ialah adanya kesadaran dari berbagai kalangan masyarakat dari Ormas tertentu yang dimana pernah mendapatkan pelayananan pendaftaran untuk turut menyampaikan kepada rekan-rekannya terkait pendaftaran Ormasnya”<sup>132</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama yang berperan penting dalam mendukung efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengelola informasi

bersama Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Jember. Faktor pertama adalah faktor internal, yang mencakup kesadaran tinggi dari personel Bakesbangpol Kabupaten Jember terhadap pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan akurat. Untuk turut memberikan informasi terkait pendaftaran Ormas serta motivasi personil agar kinerja yang didapatkan harapannya dapat maksimal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan penuh dari

---

<sup>132</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

Pemerintah Kabupaten Jember dan pihak – pihak lain yang terlibat dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.

- b. Faktor Penghambat** Strategi komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember Dalam menjalankan strategi komunikasi, PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik menghadapi berbagai hambatan dalam proses mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember. Berikut ini adalah wawancara dengan Arief Rachman

“Perlu diketahui disetiap instansi/organisasi tentunya kami memiliki berbagai masalah yang dimana terdapat penghambat salah satunya kurangnya SDM yang menangani pendaftaran Ormas serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepengurusan organisasinya.”<sup>133</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini menguraikan pemikiran peneliti mengenai hubungan antara berbagai kategori dan dimensi yang ditemukan, posisi hasil penelitian ini dalam konteks temuan-temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan, atas data yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil kajian penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi PPID Bakesbangpol dalam Mengelila Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember”. Bab ini juga memberikan analisis yang mendalam terkait efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan dan relevansinya dengan kajian serupa.

<sup>133</sup> A. Rachman, *Bidang Organisasi Kemasyarakatan* (Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat dijelaskan melalui lima tahapan utama sesuai dengan indikator teori lima tahapan komunikasi yang dikemukakan oleh Hafied Cangara dalam bukunya *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Edisi Revisi, 2014). Tahapan tersebut meliputi : Penelitian (Research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data awal; perencanaan (Plan), di mana strategi komunikasi dirancang secara sistematis; Pelaksanaan (Execute), yang melibatkan penerapan strategi di lapangan; Evaluasi (Measure), untuk menilai efektivitas pelaksanaan; serta pelaporan (Report), yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian secara menyeluruh.

### **1. Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan proses penumpukan data dan fakta mengenai audiens atau target tertentu, dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan menentukan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PPID Bakesbangpol tidak melakukan penelitian khusus terhadap masyarakat atau Organisasi

Masyarakat sebelum melaksanakan program keterbukaan informasi publik. Sebaliknya, PPID Bakesbangpol menggunakan sarasehan dan pembaruan data bulanan organisasi masyarakat untuk memverifikasi informasi yang ada sebagai upaya memberikan pemahaman langsung terkait maksud dan tujuan program keterbukaan informasi publik. Dengan metode ini, diharapkan organisasi masyarakat dapat dengan mudah

memahami dan menerima informasi yang disampaikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Namun demikian, pelaksanaan penelitian yang mendahului perencanaan strategi komunikasi tetap memegang peranan penting. Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi tentang audiens atau target yang akan disasar, guna memahami permasalahan yang dihadapi dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Meskipun sarasehan dan pembaruan data Ormas setiap bulan berfungsi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program keterbukaan informasi, penelitian yang mendalam dan terfokus akan memberikan wawasan lebih luas bagi PPID Bakesbangpol tentang kebutuhan spesifik masyarakat. Wawasan tersebut dapat membantu menyusun strategi komunikasi yang lebih ter-arah, efektif, dan efisien dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam aspek mengenai riset pengelolaan konflik, BAKESBANGPOL berperan aktif melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik dan berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tim ini bertugas memonitor potensi kerawanan sosial yang melibatkan Ormas dan merancang langkah-langkah pencegahan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi regular dengan tokoh-tokoh

Ormas, bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga harmoni dan mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Strategi pengelolaan potensi kerawanan mencakup pendekatan preventif, seperti sosialisasi kepada Ormas mengenai pentingnya menjaga stabilitas daerah. Bakesbangpol juga memfasilitasi dialog dan forum interaktif antara Ormas untuk meminimalkan gesekan yang dapat memicu konflik. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik untuk menjangkau seluruh Ormas yang tersebar di Kabupaten Jember.

## 2. Perencanaan

PPID Bakesbangpol telah merencanakan sosialisasi program keterbukaan informasi publik dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi. Metode ini sejalan dengan gagasan perencanaan yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut isi wawancara yang telah dilaksanakan, PPID Bakesbangpol menggunakan berbagai sarana komunikasi, termasuk media sosial dan media massa, untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi tentang keterbukaan informasi publik khususnya terkait pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas Islam di Kabupaten Jember. Mereka bekerja sama dengan media massa melalui website yang tergabung dalam PPID Kabupaten Jember di laman

<https://ppid.Jemberkab.go.id> di bagian Badan dan dan media sosial instagramnya @bakesbangpol\_Jember.

PPID Bakesbangpol juga berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berbagai pihak terkait melalui strategi ini. Dengan mengoptimalkan penggunaan media massa dan media sosial, mereka mampu menyebarluaskan informasi secara efektif dan mencapai audiens yang menjadi target dalam program. Rencana pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan bagi organisasi masyarakat (Ormas) yang terdaftar di Bakesbangpol pada tahun 2024 juga merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperluas cakupan sosialisasi program keterbukaan informasi publik, sehingga tujuan program dapat dicapai dengan lebih optimal.

Secara keseluruhan, Strategi perencanaan yang digunakan oleh PPID Bakesbangpol menunjukkan upaya yang baik untuk memastikan bahwa pesan tentang keterbukaan informasi publik disampaikan dengan baik kepada masyarakat, terutama Ormas Islam di Kabupaten Jember. Salah satu contoh keberhasilan Program Keterbukaan Informasi Publik mulai terciptanya komunikasi yang lebih sering antara PPID Bakesbangpol dengan para pengurus Ormas Islam yang tercatat di Kabupaten Jember. Hal tersebut merupakan kabar baik karena para Ormas Islam mulai merasa adanya kepedulian dan perhatian atas keberadaannya sehingga tidak hanya dikenal oleh jamaah dari setiap Ormas Islam saja namun juga dengan Ormas Islam yang berada diseluruh Kabupaten Jember.

### 3. Pelaksanaan

Pada tahap ini, strategi komunikasi yang telah direncanakan sebelumnya harus diterapkan. Strategi ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan rencana sebelumnya.

Cara Bakesbangpol mengatasi Ormas maupun lembaga yang belum mengetahui cara mendaftarkan keberadaannya, yaitu dengan melaksanakan himbauan yang disampaikan baik dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi, misalnya saja ketika Bakesbangpol menjadi narasumber kegiatan akan disampaikan pula agar masyarakat yang memiliki organisasi masyarakat untuk melaporkan kepengurusannya. Nantinya Ormas yang tercatat tentunya akan lebih mudah mendapatkan keterbukaan informasi publik yang memang seharusnya mereka ketahui guna untuk kepentingan kesejahteraan dan meningkatnya sumber daya manusia dalam mengembangkan organisasi masyarakatnya yang berada di Kabupaten Jember.

Sejauh ini Ormas Islam yang tercatat masih mudah dihubungi bahkan mereka bersedia seandainya rencana pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan keberadaan Ormas tersebut dijalankan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember. Karena mereka meyakini bahwa dengan bertemu dengan Ormas Islam yang berada di Kabupaten Jember lainnya dapat mempererat silaturahmi, menambah wawasan baru dan membuka perkembangan untuk kemajuan Ormas Islam di Kabupaten Jember.

Langkah-langkah yang diambil oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembinaan terhadap Ormas Islam. Berdasarkan wawancara pembinaan dimulai dengan proses **pembaruan data Ormas**, yang mencakup pencatatan keberadaan dan kepengurusan. Langkah ini diikuti oleh **verifikasi lapangan**, dimana tim BAKESBANGPOL mengunjungi Ormas untuk memastikan aktivitas mereka sesuai dengan data yang tercatat. Hasil verifikasi kemudian menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan program pembinaan yang relevan

Dalam menetapkan prioritas pembinaan, BAKESBANGPOL mengutamakan Ormas yang terdaftar dan aktif, dari sekitar 130 Ormas yang tercatat, BAKESBANGPOL mengidentifikasi sekitar 30 Ormas yang dianggap menjadi pionir untuk pembinaan lebih lanjut. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah **pelatihan pengukuran Indeks Kinerja Organisasi (IKO)**, yang dirancang untuk membantu Ormas menilai kemandirian dan stabilitas organisasi mereka. Program ini

Namun, implementasi pembinaan ini tidak terlepas dari kendala, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pelaporan aktif dari Ormas terkait aktivitas mereka. Bagian ini menekankan pentingnya standar pembinaan yang konsisten serta mekanisme evaluasi yang mendukung peningkatan kualitas Ormas. dengan pembinaan yang ter-arah, diharapkan Ormas dapat berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan stabilitas sosial dan pembangunan di Kabupaten Jember.

#### 4. Evaluasi

Salah satu tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif strategi komunikasi yang telah digunakan. Tahap ini juga akan menilai seberapa efektif strategi komunikasi dalam mengelola informasi untuk memastikan bahwa Ormas Islam di Kabupaten Jember memiliki akses ke informasi secara terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, bakesbangpol melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang pendaftaran hingga pengawasan terhadap organisasi masyarakat (Ormas). setiap permohonan yang masuk dipelajari secara mendalam sebelum diterbitkan surat korespodensi eksternal. Sementara itu, dalam aspek pengawasan Ormas, Bakesbangpol membentuk tim terpadu yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Adanya evaluasi membahas fokus isu strategis yang menjadi perhatian utama Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Ormas dalam mengelola kegiatan mereka secara mandiri dan efektif, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan masyarakat.

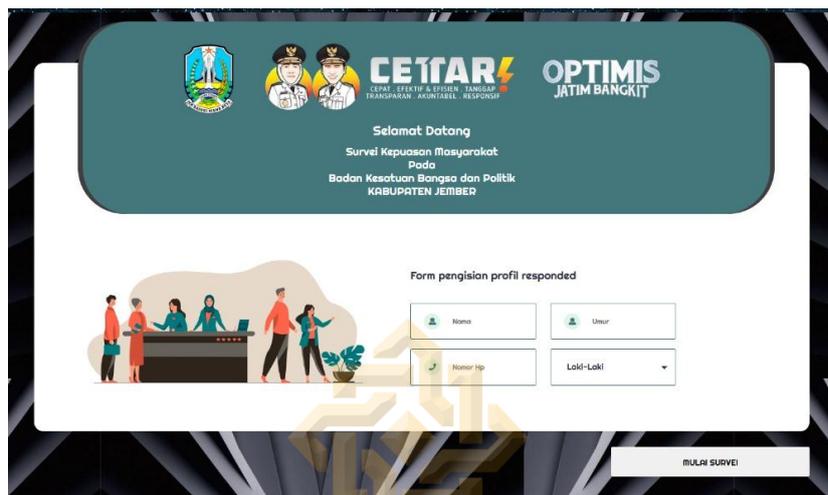
Salah satu metode yang digunakan adalah Evaluasi mandiri melalui pengukuran Indeks Kinerja Organisasi (IKO). Program ini

dirancang untuk membantu Ormas memahami tingkat kemandirian dan stabilita mereka, baik dari sisi tata kelola organisasi, keberlanjutan kegiatan, maupun pengelolaan sumber daya. Dengan mengetahui hasil evaluasi IKO, Ormas dapat mengevaluasi kelemahan dan kekuatan mereka, serta merancang strategi peningkatan kualitas secara mandiri.

Sebagai contoh dari pihak Bakesbangpol mengklarifikasi mengenai isu konflik yang tengah berlanjut antara Perguruan silat PSHT dan kepolisian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember. Tanggapan dan tindakan Bakesbangpol akan hal kasus tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka turut serta mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kondusifitas di daerah. Karena itu setiap konflik yang melibatkan Ormas, Bakesbangpol akan turut serta dalam setiap pembahasan-pembahasan yang dilakukan.

Adapun model pelayanan evaluasi yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang bersinergi dengan Pemerintah Wilayah Jawa Timur yang dimaksudkan untuk memahami persepsi masyarakat, khususnya Ormas Islam di Kabupaten Jember, terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan melalui survei kepuasan yang memanfaatkan platform *E-SUKMA Jatim* sebagai alat untuk mengumpulkan masukan dan penilaian langsung dari masyarakat. Website ini dapat diakses di laman :

<https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=652>



Gambar 4. 5

Hasil Tangkapan Layar Website E-SUKMA JATIM Layanan evaluasi bagi rakyat untuk Bakesbangpol Kabupaten Jember

Jadi apa yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Jember untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara bersinergi dengan Pemerintah Wilayah Jawa Timur bertujuan untuk :

**a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Dengan mengevaluasi pelayanan yang diberikan, BAKESBANGPOL dapat menunjukkan komitmennya untuk terbuka terhadap kritik dan saran. Hal ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Khususnya dalam pengelolaan informasi dan hubungan dengan Ormas di Kabupaten Jember.

**b. Memperbaiki Pelayanan Publik**

Hasil survei digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan. Dengan perbaikan ini, BAKESBANGPOL dapat memberikan layanan yang lebih responsive dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**c. Mengoptimalkan Frekuensi Program Pembinaan**

Frekuensi program pembinaan yang direncanakan dua kali dalam setahun dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan komunikasi dan pemberdayaan Ormas. meskipun bergantung pada anggaran daerah, program ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan Ormas, sehingga menciptakan kolaborasi yang produktif.

**d. Membangun Kepercayaan Melalui Konsistensi Program**

Dengan adanya survei yang rutin dan program pembinaan yang konsisten, sebetulnya masyarakat dapat melihat keseriusan BAKESBANGPOL dalam menjalankan perannya. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan Ormas dan Masyarakat luas terhadap pemerintah daerah.

Melalui evaluasi ini, BAKESBANGPOL berupaya tidak hanya untuk memperbaiki aspek teknis pelayanan tetapi juga memperkuat hubungan strategis antara pemerintah dan Ormas dalam rangka menciptakan kondisi sosial-politik yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Jember.

Untuk website ini sendiri disediakan juga tempat bagi masyarakat yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang pelayanan publik serta keterbukaan informasi serta berbagai pertanyaan pelayanan yang sudah dilakukan terhadap masyarakat. Tetapi di website *E-SUKMA Jatim* Hanya diwadahi sebagai penyampaian saran,

tentu untuk kritik sangat diperlukan agar pelayanan yang dilakukan tetap maksimal.

The image shows a screenshot of a web form titled "Kotak Saran" (Feedback Box). The form is titled "Form Saran" and contains two input fields: "Badan Keastuan Bangsa dan Politik" and "Kasih Saran". A "SUBMIT" button is located at the bottom right of the form. The background of the form features a stylized illustration of a person sitting on a large question mark, surrounded by other question marks and a gear-like shape.

Gambar 4. 6  
Hasil Tangkapan Layar Website E-SUKMA JATIM Form Saran bagi masyarakat.

Yang perlu dilaksanakan selanjutnya mengenai pembinaan dan pemberdayaan untuk Ormas yang berada di Kabupaten Jember. Pentingnya kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Ormas dalam meningkatkan kinerja, peran kemasyarakatan dan mensejahterahkan anggotanya. Dalam konteks ini, peran Bakesbangpol sangat penting karena sebagai wadah dalam mendapat dan menyebarkan informasi dan membantu masyarakat dalam mengikuti program-program pemerintah.

## 5. Pelaporan

Tahap akhir adalah pelaporan, yang memiliki peran penting sebagai acuan untuk pelaksanaan program-program mendatang. Proses pelaporan kegiatan dan perkembangan terkait program keterbukaan informasi publik dilakukan secara sistematis bersama Organisasi

Masyarakat Islam di Kabupaten Jember, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh yang dapat menjadi dasar untuk evaluasi serta pengembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan program-program serupa di kemudian hari.

Pelaporan yang dilakukan Bakesbangpol terhadap rencana strategis yang telah terbentuk, khususnya pada pembahasan pendaftaran, pembinaan hingga pengawasan Ormas dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan baik itu pemberdayaan, sosialisasi, workshop dan pembinaan.

Proses pelaporan yang terstruktur memungkinkan seluruh pihak terkait mulai dari masyarakat, pengurus organisasi masyarakat, hingga pemerintah daerah untuk memnatau perkembangan program keterbukaan informasi publik secara efektif. Penyusunan laporan melalui jalur yang telah ditetapkan mendukung evaluasi yang menyeluruh terhadap keberhasilan program serta menyediakan dasar yang kuat bagi pengembangan program-program serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pelaporan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak menjadi elemen penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Sistem pelaporan yang baik memungkinkan pelaksanaan program-program serupa di masa mendatang dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih optimal.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi komunikasi oleh PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mendukung keterbukaan informasi publik kepada Ormas Islam di wilayahnya telah mencakup lima tahapan komunikasi sesuai teori yang dikemukakan Hafied Cangara seperti penelitian (research), perencanaan (plan), pelaksanaan (execute), evaluasi (measure), dan pelaporan (report). Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Tahap penelitian, PPID Bakesbangpol tidak secara khusus melakukan riset mendalam sebelum menyusun strategi komunikasi, meskipun sarasehan dan pembaruan data bulanan digunakan sebagai metode untuk memverifikasi informasi dan memberikan pemahaman kepada Ormas, pendekatan ini belum sepenuhnya mencakup kebutuhan mendalam dari masyarakat dan Ormas Islam. Keterlibatan aktif tim terpadu penanganan konflik serta koordinasi dengan FKUB menjadi langkah positif untuk memitigasi potensi konflik, namun, keterbatasan sumber daya manusia dan logistic menjadi kendala dalam menjangkau semua Ormas di Kabupaten Jember
2. Tahap perencanaan, PPID Bakesbangpol telah menunjukkan penggunaan berbagai media komunikasi, baik formal maupun informal. Strategi ini melibatkan pemanfaatan media sosial, media massa, dan website resmi

PPID Kabupaten Jember. Selain itu, program pembinaan dan pemberdayaan Ormas yang direncanakan untuk tahun mendatang mencerminkan upaya untuk menjangkau lebih banyak pihak dan memperkuat sinergi antar Ormas. meski demikian, efektivitas penyampaian informasi masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tahap pelaksanaan, PPID Bakesbangpol melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan melalui forum-forum resmi maupun interaksi langsung dengan Ormas. verifikasi data lapangan dan pelatihan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) menjadi langkah kongkret untuk memperkuat kapasitas Ormas. Namun, kendala seperti minimnya pelaporan dari ormas dan keterbatasan anggaran sering menghambat pelaksanaan program secara optimal. Upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik antar Ormas dan antara pemerintah dengan Ormas menjadi langkah strategis untuk mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

4. Tahap evaluasi, PPID Bakesbangpol telah menerapkan mekanisme monitoring dan pengawasan yang sesuai dengan regulasi, seperti Permendagri Nomor 56 tahun 2017. Program evaluasi melalui IKO memberikan alat bagi Ormas untuk menilai kemandirian dan stabilitas mereka, sehingga dapat memperbaiki kelemahan secara mandiri. Survei kepuasan masyarakat melalui platform E-SUKMA Jatim juga menjadi

salah satu bentuk evaluasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan transparansi dalam menangani isu strategis, termasuk konflik antar Ormas, guna memperkuat peran Ormas dalam mendukung keterbukaan informasi.

5. Tahap pelaporan, memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik, memberikan acuan untuk perencanaan program dimasa mendatang. Pelaporan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap keberhasilan program keterbukaan informasi publik, sekaligus memberikan dasar yang kokoh untuk meningkatkan efektivitas program-program serupa dimasa depan.

Faktor pendukung internal mencakup tingginya kesadaran dan motivasi personel Bakesbangpol yang aktif dalam menyediakan informasi terkait pendaftaran Ormas. faktor eksternal melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, khususnya Ormas yang telah memperoleh layanan, untuk turut menyebarkan informasi terkait prosedur pendaftaran. Di sisi lain, faktor penghambat utama yang dihadapi meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani proses pendaftaran dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepengurusan Ormas secara berkala.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang diterapkan oleh PPID Bakesbangpol Kabupaten Jember menunjukkan potensi besar untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Namun, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pada setiap tahapan komunikasi, mulai dari penelitian

hingga pelaporan, agar strategi yang diterapkan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dimasa mendatang, sekaligus meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah dan Ormas Islam di Kabupaten Jember.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu kepada pihak akademisi dan Pimpinan serta pegawai/staff yang ada di sektor Pemerintahan Kabupaten Jember khususnya di lembaga Bakesbangpol Kabupaten Jember setelah peneliti memaparkan kesimpulan di atas. Berikut penjelasan atas saran yang di berikan :

### **1. Untuk tenaga pendidik/pengajar dan sivitas akademisi**

Peneliti menyarankan agar tenaga pendidik, pengajar, dan sivitas akademisi memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu di bidang strategi komunikasi pemerintahan dalam berbagai lingkup, seperti sosial-politik, sosial-budaya, sosial-ekonomi, globalisasi, keterbukaan informasi, serta agama. Kajian terhadap isu-isu tersebut dinilai menarik dan relevan untuk dieksplorasi lebih mendalam dalam lingkup akademik sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

### **2. Bagi Pimpinan dan Pegawai/Staff Pemerintah Kabupaten Jember**

Peneliti menyarankan kepada pimpinan, pegawai dan staf di sektor pemerintahan, khususnya di Bakesbangpol Kabupaten Jember, untuk

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan budaya dalam setiap aktivitas. Nilai-nilai tersebut penting untuk memperkuat integritas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelayanan publik, mengingat pemimpin adalah representasi utama dari citra pemerintahan. Sikap terbuka terhadap masyarakat harus menjadi prioritas, sehingga berbagai lapisan masyarakat tidak dibiarkan berada dalam ketidaktahuan terhadap berbagai informasi dan program pemerintah. Strategi komunikasi yang lebih proaktif, seperti pendekatan jemput bola, juga sebaiknya diterapkan, karena tidak semua masyarakat memahami program kerja pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan Islam di Kabupaten Jember yang dikelola oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember.

### 3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti berharap agar penelitian di masa mendatang dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas terkait kajian strategi komunikasi, agama, dan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachman. *Bidang Organisasi Kemasyarakatan*. Jember: diwawancara oleh penulis 1 Oktober 2024, 2024.
- Agama, Kementerian. *Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemah"*, 2019.
- Agustono Neman. *Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember*. Jember: Diwawancara oleh penulis 31 Desember 2024
- Ali Marzuki, Mohammad. "Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI Dalam Mewujudkan Zero Permohonan Informasi Publik Melalui Akun Instagram @ppid.Dprri," 2023.
- Alo Liliweri. *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta: Yogyakarta, LKiS Group, 2011.
- Amin, Vesel. *Sekretaris Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember*. Jember: diwawancara oleh penulis, n.d.
- Anwar Arifin. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Aslam Hosen. "STRATEGI KOMUNIKASI KELOMPOK MINORITAS TERHADAP KELOMPOK MAYORITAS: STUDI KASUS PADA KOMUNITAS SYIAH DI YAYASAN AL-HUJJAH KELURAHAN KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER," 2023. [http://digilib.uinkhas.ac.id/30885/1/Aslam Hosen\\_D20181110.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/30885/1/Aslam_Hosen_D20181110.pdf).
- Asriadi. "Komunikasi Efektif Dalam Organisasi." *Http://Journal.Iainsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Retorika* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i3.318>.
- Basroh, Nikmatul. "SELAYANG PANDANG SALIMAH 2023." Jember: Diwawancara oleh penulis 26 Juli 2024, n.d.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Cangara, Hafied. *Buku Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dkk, Suardi Wekke Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Fahmi, Nurul, and Baihaqi. "Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan

- Informasi Publik Di Aceh Barat.” *At-Tanzir*, n.d., 87–103.
- Febriani, Diah Lastri, and Reni Juliani. “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat.” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2022, 19–38. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970>.
- Fred R. David. *Strategic Management Konsep*. Edited by Papuli Wuriarti. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Hadits, Quran. “Tafsir Al-Jalalain Ali Imran Ayat 104,” n.d. <https://quranhadits.com/quran/3-ali-imran/ali-imran-ayat-104/>.
- Hakim, Syaiful. “Yusril Tegaskan HTI Bukan Organisasi Terlarang,” 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/764381/yusril-tegaskan-hti-bukan-organisasi-terlarang>.
- Harjani Hefni. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Jakarta, Kencana, 2019.
- Hamim Hawari. *Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jember*. Jember: diwawancarai oleh penulis 30 Desember 2024.
- Hidayah Nurul. *Ketua Fatayat NU Kabupaten Jember*. Jember: Diwawancarai oleh penulis 30 Desember 2024.
- Hilman, Hilman. “Peran Komunikasi Ppid Propinsi Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik.” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (2020): 117–24. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.686>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jember, Diskominfo. “Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Jember Tahun 2022,” 2022, 1–40.
- Kanu, Zevriyn Boy Hendra. “LBH Cahaya Keadilan Rakyat (CAKRA),” n.d. <https://www.jawapos.com/jabodetabek/01303740/berkenalan-dengan-lbh-cakra-yang-beri-bantuan-hukum-gratis>.
- Katsir, Tafsir Ibnu. (*Tafsir Surat Ali Imran, Ayat 104-109*), n.d. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-104-109.html>.
- Khairul. *Ketua Pemuda Hidayatullah Jember*. Jember: diwawancara oleh penulis 19 Juli 2024, n.d.
- Khotimah, Husnul. “Strategi Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan,” 2023.

<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/11722>.

Kominfo PPID *Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008*. Diakses pada 28 Desember 2024.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

Kun Wazis, Nasir M. Ali. “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Menjaga Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember,” n.d.

Lamidi. *Sekretaris DPD Jamaah Ahlul Bait (ABI) Indonesia Kabupaten Jember*. Jember: diwawancara oleh penulis 24 Juli 2024, 2024.

“LBH Cahaya Keadilan Rakyat (CAKRA),” n.d.  
<https://forumnusantaranews.com/lbh-cakra-peringati-ulang-tahun-ke-3/>.

Madani, Habilis Indonesia. “Team IT Habilis Indonesia Madani,” n.d.  
<http://habilisindonesiamadani.id/>.

Mahfuda, Ahmad Nur. *Sekretaris Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KB PII Kabupaten Jember*. Jember: diwawancara oleh penulis 20 Juli 2024, n.d.

Mandak, Novriyanto Wartabone, Ronny Gosal, and Donald K. Monintja. “Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. Mi (2022): 5–24.

Mawi Khusni Albar, Agus Sunaryo, Supriyanto. *Visi KeIslaman Dan Kebangsaan (Ormas Keagamaan Di Indonesia)*. Edited by Kang Emha. Jawa Tengah, Rizquna, 2022.

Muhammad, Zunus. “Ormas Di Kabupaten Jember Berharap HTI Dibubarkan.” 18 may 2016, 2016. <https://nu.or.id/daerah/Ormas-di-Jember-berharap-hti-dibubarkan-OHULO>.

Mujito. *Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Jember*. Jember: diwawancara oleh penulis 22 Juli 2024, n.d.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mursyid. “Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” 2021.

Nikmatul, Basroh. *Ketua Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)*. Jember: Diwawancara Oleh Penulis 26 Juli 2024, n.d.

Nurudin. *Ilmu Komunikasi Ilmiah Dan Populer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2016.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*, 2023.

“Peraturan Bupati Jember (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember).” Jember, 2022. <https://ppid.Jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/bakesbangpol>.

Prof. Sukardi, Ph.D. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 14th ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Rachman, Arief. *Bidang Organisasi Kemasyarakatan*. Jember: diwawancara oleh penulis 6 Mei 2024, 2024.

———. *Bidang Organisasi Kemasyarakatan*. Jember: diwawancara oleh penulis 7 Juni 2024, 2024.

Ramadhan, Dida Rizki, and Gun Gun Gumilar. “Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Karawang” 6, no. 2 (2022): 361. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.361-367>.

Rangkuti, Putri Anggria Ningsih, and Rubino Rubino. “Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menjalin Kerukunan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Binjai.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3573–81. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1255>.

Riinawati. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019.

Rosiyana, D, M Setyaningrum, and Ismail “Analisis Peran Komunikasi Dalam Membentuk Citra Organisasi Islam Dalam Era Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI) Vol.1, No.4* 1, no. 4 (2023).

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Saputra, Andi. “Ahli: Pembubaran HTI Tidak Langgar HAM Dan UUD 1945.” 19 Juli, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3566240/ahli-pembubaran-hti-tidak-langgar-ham-dan-uud-1945>.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*. Volume 2. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Suci Hermiken. “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan.” *Lppmstianusa.Com* 4, no. 1 (2022): 1–10. <http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/550%0Ahttp://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/550/342>.

- Sudaryono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 27th ed. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sumper Mulia Harahap, Juni Wati Sri Rizki, Esli Zuraidah Siregar. *Strategi Komunikasi Organisasi. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*. Vol. Volume 2, 2022.
- Sutaryo. “Ruang Lingkup Komunikasi,” no. 1957 (2021): 38-.
- Sutrisno Imam. *Ketua Organisasi Shiddiqiyah Kabupaten Jember*. Jember: Diwawancara oleh penulis 1 Januari 2025.
- Uchajana Effendy, Onong. *Buku Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Uchjana Effendy, Onong. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Wahidiyah, Ormas. “Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Jember.” Jember, n.d. <https://wahidiyah.org/organisasi-penyiar-sholawat-wahidiyah/>.
- Wazis, Kun. *Komunikasi Massa Kajian Teoritis Dan Empiris. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember Press (Anggota IKAPI)*. Vol. 7, 2022.
- . “Strategi Komunikasi Dalam Persaingan Media Massa Lokal: Studi Kasus Anjloknya Konsumen Koran Jawa Pos Radar Jember.” *Tren Pola Konsumsi Media Di Indonesia Tahun 2017*, 2017, 40.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arraflian Rachmansyah Nachranic

NIM : 204103010011

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Desember 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**ARRAFLIAN RACHMANSYAH N**

**NIM. 204103010011**

**MATRIK PENELITIAN**

JUDUL	KONTEKS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember	Aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan seorang pemimpin dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat adalah elemen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Maka diperlukannya akses pelayanan yang baik sesuai dengan diamanatkannya UU Keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 yang dimana masyarakat memiliki hak untuk menerima atau mendapatkan informasi publik yang lebih optimal dalam mengawasi semua hal berkaitan dengan kepentingan publik. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana Keterbukaan publik serta pembinaan yang diberikan oleh Bakesbangpol terhadap Ormas Islam di Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Strategi komunikasi</li> <li>2. Media Komunikasi</li> <li>3. Respon masyarakat/Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Hafied Cangara</li> <li>2. Menurut Fred R. David</li> <li>3. Menurut Effendy Ucjana</li> <li>4. Menurut Harold Laswell</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian : Deskriptif</li> <li>2. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol>               Teknik Analisis Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan Data</li> <li>b. Reduksi Data</li> <li>c. Display Data</li> <li>d. Verifikasi Data</li> </ol>               Uji Keabsahan Data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi Sumber</li> <li>b. Triangulasi Metode</li> <li>c. Triangulasi teori</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik (BAKESBANGPOL) dalam mengelola informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember menghadapi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan informasi bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember?</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Ormas Islam di Jember Tercatat di Bakesbangpol :

### 1. Pertanyaan Pembuka

- Pertanyaan Latar Belakang
  1. Apakah bisa menceritakan mengenai seperti apa latar belakang Ormas yang sedang dikelola? (Sebutkan berdasarkan Visi Misi & Tujuan)
  2. Apa harapan kedepan untuk kemajuan keterbukaan informasi BAKESBANGPOL terhadap Ormas yang sedang dikelola?
  3. Apakah dari pihak Ormas ada Evaluasi Kinerja setiap bulannya ?
  4. Berasal dari mana aja anggota Ormas yang terlibat ?
  5. Apa yang membuat anggota tertarik masuk kedalam Ormas ini?
- Awal mula pembentukan Ormas
  1. Kapan awal mula dibentuknya Ormas yang sedang dikelola dan bagaimana sejarah pembentukannya?
  2. Seperti apa perkembangan Ormas saat ini yang sedang dikelola?
  3. Seperti apa Harapan Ormas kedepannya setelah Mencatatkan diri sebagai anggota pembinaan lembaga BAKESBANGPOL?
  4. Informasi apa saja yang diberikan BAKESBANGPOL kepada Ormas yang sudah dikelola hingga saat ini ?
  5. Apakah dari pihak Ormas selama ini pernah mengajukan permintaan informasi kepada lembaga BAKESBANGPOL?
  6. Apakah ada alasan jika tidak mengajukan permintaan informasi kepada pihak lembaga BAKESBANGPOL?

### 2. Pertanyaan Utama

- Proses Strategi Komunikasi

1. Kapan terakhir kali pihak Ormas mengunjungi atau berkomunikasi dengan lembaga BAKESBANGPOL?
  2. Jika pernah berkomunikasi kepada pihak BAKESBANGPOL, Apa saja pembahasan komunikasi yang sudah dilakukan?
  3. Apakah ada harapan kedepan mengenai Ormas sebagai pelaku pembinaan dari pengelolaan informasi lembaga BAKESBANGPOL ini?
  4. Dari adanya website PPID BAKESBANGPOL, apakah pernah Ormas mendapatkan sosialisasi atas keberadaan website tersebut?
  5. Apa upaya dari Ormas untuk mengembangkan Ormas dengan adanya keberadaan BAKESBANGPOL ? apakah lembaga tersebut punya pengaruh besar terhadap keberadaan Ormas?
  6. Bagaimana cara proses Ormas mendaftarkan lembaganya kepada BAKESBANGPOL ? apakah ada faktor dan penghambat dan pendukungnya?
- Bentuk Strategi Komunikasi
    1. Apakah setiap agenda Ormas dilaporkan terhadap BAKESBANGPOL ? Jika tidak alasannya apa?
    2. Seperti apa kendala dalam pengelolaan Ormas? (Disebutkan faktor penghambat dan pendukung berkembangnya Ormas)
    3. Bagaimana bentuk bentuk pembinaan dan pemberdayaan BAKESBANGPOL kepada Ormas?
    4. Apa dampak yang diterima dari adanya pembinaan dan pemberdayaan BAKESBANGPOL terhadap Ormas ?
    5. Melalui apa BAKESBANGPOL Menginformasikan adanya agenda pembinaan dan pemberdayaan terhadap Ormas?
  - Pertanyaan Tambahan
    1. Menurut opini pribadi pengurus Ormas, Anggota Ormas, Dll
      - Seperti apa pendapat pribadi anda mengenai keberadaan lembaga BAKESBANGPOL untuk Ormas?

- Apakah anda merasa ada peran di Lembaga BAKESBANGPOL mengenai pembinaan terhadap Ormas?
2. Pengalaman yang dialami pribadi pengurus Ormas, Anggota Ormas, Dll
    - Pengalaman pribadi mengenai bagaimana respon dari adanya web pengelolaan informasi yang dinaungi PPID BAKESBANGPOL seperti apa?
    - Menurut anda, yang seharusnya tercipta dari keterbukaan informasi publik itu keterbukaan informasi yang seperti apa?
  3. Sikap Ormas terhadap Lembaga BAKESBANPOL
    - Perlu diketahui sikap Ormas terhadap Lembaga BAKESBANGPOL yang selama ini sudah membina Ormas yang ada di Kabupaten Jember itu seperti apa?

### 3. Penutup

- Apakah ada hal lain yang ingin anda sampaikan terkait penelitian ini seperti pengalaman pribadi, kritik, saran dan aspirasi Ormas sebagai pelaku dari kerja pembinaan pengelolaan informasi suatu lembaga BAKESBANGPOL ?
- Terimakasih kepada seluruh Pengurus Ormas atas waktu yang diberikan dan yang sudah berpartisipasi dalam membantu penelitian ini. Apakah anda bersedia dihubungi jika ada pertanyaan tambahan mengenai penelitian ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara terstruktur untuk Bakesbangpol dengan Judul Skripsi :

### “Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember”

Setelah membaca perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Isi dari Renstra sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan mengenai KeOrmasan. Adapun yang membahas mengenai KeOrmasan ada pada halaman 25, 46, 57, 72, 73, 126, 127, 146, 147. Dengan demikian peneliti merangkum beberapa pertanyaan dengan harapan dapat dibantu untuk menjelaskan agar peneliti dapat menjawab fokus penelitian pada skripsi yang sedang diselesaikan. Demikian disampaikan terima kasih.

#### 1. Pertanyaan Pembuka

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bakesbangpol di Kabupaten Jember?

#### 2. Pertanyaan Utama

- Proses Strategi Komunikasi
  1. Apakah Bakesbangpol pernah melakukan **penelitian** dalam menentukan masalah pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran khususnya pada pengawasan Organisasi Masyarakat?
  2. Kapan Bakesbangpol dapat mencapai **rencana** melaksanakan pemberdayaan, dan pembinaan Ormas, sebagai wadah tersampainya informasi publik yang berkaitan dengan Ormas?
  3. Apa media yang digunakan Bakesbangpol dalam penyampaian informasi publik sebagai wadah masyarakat khususnya Ormas untuk mendapatkan informasi? Website, Instagram, Forum Group Discussion (FGD)? Jelaskan
  4. Apakah akan ada sosialisasi keberadaan media website PPID Bakesbangpol untuk menunjang pengelolaan permintaan dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan Ormas?

5. Apa efek yang diharapkan Bakesbangpol terhadap Ormas dengan adanya media yang tersedia sebagai sarana untuk meminta dan mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan oleh Ormas?
6. Bagaimana tanggapan Bakesbangpol terhadap Ormas yang tidak mendaftarkan diri seperti komunitas pengajian di setiap masjid diperumahan?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan Bakesbangpol terhadap Ormas maupun lembaga Islam yang belum mendaftarkan diri?
8. Bagaimana cara untuk dapat membedakan antara Ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum?
9. Bagaimana cara Bakesbangpol mengatasi Ormas maupun lembaga yang belum mengetahui cara mendaftarkan keberadaannya? Bisa dijelaskan alur pendaftaran keberadaan Ormas ke Bakesbangpol?
10. Bagaimana monitoring evaluasi yang dilakukan Bakesbangpol di bidang pendaftaran hingga pengawasan Ormas?
11. Bagaimana pelaporan yang dilakukan Bakesbangpol terhadap rencana strategis yang telah terbentuk, khususnya pada pembahasan pendaftaran, pembinaan, hingga pengawasan Ormas?

### 3. Penutup

1. Apa sajakah **faktor pendukung** baik dari internal maupun eksternal Bakesbangpol dalam menjalankan rencana strategis dalam pengawasan keOrmasan seperti pembinaan, pendaftaran sebagai bentuk berhasilnya pengelolaan informasi publik?
2. Apa sajakah **faktor penghambat** Bakesbangpol dalam menjalankan rencana strategis dalam pengawasan keOrmasan seperti pembinaan, pendaftaran sebagai bentuk berhasilnya pengelolaan informasi publik?

## **PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM**

**Topik:** Rencana Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh BAKESBANGPOL di Kabupaten Jember Tahun 2024

1. Kategori Ormas yang Berafiliasi dengan Partai Politik. **Pertanyaan:** Bagaimana BAKESBANGPOL mengategorikan Ormas yang berafiliasi dengan partai politik? Apakah ada daftar Ormas Islam yang secara khusus berafiliasi dengan partai politik tertentu?
2. Regulasi dan Kerja Sama dengan Ormas Besar. **Pertanyaan:** Apakah BAKESBANGPOL memiliki peraturan, kerja sama, atau bentuk interaksi khusus dengan Ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan Al Irsyad yang ada di Kabupaten Jember? Bagaimana bentuk kerja sama tersebut?
3. Standar Pembinaan Ormas oleh BAKESBANGPOL. **Pertanyaan:** Apa standar atau kriteria yang digunakan oleh BAKESBANGPOL dalam melakukan pembinaan terhadap Ormas di wilayah ini nantinya?
4. Status Ormas Islam Besar (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad). **Pertanyaan:** Mengapa Ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad tidak tercatat di BAKESBANGPOL? Apakah ada komunikasi khusus dengan Ormas-ormas tersebut?
5. Survei Kepuasan Pelayanan BAKESBANGPOL. **Pertanyaan:** Apakah BAKESBANGPOL pernah melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada Ormas yang terdaftar di Kabupaten Jember?
6. Kategorisasi Potensi Kerawanan. **Pertanyaan:** Apakah BAKESBANGPOL memiliki kategorisasi atau klasifikasi potensi kerawanan yang melibatkan Ormas? Jika ya, bagaimana klasifikasi tersebut dibuat?

7. Jumlah Ormas yang akan direncanakan mengikuti pembinaan. **Pertanyaan:** Berapa jumlah Ormas yang akan di ajukan atau direncanakan pada program pembinaan di Kabupaten Jember?
8. Alasan Pemilihan Prioritas Ormas untuk Pembinaan. **Pertanyaan:** Apakah nantinya BAKESBANGPOL menetapkan prioritas pada Ormas tertentu untuk program pembinaan? Apakah pemilihan tersebut terkait dengan potensi instabilitas atau upaya memperkuat stabilitas dalam konteks keterbukaan informasi BAKESBANGPOL?
9. Dasar Adanya Program Pembinaan Ormas?. **Pertanyaan:** Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan utama BAKESBANGPOL dalam melaksanakan program pembinaan terhadap Ormas di Kabupaten Jember?
10. Frekuensi Program Pembinaan. **Pertanyaan:** Berapa kali program pembinaan ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun?
11. Isu yang Diangkat dalam Pembinaan Ormas?. **Pertanyaan:** Apakah ada isu tertentu yang menjadi fokus dalam program pembinaan ini, seperti misalnya isu tentang aliran-aliran dalam konteks isu global?
12. Pengawasan terhadap Konflik Ormas dan Kepolisian. **Pertanyaan:** Apakah konflik antara PSHT dan kepolisian yang pernah terjadi di Jember menjadi bagian dari pengawasan BAKESBANGPOL? Bagaimana tanggapan dan tindakan BAKESBANGPOL saat konflik ini menyebar luas di masyarakat?

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.

Lokasi Penelitian : Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember dan Ormas Islam di Kabupaten Jember

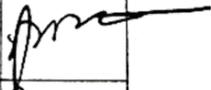
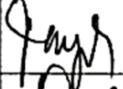
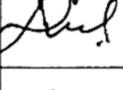
No.	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	4 Juni 2024	Meminta Surat Ijin Penelitian di Akademik Fakultas
2.	5 Juni 2024	Meminta Surat Ijin Penelitian dari BAKESBANGPOL
3.	17-18 Juli 2024	Mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara
4.	27 April - 16 Agustus 2024	Membuat janji Hari dan Tanggal bersama Narasumber untuk bersedia di wawancara

No.	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Narasumber	TTD
1.	Sabtu, 27 April 2024	Wawancara	Prof. Dr. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	
2.	Kamis, 2 Mei 2024	Wawancara	Vessel Amin, S.Kom.	
3.	Jum'at 7 Juni 2024	Wawancara	Arief Rachman. F, S.IP.	
4.	Selasa, 2 Juli 2024	Wawancara	Arief Rachman. F, S.IP.	
5.	Sabtu, 20 Juli 2024	Wawancara	Ahmad Nur Mahfuda, M.Pd. I.	
6.	Senin, 22 Juli 2024	Wawancara	Mujito	
7.	Rabu, 24 Juli 2024	Wawancara	Lamidi	
8.	Jum'at, 26 Juli 2024	Wawancara	Nikmatul Basroh, S.Pd.	
9.	Kamis, 16 Agustus 2024	Wawancara	Ust. Kholil	
10.	Selasa, 1 Oktober 2024	Wawancara	Arief Rachman. F, S.IP.	
11.	Senin, 18 November 2024	Wawancara	Drs. Sigit Akbari, M.Si	
12.	Senin, 18 November 2024	Wawancara	Arief Rachman. F, S.IP.	

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Dalam Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember.

Lokasi Penelitian : Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember dan Ormas Islam di Kabupaten Jember

No.	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Narasumber	TTD
1.	Senin, 30 Desember 2024	Wawancara	Drs. H. HAWARI HAMIM, M.Pd	
2.	Senin, 30 Desember 2024	Wawancara	Nurul Hidayah, S.Pd.I	
3.	Rabu, 01 Januari 2025	Wawancara	Drs. Imam Sutrisno	
4.	Selasa, 31 Desember 2024	Wawancara	Ust. Neman	online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S. Parman No. 89, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121

Telepon (0331) 337853 Fax (0331) 337853

Laman : bakesbangpoljemberkab.weebly.com Pos-el : [bakesbangpol@jemberkab.go.id](mailto:bakesbangpol@jemberkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 200.1.4.11/21 /35.09.415/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sigit Akbari, M.Si  
 NIP : 19650309 198602 1 002  
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV.c)  
 Jabatan : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arraflian Rachmansyah Nachranie  
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 NIM : 204103010011  
 Semester : IX  
 Judul Skripsi : Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam  
 Mengelola Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sejak tanggal 6 Juni 2024 s/d 18 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.



Kepala Bakesbang dan Politik

Drs. Sigit Akbari, M.Si  
 Pembina Utama Muda (IV.c)  
 NIP. 19650309 198602 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**FAKULTAS DAKWAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**



Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
 email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B. 1864/Un.22/6.a/PP.00.9/06/2024 4 Juni 2024  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.  
 Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
 Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Arraflian Rachmansyah Nachranie  
 NIM : 204103010011  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
 Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama  $\pm$  30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Komunikasi PPID. Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Bakesbangpol) Dalam Pengelolaan Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 FAKULTAS DAKWAH  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
 email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.2493 /Un.22/6.a/PP.00.9/07/2024  
 Lampiran : 2 Lembar  
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

2 Juli 2024

Yth.

Kepala Organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Arraflian Rachmansyah Nachranie  
 NIM : 204103010011  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
 Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin yang terlampir.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Komunikasi PPID Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Bakesbangpol) Dalam Pengelolaan Informasi Bersama Ormas Islam di Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

An. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik





**KARTU KONSULTASI  
BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM SI  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN KHAS JEMBER**

Nama : ARRAFLIAN RACHMANSYAH NACHKAMIE  
 No. Induk Mahasiswa : 204103010011  
 Fakultas : DAKWAH  
 Jurusan/Prodi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
 Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL) DALAM MENGELOLA INFORMASI BERSAMA ORMAS ISLAM DI KABUPATEN JEMBER.  
 Pembimbing : DR. KUM. WAZIS, S.Sos., M.I.KOM  
 Tanggal Persetujuan : Mulai Tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 November 2024

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21-12-2023	Mencari problem dari judul yang diajukan	
2.	01-04-2024	Menentukan sampling Penelitian	
3.	18-05-2024	Penyusunan Proposal Penelitian	
4.	01-06-2024	Pemantapan proposal Penelitian	
5.	24-06-2024	ke Seminar proposal	
6.	05-08-2024	Revisi proposal dan membahas bab 4	
7.	28-10-2024	Revisi pembahasan Bab 4	
8.	30-10-2024	Revisi Eyd dan pemantapan hasil penelitian	
9.	01-11-2024	Revisi Penyerahan kata dan Analisis.	
10.	06-11-2024	Revisi Pembahasan Temuan	
11.	13-11-2024	Revisi pembetulan Daftar Pustaka	
12.	21-11-2024	ke sidang skripsi	
13.			
14.			
15.			

Jember,  
Kepala Prodi,



ARMAH HATYAN HAJIKH, M. Kom. I.  
NIP. 198710182019031004

**DOKUMENTASI PENELITIAN****Gambar 1**

**Sabtu, 27 April 2024. Wawancara dengan Prof. Dr. Faisol Nasar Bin Madi, M.A. Didalam Tempat Tinggalnya Jl Karimata Kab. Jember.**

**Gambar 2**

**Kamis, 2 Mei 2024. Wawancara dengan Vessel Amin, S.Kom. Dalam Gedung Kantor Pengurus Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabupaten Jember**



**Gambar 3**

**Jum'at, 7 Juni 2024. Wawancara Arief Rachman. F, S.IP. Dalam Gedung Kantor BAKESBANGPOL Kab. Jember.**



**Gambar 4**

**Selasa, 2 Juli 2024. Wawancara Arief Rachman. F, S.IP. Dalam Gedung Kantor BAKESBANGPOL Kab. Jember.**



**Gambar 5**

**Sabtu, 20 Juli 2024. Wawancara Ahmad Nur Mahfuda, M.Pd. I. Dalam Gedung Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Bisnis.**



**Gambar 6**

**Selasa, 22 Juli 2024. Wawancara Mujito. Didalam Tempat Tinggalnya di Puger Kab. Jember.**



**Gambar 7**

**Rabu, 24 Juli 2024. Wawancara Lamidi . di luar teras Masjid Yayasan Al-Hujjah Jl. Sriwijaya Kab. Jember.**



**Gambar 8**

**Jum'at, 26 Juli 2024. Wawancara Nikmatul Basroh, S.Pd. Dalam Gedung TKIT-KB-TPA Buah Hati Kita Jl. Mastrip 106 Kab. Jember.**



**Gambar 9**

**Kamis, 16 Agustus 2024. Wawancara Ust, Kholil. Di dalam Warung Makan Pinggir Jalan Raya Patrang Kab. Jember.**



**Gambar 10**

**Selasa, 1 Oktober 2024. Wawancara Aried Rachman F, S.IP. Dalam Gedung Kantor BAKESBANGPOL Kab. Jember.**



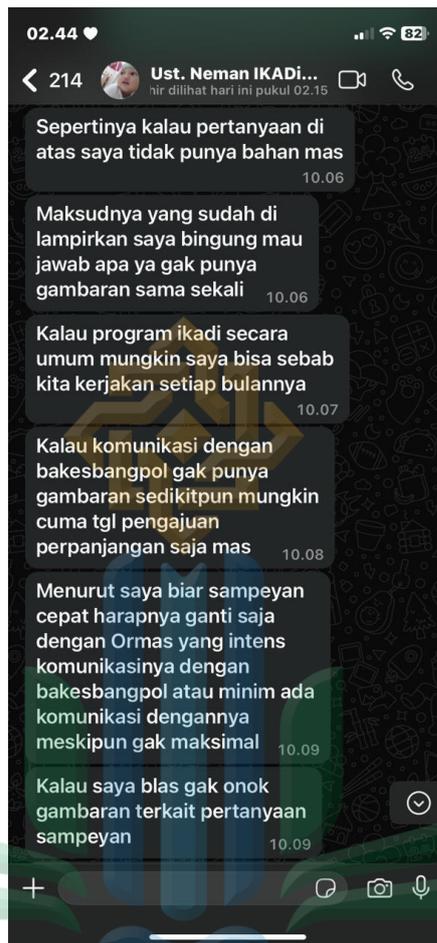
**Gambar 11**

**Senin, 30 Desember 2024. Wawancara Bersama Bapak Hawari di dalam kediamannya di Tegal Besar Kabupaten Jember.**



**Gambar 12**

**Senin, 30 Desember 2024. Wawancara Bersama Ibu Nurul Hidayah di Kantor PCNU, Fatayat NU Kabupaten Jember.**



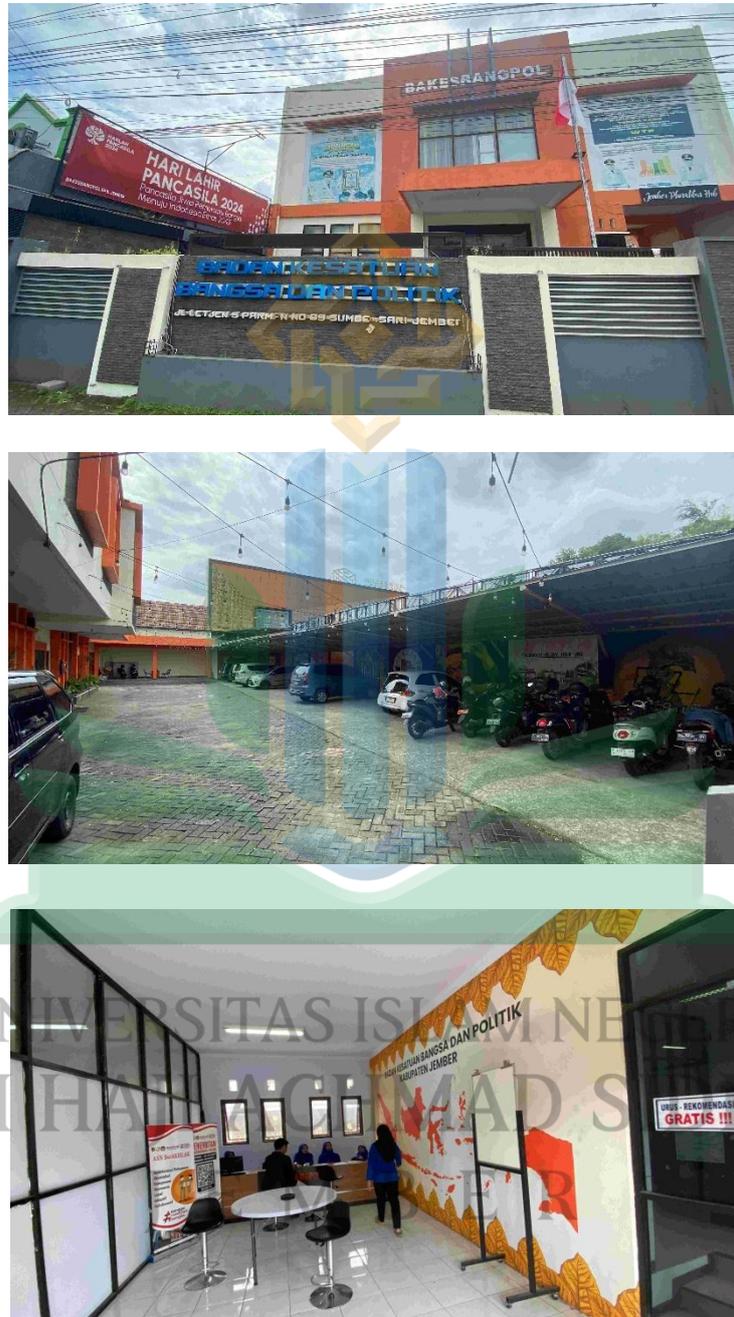
**Gambar 13**

**Selasa, 31 Desember 2024. Wawancara Online Ust. Neman IKADI Jember**



**Gambar 14**

**Rabu, 01 Januari 2025. Wawancara Bersama Bapak Imam Sutrisno di dalam kediamannya di Arjasa Kabupaten Jember.**



**Gambar 11**

**Lokasi Penelitian BAKESBANGPOL Kab. Jember**

## LAMPIRAN

### Daftar Kelompok / Lembaga / Ormas / LSM Islam Tercatat

#### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Kabupaten Jember

1.	Nama Organisasi	Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah Jember
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Keagamaan/ Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Visi:</b> Hidayatullah memiliki visi membangun peradaban Islam, disisi lain, Hidayatullah menyadari bahwa ditengah masyarakat telah berdiri berbagai jamaah dengan tujuan yang sama. Hidayatullah menegaskan diri sebagai <i>Jamaatun Minal Muslimin</i> yang berpegang pada prinsip <i>Al Wasathiyah</i> dalam membangun peradaban Islam bersama elemen umat dan bangsa.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melahirkan Kader-kader berkualitas</li> <li>2. Membangun komunitas Islami</li> <li>3. Menjalankan kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan lain-lain secara profetik dan profesional</li> <li>4. Membangun sinergi dengan segenap komponen umat Islam dalam Gerakan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i></li> <li>5. Berperan secara aktif dalam melaksanakan proses pembaharuan (Tajdid) di bidang pemikiran Islam</li> <li>6. Mengajak pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI yang bermartabat.<sup>134</sup></li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
2.	Nama Organisasi	Pengurus Daerah Jember Pemuda Hidayatullah
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Keagamaan / Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Visi :</b> Terbangunnya generasi Rabbani</p> <p><b>Misi :</b></p>

<sup>134</sup> Khairul, *Ketua Pemuda Hidayatullah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 19 Juli 2024, n.d.).

		<p>Mencapai Ridho Allah Ta'ala yang diupayakan melalui :</p> <p>a. Melahirkan kader pemuda bertauhid yang memiliki wawasan serta komitmen keumattan &amp; kebangsaan</p> <p>b. mewujudkan kekuatan pemuda Islam dalam berbagai bidang kehidupan</p> <p>c. melahirkan kader untuk Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar</p> <p><b>Tujuan :</b> Perkumpulan pemuda Hidayatullah Indonesia bertujuan keagamaan, sosial &amp; Kemanusiaan<sup>135</sup></p>
	Tahun Tercatat	2022
<b>3.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Keagamaan / Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Maksud &amp; Tujuan :</b> Dewan Masjid Indonesia (DMI adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi ini didirikan pada tahun 1972 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil Makmur yang diridhai Allah SWT, dalam wilayah Negara Republik Indonesia</p>
	Tahun Tercatat	2022
<b>4.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Dewan Pimpinan cabang Penziar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Keagamaan / Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Maksud &amp; Tujuan</b> Penziar Sholawat Wahidiyah (PSW) adalah satu-satunya lembaga Khidmah (Organisasi) yang dibentuk oleh Muallif Sholawat Wahidiyah pada tahun 1964 untuk waktu yang tidak terbatas. PSW Mendapatkan tugas untuk mengatur kebijaksanaan dan memimpin pelaksanaan serta bertanggung jawab mengenai pengalaman, penziaran, pembinaan dan pendidikan Wahidiyah</p>

<sup>135</sup> Khairul, *Ketua Pemuda Hidayatullah Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 19 Juli 2024, n.d.).

		sesuai dengan bimbingan KH. Abdoel Madjid Ma'roef, Muallif Sholawat Wahidiyah. <sup>136</sup>
	Tahun Tercatat	2022
<b>5.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Fatayat NU Cabang Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Keagamaan / Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	Fatayat NU bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan & kebangsaan  <b>Tujuan :</b> 1. Membentuk perempuan muda NU yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul kharimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, Nusa bangsa dan negara. 2. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas akidah dan tujuan NU
	Tahun tercatat	2022
<b>6.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Nurul Husna Muhammadiyah Patrang- Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Keagamaan / Panti Asuhan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<b>Visi :</b> 1. Menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berbasis keluarga yang unggul, mandiri dan berkemajuan.  <b>Misi :</b> 1. Mendayagunakan dan mengembangkan sarana prasarana Panti Asuhan yang memadai serta representative berkelayakan sesuai standar yang ditetapkan 2. Membina kualitas SDM pengelola Panti Asuhan yang professional 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pola pengasuhan anak berbasis keluarga yang unggul, mandiri dan berkemajuan 4. menyelenggarakan dan mengembangkan pola pendanaan Panti Asuhan yang efisien, transparan, dan akuntabel 5. membina dan mengembangkan Kerjasama dan kemitraan antar Panti, Pemerintah, Lembaga dan

<sup>136</sup> Ormas Wahidiyah, "Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Jember" (Jember, n.d.), diakses pada laman <https://wahidiyah.org/organisasi-penyiar-sholawat-wahidiyah/>.

		<p>Masyarakat yang harmonis dan saling menguntungkan</p> <p>6. menciptakan lingkungan Panti Asuhan yang ASRI (Aman, Sehat, Ramah dan Islam)</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dan terdayagunakannya sarana prasarana Panti Asuhan yang memadai dan representatif berkelayakan sesuai standar yang ditetapkan</li> <li>2. Terbinanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Panti Asuhan yang professional</li> <li>3. Terselenggaranya pola pengasuhan anak berbasis keluarga yang unggul, mandiri dan kemajuan</li> <li>4. terselenggaranya pola pendanaan Panti Asuhan yang efisien, transparan dan akuntabel</li> <li>5. Terbinanya Kerjasama dan kemitraan antar panti, pemerintah, lembaga dan masyarakat yang harmonis dan saling menguntungkan</li> <li>6. terciptanya lingkungan Panti Asuhan yang ASRI (Aman, Sehat, Ramah, dan Islam)</li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>7.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Pendidikan Islam Ummul Kitab Utsmany As Salafy</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pendidikan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	-
	Tahun Tercatat	2022
<b>8.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Al Husna Cabang Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pendidikan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	Yayasan mempunyai Maksud & Tujuan di bidang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosial</li> <li>b. kemanusiaan</li> <li>c. keagamaan</li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>9.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS) Darus Salamah “HIPAM Madrasah”</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pendidikan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	Darus Salamah bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dan tidak terikat pada dan atau tidak menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun

		<p><b>Maksud dan Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan silaturahmi kaum perempuan Indonesia untuk menggalang persaudaraan dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>2. Membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perempuan Indonesia yang bertaqwa, cerdas, berkualitas dan berbudaya</li> <li>b. Keluarga Indonesia yang Sakinah dan sejahtera</li> <li>c. anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi</li> </ol> </li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>10.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Jombang</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pondok Pesantren
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	-
	Tahun Tercatat	2022
<b>11.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul Islam Barokatul Qodiri</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pondok Pesantren
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	-
	Tahun Tercatat	2022
<b>12.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pondok Pesantren
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Misi :</b> Perjuangan Wahidiyah adalah upaya lahiriyah dan bathiniyah untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa menuju sadar atau makrifat kepada Allah SWT wa Rosulih SAW dengan mengamalkan Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah sesuai dengan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah.</p> <p><b>Visi :</b> Perjuangan Wahidiyah mempunyai tujuan terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin, matereil dan spirituil di dunia dan di akhirat bagi</p>

		<p>masyarakat manusia seluruh dunia.</p> <p><b>Karateristik :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jihadun-nafsi membebaskan diri dari syirik menuju sadar kepada Allah SWT wa Rosulih SAW</li> <li>2. Konsusten terhadap pembentukan akhlak mulia</li> <li>3. Peduli terhadap berbagai permasalahan ummat, bangsa dan negara</li> <li>4. Inklusif (Terbuka) secara global, boleh diamalkan oleh siapa saja tanpa pandang bulu</li> <li>5. Telah diijazahkan secara mutlak oleh Muallifnya.<sup>137</sup></li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>13.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Pendidikan Keagamaan / Pendidikan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Maksud &amp; Tujuan</b> Untuk kegiatan dakwah, sebagai media ekonomi keumat-tan dan kesempurnaan dalam dunia kependidikan.</p> <p><b>Visi :</b> Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) adalah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yang bersifat kekeluargaan, independen dan mandiri yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera, berkeadilan, dan beradab yang sesuai dengan ajaran Islam dalam waah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>138</sup></p>
	Tahun Tercatat	2022
<b>14.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Keagamaan / Keagamaan Islam
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Maksud &amp; Tujuan :</b> Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) adalah sebuah Ormas yang berhaluan kepada mazhab Syiah. Didirikan oleh Jalaudin Rakhmat pada tahun 2000 yang bertujuan untuk</p>

<sup>137</sup> Mujito, *Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Jember*. (Jember: diwawancara oleh penulis 22 Juli 2024, n.d.).

<sup>138</sup> Mahfuda, *Sekretaris Pengurus Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KB PII Kabupaten Jember*. (Jember: diwawancara oleh penulis 20 Juli 2024, n.d.).

		menghimpun seluruh pecinta Ahlul Bait Indonesia dari Ormas. Mazhab dan agama manapun dengan ketentuan orang yang bergabung dengan IJABI memiliki rasa cinta kepada keluarga nabi. Pencerahan dan pemberdayaan menjadi misi utama Ormas ini. Sebuah kelompok lahir karena memiliki tujuan yang sama. Untuk menghimpun tujuan tersebut maka dipilihlah sebuah wadah berbentuk organisasi yang bisa menampung aspirasi-aspirasi kelompok. <sup>139</sup>
	Tahun Tercatat	2022
<b>15.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Surya Nuswantara Wilwatikta</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan / Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<b>Maksud &amp; Tujuan :</b> 1. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial. 2. Yayasan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, bertujuan membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan yang menyentuh kemanusiaan. 3. Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, bertujuan ikut membantu pemerintah dalam meninjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama, atau peribadatan.
	Tahun Tercatat	2022
<b>16.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan / Keagamaan, Pemberdayaan, Perempuan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<b>Visi :</b> Salimah atau persaudaraan Muslimah merupakan salah satu organisasi yang ada di masyarakat yang memiliki visi menjadi Ormas perempuan <i>Pelopor</i> dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia  <b>Misi :</b>

<sup>139</sup> Lamidi, *Sekretaris DPD Jamaah Ahlul Bait (ABI) Indonesia Kabupaten Jember* (Jember: diwawancara oleh penulis 24 Juli 2024, 2024).

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas dan memperkuat soliditasstruktur</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengurus</li> <li>3. Meningkatkan kualitas hidup anggota melalui program Salimah</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas anggota sebagai basis massa Salimah</li> <li>5. Meningkatkan peran Salimah dalam upaya peningkatan kualitas perempuan, anak dan keluarga dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan Kesehatan</li> <li>6. Memperluas dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan institusi lain dalam merealisasikan program terkait isu perempuan, anak dan keluarga</li> <li>7. Mengokohkan peran Salimah sebagai Ormas pelopor dalam pergerakan perempuan Indonesia.<sup>140</sup></li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>17.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Sabilillah Kaliwining Rambipuji Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p>Dalam segala usaha dan karyanya, Yayasan ini selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.</p> <p><b>Maksud &amp; Tujuan :</b>  Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosial</li> <li>b. Keagamaan</li> <li>c. Kemanusiaan</li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
<b>18.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Bantuan Hukum Cakra</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan / Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Visi :</b>  Penegakan Hukum Kerakyatan</p> <p><b>Misi :</b>  Pendampingan hukum dalam masyarakat kalangan bawah, tertera dalam UU No. 16 Tahun</p>

<sup>140</sup> Nikmatul Basroh, "SELAYANG PANDANG SALIMAH 2023" (Jember: Diwawancara oleh penulis 26 Juli 2024, n.d.).

		<p>2011, tentang bantuan hukum. Syarat memperoleh bantuan hukum Cakra sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri dengan menyertakan surat tidak mampu dari desa setempat.</li> <li>2. Apabila ditemukan ketidakbenaran dalam isian formulis klien, maka LBH Cakra dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.<sup>141</sup></li> </ol> <p><b>Maksud &amp; Tujuan :</b> Lembaga Bantuan Hukum Cakra fokus pada bantuan terhadap rakyat kecil dan pencari keadilan yang selama ini dalam selalu posisi sulit. Perbedaan dari Lembaga Bantuan Hukum lainnya adalah mengutamakan kasih yang berintegritas, dalam tugasnya membantu rakyat kecil, mereka tak membedakan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).<sup>142</sup></p>
	Tahun Tercatat	2022
<b>19.</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Yayasan Habilis Indonesia Madani</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan / Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Maksud &amp; Tujuan :</b> Yayasan Habilis Indonesia Madani, merupakan suatu Yayasan yang didirikan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan ini memiliki ranah dalam melaksanakan kegiatan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam mengembangkan berbagai program kerja dalam berbagai ranah, Yayasan ini menjalin relasi Kerjasama dan sinergitas dengan beberapa pihak dalam tingkat lokal dan nasional sebagai stakeholder dalam mewujudkan visi dan misi Yayasan.</p> <p><b>Visi :</b> Menjadi Yayasan credible dan profesional dalam</p>

<sup>141</sup> “LBH Cahaya Keadilan Rakyat (CAKRA),” n.d., diakses pada laman <https://forumnusantaranews.com/lbh-cakra-peringati-ulang-tahun-ke-3/>.

<sup>142</sup> Zevriyn Boy Hendra Kanu, “LBH Cahaya Keadilan Rakyat (CAKRA),” n.d., diakses pada laman <https://www.jawapos.com/jabodetabek/01303740/berkenalan-dengan-lbh-cakra-yang-beri-bantuan-hukum-gratis>.

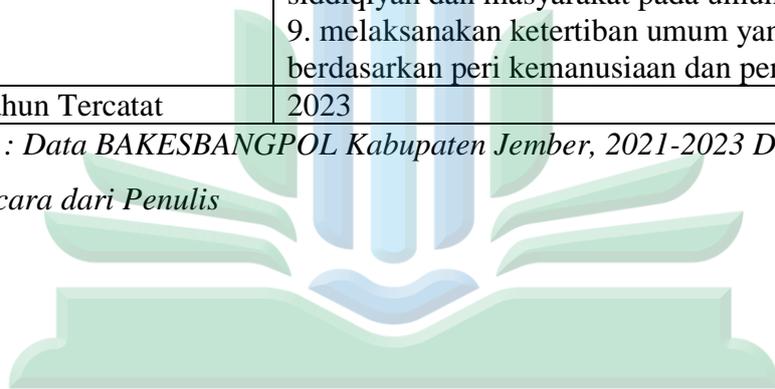
		<p>melayani masyarakat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan berintegritas tinggi menuju kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan berbagai layanan sosial kemanusiaan, masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan golongan.</li> <li>2. Mengorganisir, mengelola dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal penyelesaian permasalahan sosial kemanusiaan secara profesional, terinteraksi dan berkesinambungan sehingga menjadi kekuatan kekeluargaan.</li> <li>3. Menjadi wadah masyarakat untuk memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan secara layak yang memenuhi rasa keadilan</li> <li>4. Mengembangkan semangat kewirausahaan sosial untuk mendukung kemandirian unit layanan</li> <li>5. menggerakkan dan melibatkan masyarakat untuk peduli dan berbagi.<sup>143</sup></li> </ol>
	Tahun Tercatat	2022
20.	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Pengurus Daerah Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kabupaten Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Keagamaan / Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mewadahi aktivitas anggotanya dalam mendayagunakan potensinya untuk kemashlahatan umat dan bangsa melalui aktivitas dakwah yang membawa rahmat</li> <li>2. a. Membangun pemahaman Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah bagi segenap umat manusia <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Membangun sikap hidup ber-Islam yang moderat</li> <li>c. Menyebarkan, mengamalkan dan membela nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin</li> <li>d. meningkatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah</li> <li>e. meningkatkan kemampuan dan peran anggota IKADI dalam membangun kehidupan berbangsa</li> </ol> </li> </ol>

<sup>143</sup> Habilis Indonesia Madani, "Team IT Habilis Indonesia Madani," n.d., diakses pada laman <http://habilisindonesiamadani.id/>.

		<p>dan bernegara dalam bingkai NKRI</p> <p><b>Sifat &amp; Ciri :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat kemanusiaan (Insaniyah) yang diwujudkan dalam bentuk persaudaraan (Ukhuwah) dan silaturahmi dalam membina dan menebarkan Islam Rahmatan Lil Alamin serta mengembangkan saling mengenal (Ta'aruf), saling ber-Ukhuwah (Ta'akhi), saling wasiat (Tawashyi) di jalan kebenaran, guna memperkuat kesatuan &amp; persatuan bangsa serta mengangkat harkat dan martabat umat manusia</li> <li>2. Ber-ciri keterbukaan (Infittahiyah) dalam keanggotaan dan menampung aspirasi, partisipasi, dan prakarsa anggota serta bersifat aktif dan responsif dalam mensikapi dinamika kehidupan umat</li> <li>3. Ber-ciri moderat (Wasathiyah) yang dicerminkan dalam keluwesan pemikiran &amp; pemahaman, sikap toleran (Tasamuh) dalam penyelenggaraan kegiatan dan program organisasi secara bersama (Amal jamai) serta mandiri dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya sendiri dalam mencapai visi dan tujuan IKADI</li> <li>4. Ber-ciri kebangsaan (Wathaniyah) yang diimplementasikan pada pengembangan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan kebersamaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan anggota serta berpartisipasi aktif dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip bernegara NKRI</li> </ol>
	Tahun Tercatat	2023
21.	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Shiddiqiyah Jember</b>
	Bidang Kegiatan/ Sub Bidang Kegiatan	Sosial Kemasyarakatan / Organisasi Keagamaan
	Karakteristik (Visi & Misi Ormas)	<p><b>Ciri Khas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silaturahmi, Santun dan Shodaqoh (3S)</li> <li>2. Pelayan keimanan, pelayanan kemanusiaan, pelayanan ke-alam-an</li> <li>3. Cinta tanah air bagian dari iman</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menaungi dan melindungi kegiatan warga thoriqah shiddiqiyah dalam menjalankan delapan kesanggupan warga thoriqah shiddiqiyah</li> </ol>

		<p>2. Menumbuhkan sifat hati yang terpuji dan menghapuskan sifat hati yang tercela bagi warga thariqoh siddiqiyah dan masyarakat pada umumnya</p> <p>3. Meningkatkan kesejahteraan warga Thariqoh Siddiqiyah dan masyarakat pada umumnya</p> <p>4. Melakukan pelestarian ajaran thoriqoh siddiqiyah Indonesia</p> <p>5. melindungi dan mengembangkan aset-aset siddiqiyah</p> <p>6. mencapai yaddulohi alal jama'ah dengan melindungi dan memperkuat persatuan warga thoriqoh siddiqiyah untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan allah</p> <p>7. melakukan kegiatan semata-mata untuk mencapai ridha allah</p> <p>8. mencerdaskan kehidupan warga thoriqoh siddiqiyah dan masyarakat pada umumnya</p> <p>9. melaksanakan ketertiban umum yang berdasarkan peri kemanusiaan dan peri keadilan</p>
	Tahun Tercatat	2023

*Sumber : Data BAKESBANGPOL Kabupaten Jember, 2021-2023 Dan Hasil Wawancara dari Penulis*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS**

Nama : Arraflian Rachmansyah Nachranie  
 NIM : 204103010011  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Agustus 2001  
 Prodi : Komunikasi & Penyiaran Islam  
 Alamat : Jl. Bengawan Solo No. 4 Jember  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Komunikasi & Penyiaran Islam  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 E-mail : [raflinachranie@gmail.com](mailto:raflinachranie@gmail.com)

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Hijrah Kab. Jember
2. SDN Jember Lor 1 Patrang Kab. Jember
3. SMPN 1 Kab. Jember
4. SMAS Muhammadiyah 3 Kab. Jember
5. S1-Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Karang Taruna RW 027 Lingkungan Tegal Boto Lor
2. Komunitas Perfilman Jember (KOPER) UIN KHAS JBR
3. Demisioner Kabid Ke-Organisasian KOPER JEMBER 2023-2024
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komsat UIN KHAS JBR
5. Demisioner Kabid Broadcast HMPS KPI UIN KHAS JBR 2022-2023